

ABSTRAK

MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DENGAN KARAKTERISTIK WILAYAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA

Oleh

MAIRIZAL SALEHUDIN SIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai variabel ekonomi terhadap pembangunan ekonomi inklusif (IPEI) dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa berdasarkan Tipologi Klassen. IPEI digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat inklusivitas Pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel terhadap 119 Kabupaten/Kota selama periode 2019–2023, yang dibagi dalam empat kuadran Tipologi Klassen. Variabel independen yang dianalisis meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, harapan lama sekolah (modal manusia), inklusi keuangan, kesempatan kerja, ketimpangan pendapatan (Gini), infrastruktur ekonomi (jalan), dan infrastruktur dasar (air bersih). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel, kecuali infrastruktur dasar, secara signifikan memengaruhi IPEI pada sebagian besar kuadran. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kontribusi tiap variabel berbeda antar kuadran: pertumbuhan ekonomi dominan di Kuadran I, ketimpangan di Kuadran II, modal manusia di Kuadran III, dan inklusi keuangan di Kuadran IV. Temuan ini menjadi dasar pengembangan model pembangunan inklusif berbasis: *pro-poor growth* (Kuadran I), *growth with equity* (Kuadran II), *human capital-based growth* (Kuadran III), dan *financial inclusion-based growth* (Kuadran IV). Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep IPEI berbasis wilayah dan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.

Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi Inklusif, Tipologi Klassen, IPEI, Pulau Jawa, Regresi Data Panel.

ABSTRACT

INCLUSIVE ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL WITH REGIONAL CHARACTERISTICS IN REGENCY/CITY IN JAVA ISLAND

By

MAIRIZAL SALEHUDIN SIATAN

This study aims to analyze the influence of various economic variables on inclusive economic development (IPEI) by considering the characteristics of the Regency/City area in Java Island based on the Klassen Typology. IPEI is used as the main indicator to measure the level of inclusiveness of Development. This study uses a quantitative method with a panel data regression approach to 119 Regencies/Cities during the 2019–2023 period, which are divided into four quadrants of the Klassen Typology. The independent variables analyzed include economic growth, poverty rate, expected length of schooling (human capital), financial inclusion, employment opportunities, income inequality (Gini), economic infrastructure (roads), and basic infrastructure (clean water). The results of the study show that all variables, except basic infrastructure, significantly affect IPEI in most quadrants. Further analysis shows that the contribution of each variable differs between quadrants: economic growth is dominant in Quadrant I, inequality in Quadrant II, human capital in Quadrant III, and financial inclusion in Quadrant IV. These findings form the basis for developing an inclusive development model based on: pro-poor growth (Quadrant I), growth with equity (Quadrant II), human capital-based growth (Quadrant III), and financial inclusion-based growth (Quadrant IV). This study provides theoretical contributions in developing the concept of IPEI based on regions and practical contributions in formulating policies that are contextual and responsive to the dynamics of regional development.

Keywords: Inclusive Economic Development, Klassen Typology, IPEI, Java Island, Panel Data Regression.

**MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DENGAN
KARAKTERISTIK WILAYAH PADA KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA**

Oleh

Mairizal Salehudin Siatan

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor
ILMU EKONOMI

Pada

Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI

Judul Disertasi : Model Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan Karakteristik Wilayah pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa

Nama Mahasiswa : Mairizal Salehudin Siatan

Nomor Pokok Mahasiswi : 1831041004

Peminatan : Ilmu Ekonomi Publik

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Marselina, SE.,M.P.M
NIP. 19670710 199003 2 001

Promotor


(.....)

Dr. I Wayan Suparta, SE.,M.Si
NIP. 19611209 198803 1 003

Co-Promotor (.....)



Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi,


Prof. Yuliahsyah, SE.,M.S.A., Ph.D.,Akt
NIP.19730723 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Habibullah Jimad, SE.,M.Si**
(Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan)

(.....)

Sekretaris : **Prof. Yuliansyah, SE.,M.S.A., Ph.D.,Akt**
(Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

(.....)

Promotor : **Prof. Dr. Marselina, SE.,M.P.M**

(.....)

Co – Promotor : **Dr. I Wayan Suparta, SE.,M.Si**

(.....)

Penguji Luar Komisi :

1. **Dr. Neli Aida, SE.,M.Si**
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)

(.....)

2. **Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc**
(Penguji Eksternal Universitas Sriwijaya)

(.....)

3. **Prof. Dr. Toto Gunarto, SE.,M.Si**
(Penguji Internal FEB Universitas Lampung)

(.....)

4. **Dr. Asih Murwiati, SE.,M.Si**
(Penguji Internal FEB Universitas Lampung)

(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



Prof. Dr. Najfoni, SE.,M.Si
NIP. 49630621 199003 1 003

Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. H. Murhadi, M.Si
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Disertasi : 11 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mairizal Salehudin Siatan
NPM : 1831041004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
Judul Disertasi : Model Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan Karakteristik Wilayah
Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil penelitian/ disertasi serta sumber informasi atau data adalah benar dan merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah dicantumkan dalam daftar Pustaka di bagian akhir penelitian/disertasi ini
2. Menyerahkan sepenuhnya hasil penelitian saya dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* untuk dipublikasikan kepada media cetak ataupun elektronik pada Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Tidak ada menuntut ataupun mengganti rugi dalam bentuk apapun atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung terhadap hasil penelitian/disertasi Saya.
4. Apabila dikemudian hari ternyata penulisan disertasi ini merupakan hasil plagiat/penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025



Mairizal Salehudin Siatan



MAIRIZAL SALEHUDIN SIATAN,SE.,MM

Lahir di Rangkasbitung pada tanggal 12 Mei 1986, adalah seorang profesional perencana dan akademisi yang telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia, khususnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penulis tinggal di Bandar Lampung, tepatnya di AK House, Jalan Urip Sumohardjo, Gang Prajurit No. 10A, Kalibalau Kencana Bandarlampung. Saat ini, penulis aktif sebagai Perencana Ahli Madya pada satuan kerja Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus menjabat sebagai Koordinator Tim Perencanaan di Bagian Perencanaan

dan Sistem Informasi UIN Raden Intan Lampung.

Penulis anak dari Abdurahman Siatan dan Tarni Sutarni, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Kehidupan keluarga penulis harmonis dan mendukung penuh kiprahnya di dunia akademik dan birokrasi. Ia menikah dengan Tri Endah Astuti, SE., dan dikaruniai tiga orang anak yang menjadi sumber semangat dalam menjalani setiap proses pengabdian dan pendidikan: Atikah Kirana Bilqis Siatan, Abdullah Kahfi Omar As'ady Siatan, dan Arskal Kamiel Rain As'ady Siatan.

Pendidikan dasar hingga menengah ditempuhnya di kota kelahiran, mulai dari SD Negeri 2 Rangkasbitung Komplek Pasir Tariti (1991–1997), SLTP Negeri 1 Rangkasbitung (1997–2000), dan SLTA Negeri 1 Rangkasbitung (2000–2003). Setelah menamatkan pendidikan menengah, ia melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2006. Minatnya terhadap manajemen dan pengelolaan kelembagaan publik membawanya meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Saburai pada periode 2010–2012. Kini, ia tengah melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Lampung, dengan fokus penelitian pada isu pembangunan ekonomi inklusif berbasis karakteristik wilayah.

A. RIWAYAT PEKERJAAN

No.	Tahun	Instansi	Jabatan
1	2008 – 2016	UIN Raden Intan Lampung	Pelaksana
2	2016 – 2022	UIN Raden Intan Lampung	Kasubbag. Perencanaan Anggaran
3	2022 – sekarang	UIN Raden Intan Lampung	Koordinator Perencanaan Anggaran
4	2024 – sekarang	UIN Raden Intan Lampung/Kemenag	Perencana Ahli Madya

B. KARYA ILMIAH

No	Tahun	Judul Karya Ilmiah	Nama Penerbit/Jurnal	URL
1	2023	Halal Tourism as a Strategy to Maximize Employment Absorption in Lampung	Jurnal Ilmiah Gema Perencana	http://gemaperencana.id/index.php/JIGP/article/view/30
2	2023	Strategi Manajemen Usaha “Batik Lochatara” Berbasis Budaya Lokal dan Produk Unggulan di Kediri	Jurnal Manajerial	https://ejournal.upi.edu/index.php/manajerial/article/view/60706/0
3	2023	Economic Growth on Labor Absorption: District/City Panel Data Analysis in Lampung Province	International Journal of Professional Business Review	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9060802
4	2024	Infrastructure Development and Regional Disparities	KnE Social Sciences	https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/16289
5	2024	Human Resource Development in Islamic Higher Education through Religious Moderation Values: Fostering Civil Society	Ulumuna	https://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/1135
6	2024	Micro and Small Industry (MSI) Based on Halal Products in Lampung: What Has the Government Done?	KnE Social Sciences	https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/16285
7	2025	Dynamics of inclusive growth in Indonesia: Key factors in emerging and lagging regions of Java	Edelweiss Applied Science and Technology	http://www.learninggate.org/index.php/2576-8484/article/view/6552

No	Tahun	Judul Karya Ilmiah	Nama Penerbit/Jurnal	URL
8	2025	REALIZING INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH: ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF INCOME AND POVERTY REDUCTION ON THE ISLANDS OF SUMATRA AND JAVA	ASIA-PACIFIC MANAGEMENT ACCOUNTING JOURNAL	https://apmaj.uitm.edu.my/a20n1-6

C. KARYA BUKU

No.	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit	ISBN/Penerbit
1	Membangun Ekonomi Inklusif : Pendekatan Berbasis Karakteristik Wilayah di Pulau Jawa	2025	2	Branda Media Nusantara	978-623-88257-6-9

D. HAKI

No.	Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Membangun Ekonomi Inklusif : Pendekatan Berbasis Karakteristik di Pulau Jawa	2025	Buku	000887930
2	Dynamics of inclusive growth in Indonesia: Key factors in emerging and lagging regions of Java	2025	Karya Tulis (Artikel)	000887854

E. PRESTASI

No.	Tahun	Instansi	Prestasi
1	2006	Universitas Lampung	Wisudawan Terbaik 3 universitas tingkat Sarjana Wisudawan terbaik 1 fakultas tingkat sarjana

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar – benarnya

Bandarlampung, 16 Juni 2025
Yang Menyatakan


Mairzal Salehudin Siatan

Sebuah karya dan pencapain sejatinya adalah tanda bahwa Allah SWT telah memudahkan, bukan karena kita mampu, tapi karena Dia berkenan.

Kemuliaan seorang manusia tidak diukur dari apa yang ia punya, tapi dari seberapa besar manfaat yang ia tebarkan bagi orang lain.

- MS Siatan -

Kupersembahkan karya ini kepada :

Istri ku tercinta, Orang Tua dan Anak-Anakku yang selalu memberikan dukungan dan keceriaan selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul "*Model Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan Karakteristik Wilayah pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.*" Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa capaian ini tidak mungkin terwujud tanpa pertolongan Allah SWT, serta dukungan, doa, dan ridho dari orang tua, istri dan keluarga tercinta serta berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan disertasi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan disertasi;
3. Prof. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Ak., CA., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi yang telah memberikan doa dan dukungan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si selaku, Direktur Pascasarjana Universitas Lampung atas motivasi dan semangatnya;
5. Prof. Dr. Marselina S.E., M.P.M selaku promotor yang telah sabar membantu, memberikan arahan, masukan dan terus memberikan inspirasi dan motivasi untuk dapat menyelesaikan disertasi dengan segera dan berkualitas;
6. Dr. I Wayan Suparta selaku kopromotor yang telah memberikan doa dan dukungan serta menjadi teman diskusi terbaik setiap waktu untuk peningkatan kualitas dari disertasi ini;
7. Prof. Dr. Bernadette Robiani M.Sc, selaku Penguji Eksternal dari Universitas Sriwijaya yang sudah membantu mengulas dan memberikan saran yang sangat bermanfaat dalam peningkatan substansi disertasi ini;
8. Dr. Neli Aida SE., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Mahasiswa dan Alumni sekaligus sebagai Penguji Internal yang telah memberikan motivasi dan saran terbaik untuk menyelesaikan disertasi ini;

9. Prof. Dr. Toto Gunarto SE.M.Si selaku Penguji Internal yang telah memberikan saran, doa dan motivasi dalam menyelesaikan disertasi ini;
10. Dr. Asih Murwiati SE.,M.Si selaku Penguji Internal yang telah memberikan motivasi dan saran terbaik untuk menyelesaikan disertasi ini;
11. Istri tercinta, Tri Endah Astuti, S.E., anugerah terindah dalam hidup saya, yang dengan doa-doa tulus, cinta tanpa syarat, serta kesetiaan yang tak pernah pudar, senantiasa membersamai setiap langkah dan perjuangan saya. Terima kasih telah menjadi pelita di saat gelap, penguat di kala lelah, dan rumah tempat hati ini kembali. Disertasi ini pun tak lepas dari keikhlasanmu yang selalu mengiringi setiap proses yang saya jalani;
12. Orang tua saya : Bapak Abdurahman Siatan, Mama Tarni Sutarni dan Mama Hj. Sri Harningsih yang menjadi inspirasi bagi saya dan selalu menanamkan nilai-nilai spiritual dalam setiap langkah kehidupan, sehingga apa yang dicita-citakan selalu tercapai lewat doa dan usaha;
13. Ketiga permata hati saya — Atikah Kirana Bilqis Siatan, Abdullah Kahfi Omar As'ady Siatan, dan Arskal Kamiel Rain As'ady Siatan — cahaya hidup Abah yang senantiasa memberi makna dalam setiap langkah. Semoga kelak Abah bisa menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi kalian, sebagaimana kalian telah menjadi alasan terbesar Abah untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Kalian adalah doa-doa yang hidup, amanah terindah yang Allah titipkan dalam hidup ini.
14. Keluarga besar Bapak Abdurahman Siatan (Hayatinufus Siatan dan Aisah Lestari Siatan beserta suami dan anak-anak) dan keluarga besar Alm. Bapak Mudjianto (Ika Wulan Handayani dan Dwinita mulyani beserta suami dan anak-anak) yang telah memberikan dukungan dan perhatian selama ini, sehingga saya bisa menyelesaikan studi doktor ini dengan baik;
15. Sahabat terbaik saya Ukhti Ciptawaty SE, M.Si, Ahmad Dhea Pratama SE,M.Si, Dr. Husna Purnama yang selalu membantu, memotivasi dan banyak hal baik lainnya sehingga menjalani studi doktor ini terasa lebih mudah;
16. Bapak Kepala Biro AAKK UIN Raden Intan Lampung, Bapak Dr. H. Abdurahman M.Pd beserta Ibu Amanda, yang banyak sekali membantu, memotivasi dan memberikan solusi atas berbagai masalah yang saya hadapi;
17. Seluruh Keluarga besar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terutama Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor II, Bapak Kepala Biro AUPKK serta seluruh jajaran pimpinan, rekan-rekan dosen dan tenaga kependidikan;

18. Tim perencanaan dan keuangan khususnya tim OPER dan OROK : Anis Ulil Hidayati, Aidil Juadri, Yoga Aditya Anggana Putra, Fahmi Iskandar, Faiq Sulthon Dani dan Syaifulloh Ngukup yang selalu membantu menyelesaikan pekerjaan saya dikantor sehingga menjalani studi doktor ini terasa lebih mudah;
19. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
20. Karyawan Pascasarjana Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademik penulis selama menjadi mahasiswa;
21. Seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis; dan
22. Rekan rekan seperjuangan dan sahabat, terimakasih atas dukungan dan doa serta motivasinya.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Penulis



Maipizal Salehudin Siatan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu Konseptual.....	11
1.3 Isu Kontekstual	25
1.4 Isu Metodologi	40
1.5 Rumusan Masalah	42
1.6 Tujuan Penelitian	42
1.7 Keaslian dan kebaruan penelitian.....	42
1.8 Kontribusi Penelitian.....	43
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
2.1 Kajian Pustaka.....	45
2.1.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	45
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	53
2.1.3 Kesempatan Kerja	58
2.1.4 Infrastruktur	61
2.1.5 Ketimpangan	64
2.1.6 Kemiskinan	67
2.1.7 Harapan Lama Sekolah	71
2.1.8 Inklusi Keuangan	73
2.1.9 Penelitian Terdahulu	74
2.2 Kerangka Pemikiran.....	76
2.3 Hipotesis Penelitian.....	93
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	96
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	96
3.3 Tahapan Penelitian	98
3.4 Metode Analisis penelitian.....	101
3.4.1 Analisis Deskriptif.....	102
3.4.2 Analisis Kuantitatif	104
3.5 Pemilihan Model Data Panel	105

3.6 Pengujian Asumsi Klasik	106
3.6.1 Deteksi Multikolinearitas	109
3.6.2 Uji Heterokedastisitas	109
3.6.3 Uji Autokorelasi	110
3.7 Pengujian Hipotesis Penelitian.....	110
3.6.1 Uji t (<i>t-test</i>)	110
3.6.2 Uji F-Statistik	112
3.8 Individual Effect.....	113

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Pertumbuhan Inklusif (IPEI) Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.....	114
4.2 Hasil Analisis Tipologi Klassen.....	119
4.3 Pemilihan Model Data Panel.....	126
4.4 Pengujian Asumsi Klasik	129
4.4.1 Uji Multikolinieritas.....	129
4.4.2 Pengujian Autokorelasi	129
4.4.3 Uji Heterokedastisitas	131
4.5 Pengujian Hipotesis Penelitian.....	132
4.5.1 Hasil Uji t (Parsial).....	132
4.5.2 Hasil Uji F-Statistik.....	134
4.6 Hasil dan OLS dan Analisis Individual Effect.....	135
4.6.1 Hasil Perhitungan, Model Pembangunan Inklusif dan <i>Individual Effect</i> Kuadran I	135
4.6.1 Hasil Perhitungan, Model Pembangunan Inklusif dan <i>Individual Effect</i> Kuadran II.....	144
4.6.1 Hasil Perhitungan, Model Pembangunan Inklusif dan <i>Individual Effect</i> Kuadran III.....	153
4.6.1 Hasil Perhitungan, Model Pembangunan Inklusif dan <i>Individual Effect</i> Kuadran IV	162
4.7 Analisa Pengaruh Masing – Masing Variabel.....	170
4.8 Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan dan Program Peningkatan IPEI	192
4.8.1 Kebijakan Perlindungan Sosial	193
4.8.2 Kebijakan Terkait Inklusi Keuangan	202
4.8.3 Kebijakan Pemenuhan Layanan Dasar.....	205

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	213
5.2 Saran.....	219
5.3 Pengembangan Penelitian Masa Depan	222

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Variabel dan Deskripsi Operasional Variable	97
2. Hasil Uji Chow/Fixed Effect	126
3. Hasil Uji Husman/Random Effect	127
4. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM).....	128
5. Hasil Pengujian Multikolinieritas	129
6. Hasil Deteksi Masalah Autokorelasi	130
7. Hasil Deteksi Masalah Heterokedastisitas.....	131
8. Hasil Uji t.....	133
9. Hasil Uji F pada tingkat kepercayaan 95 persen	135
10. Hasil Ordinary Least Square (OLS) Pada Model Fixed Effect Kuadran I	136
11. Hasil Individual Effect pada Kuadran I.....	139
12. Hasil Ordinary Least Square (OLS) Pada Model Fixed Effect Kuadran II.....	144
13. Hasil Individual Effect pada Kuadran II.....	148
14. Hasil Ordinary Least Square (OLS) Pada Model Fixed Effect Kuadran III	153
15. Hasil Individual Effect pada Kuadran III	156
16. Hasil Ordinary Least Square (OLS) Pada Model Fixed Effect Kuadran IV	162
17. Hasil Individual Effect pada Kuadran IV	165
18. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPEI.....	171
19. Pengaruh Persentase Penduduk Miskin terhadap IPEI.....	174
20. Pengaruh Modal Manusia terhadap IPEI.....	177
21. Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap IPEI	179
22. Pengaruh Tingkat Kesempatan Kerja terhadap IPEI.....	182
23. Pengaruh Ketimpangan terhadap IPEI	184
24. Pengaruh Infrastruktur Ekonomi terhadap IPEI	187
25. Pengaruh Infrastruktur Dasar terhadap IPEI	190

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	15
2. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Pulau, Triwulan I 2024	25
3. Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tahun 2019 - 2023.....	27
4. Tingkat Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi 2019 - 2023.....	28
5. Keadaan ketimpangan (rasio gini) dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa dan Sumatera Tahun 2019 – 2023	31
6. Keadaan Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tahun 2019 – 2023	35
7. Perbandingan Rata – rata Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Inklusif pada Provinsi di Jawa 2019 – 2023	39
8. Kerangka Pemikiran	92
9. Tahapan Penelitian	98
10. Pemilihan Model Data Panel	105
11. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan inklusif pada 119 Kabupaten Kota di Pulau Jawa Tahun 2019-2022	115
12. Perbandingan rata- rata IPEI pada Kabupaten/Kota.....	117
13. Kuadran Tipologi Klassen 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2019-2023.....	119
14. Peta Sebaran Tipologi Klassen 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2019-2023	120
15. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 – 2023	195
16. Perkembangan Tingkat Kemiskinan.....	199
17. Perkembangan Rasio Jumlah Kredit UMKM.....	203
18. Perkembangan Harapan Lama Sekolah.....	207
19. Perkembangan Koefisien Gini.....	210

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data IPEI Kabupaten/Kota
2. Data Variabel Kuadran I
3. Data Variabel Kuadran II
4. Data Variabel Kuadran III
5. Data Variabel Kuadran IV
6. Grafik Tipologi Klassen
7. Tipologi Klassen 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa
8. Hasil Fixed Test Kuadran I
9. Hasil Random Test Kuadran I
10. Hasil LM Test Kuadran I
11. Hasil Autokorelasi, Heteroskedastisitas dan Multikolinieritas Kuadran I
12. Hasil Individual Effect Kuadran I
13. Hasil Regresi Linear Berganda Data Panel Kuadran I
14. Hasil Fixed Test, Random Test dan LM Test Kuadran II
15. Hasil Autokorelasi, Heteroskedastisitas dan Multikolinieritas Kuadran II
16. Hasil Individual Effect Kuadran II
17. Hasil Regresi Linear Berganda Data Panel Kuadran II
18. Hasil Fixed Test, Random Test dan LM Test Kuadran III
19. Hasil Autokorelasi, Heteroskedastisitas dan Multikolinieritas Kuadran III
20. Hasil Individual Effect Kuadran III
21. Hasil Regresi Linear Berganda Data Panel Kuadran III
22. Hasil Fixed Test, Random Test dan LM Test Kuadran IV
23. Hasil Autokorelasi, Heteroskedastisitas dan Multikolinieritas Kuadran IV
24. Hasil Individual Effect Kuadran IV
25. Hasil Regresi Linear Berganda Data Panel Kuadran IV

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pembangunan ekonomi mengalami evolusi seiring perkembangan ilmu ekonomi dan perubahan dinamika global. Pada awalnya, pembangunan ekonomi lebih didefinisikan secara sempit sebagai peningkatan pendapatan per kapita, tetapi dalam perkembangannya, konsep ini menjadi lebih luas dengan memasukkan aspek sosial, struktural, dan lingkungan.

Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, pembangunan ekonomi sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Konsep ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776), yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan spesialisasi dan efisiensi pasar.

Memasuki abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, definisi pembangunan ekonomi mengalami perubahan signifikan. Schumpeter (1934) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya terkait dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga inovasi, kewirausahaan, dan perubahan dalam struktur ekonomi (Schumpeter, 1934).

Pada dekade 1950-an dan 1960-an, konsep pembangunan ekonomi mulai dikaitkan dengan teori pertumbuhan modern, seperti yang dikembangkan oleh Harrod-Domar dan Solow. Model Harrod-Domar menekankan bahwa tingkat tabungan dan efisiensi modal menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Harrod, 1939; Domar, 1946). Sementara itu, Solow (1956) mengembangkan teori pertumbuhan neoklasik yang menunjukkan bahwa selain modal dan tenaga kerja, kemajuan teknologi juga menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi (Solow, 1956).

Pada tahun 1970-an, konsep pembangunan ekonomi mengalami pergeseran dari pendekatan pertumbuhan semata menjadi pendekatan kesejahteraan dan

pemerataan. Para ekonom seperti Amartya Sen (1981) mengkritik pendekatan ekonomi yang hanya berfokus pada peningkatan PDB dan menekankan pentingnya kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan individu sebagai indikator pembangunan ekonomi (Sen, 1981).

Pada abad ke-21, pembangunan ekonomi semakin dikaitkan dengan keberlanjutan dan inklusivitas. Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2009) memperkenalkan pendekatan baru dalam mengukur pembangunan dengan menyoroti faktor kesejahteraan sosial, lingkungan, dan kebahagiaan masyarakat sebagai indikator yang lebih komprehensif daripada hanya pertumbuhan ekonomi. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat adil dan berkelanjutan (Stiglitz et al., 2009).

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pendekatan dalam ekonomi yang menggarisbawahi pentingnya distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi di antara seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada tingkat pertumbuhan, tetapi juga pada bagaimana pertumbuhan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan. Konsep ini berkembang dari kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia yang pesat sering kali disertai dengan peningkatan ketimpangan pendapatan (Klasen, 2010). Fenomena ini muncul pada era 1960-an di negara-negara berkembang Asia, ketika pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak diiringi dengan pengurangan ketimpangan (Todaro & Smith, 2011).

Konsep pembangunan ekonomi inklusif berkembang sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap model pertumbuhan ekonomi yang berfokus semata-mata pada peningkatan indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa memperhatikan distribusi manfaat pertumbuhan tersebut (Ali & Son, 2007; Anand, Mishra, & Peiris, 2013). Meskipun banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, distribusi manfaat ini sering kali tidak merata, menyebabkan peningkatan ketimpangan ekonomi dan marginalisasi kelompok tertentu (Kakwani & Pernia, 2000). Hal ini memunculkan pertanyaan penting di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan mengenai bagaimana

pertumbuhan ekonomi bisa memberikan dampak yang lebih luas dan merata (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009; World Economic Forum, 2017).

Indikator pertumbuhan ekonomi konvensional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita selama ini digunakan secara luas sebagai ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara (Stiglitz et al., 2009; Todaro & Smith, 2020). Namun demikian, indikator-indikator tersebut memiliki keterbatasan signifikan dalam mencerminkan kualitas dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Salah satu kelemahan utama dari PDB adalah ketidakmampuannya merepresentasikan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. PDB hanya mengukur total output barang dan jasa, tanpa memberikan informasi mengenai siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut (Ali & Zhuang, 2007; Ranieri & Ramos, 2013). Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdasarkan PDB dapat terjadi secara bersamaan dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan antar kelompok sosial (Ali & Son, 2007; McKinley, 2010)

Sen (1999) menekankan bahwa penilaian terhadap kemajuan ekonomi seharusnya tidak hanya berfokus pada akumulasi pendapatan, tetapi pada perluasan kapabilitas individu untuk hidup secara bermakna. Perspektif ini mendukung penggunaan indikator alternatif seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menekankan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Kritik terhadap PDB juga dikemukakan oleh Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2009), yang menyatakan bahwa indikator tersebut mengabaikan distribusi pendapatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam karyanya yang lain, Stiglitz (2012) memperingatkan bahwa pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan memperdalam ketimpangan dan mengancam stabilitas sosial.

Sejumlah ekonom lainnya juga menyoroti hal serupa. Piketty (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai distribusi yang adil justru memperbesar ketimpangan. Rodrik (2011) menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang bersifat inklusif agar manfaat pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Atkinson (2015) dan Milanovic (2016) juga mengkritik PDB karena gagal merepresentasikan bagaimana manfaat ekonomi tersebar secara sosial dan geografis.

Selain aspek distribusi, PDB juga mengabaikan dimensi sosial lain yang krusial, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta pelayanan dasar lainnya. Sachs (2015), melalui laporan *World Happiness Report*, menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur hanya dari pendapatan nasional, karena indikator tersebut tidak mencerminkan kualitas hidup yang sebenarnya. Raworth (2017) juga mengkritik PDB karena tidak memperhitungkan batas-batas sosial dan ekologis dalam pembangunan. Ia memperkenalkan kerangka kerja “donat” yang menempatkan akses layanan dasar sebagai fondasi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Perspektif serupa diangkat oleh Dasgupta (2021) yang menyoroti bahwa PDB mengabaikan peran modal sosial dan manusia seperti pendidikan dan kesehatan yang merupakan fondasi kesejahteraan jangka panjang. Daly (1996) bahkan mengusulkan indikator alternatif seperti *Genuine Progress Indicator* (GPI) untuk memberikan pengukuran yang lebih holistik terhadap kesejahteraan ekonomi.

Kelemahan lain dari PDB adalah ketidakmampuannya menginternalisasi biaya lingkungan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Negara bisa mencatat pertumbuhan PDB yang tinggi meskipun terjadi deforestasi, pencemaran lingkungan, dan degradasi sumber daya alam. Padahal, dampak lingkungan tersebut sering kali paling dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin yang paling bergantung pada ekosistem lokal (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2010; Costanza, Hart, Posner, & Talberth, 2009).

Daly (1996) menegaskan bahwa PDB dapat merugikan ekosistem dan komunitas lokal yang sangat bergantung pada sumber daya alam, dan karenanya mendukung GPI sebagai indikator yang lebih inklusif. Dasgupta (2021) juga memperlihatkan bahwa pendekatan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan PDB telah berkontribusi terhadap krisis ekosistem global. Dalam konteks perubahan iklim, Stern (2006) menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang masif tidak tercermin dalam perhitungan PDB, meskipun menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Raworth (2017) kembali menekankan pentingnya mengintegrasikan batas ekologi dalam kerangka pembangunan ekonomi. Costanza (1997) bahkan menunjukkan bahwa PDB sama sekali tidak memperhitungkan nilai ekosistem dan jasa lingkungan yang mendukung kehidupan manusia. Sachs (2015)

menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya yang tidak terukur dalam PDB telah menimbulkan ketidakseimbangan ekologis yang serius. Jackson (2009) menambahkan bahwa pertumbuhan berbasis PDB cenderung mendorong konsumsi dan produksi berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Dengan beragam kritik dan keterbatasan tersebut, para ekonom dan lembaga internasional mulai mengembangkan dan mendorong penggunaan indikator alternatif yang lebih komprehensif dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah konsep pembangunan ekonomi inklusif, yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengejar peningkatan indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan (Ali & Son, 2007; Kakwani & Pernia, 2000).

Berdasarkan kajian literatur, para peneliti telah mengidentifikasi beberapa dimensi kunci untuk memahami pembangunan inklusif. Pertama adalah dimensi Ekonomi. Dimensi ekonomi dalam pembangunan ekonomi inklusif menekankan pentingnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan produktivitas ekonomi secara menyeluruh. Hal ini mencakup investasi dalam modal manusia, inovasi teknologi, dan pengembangan kapasitas produksi yang mampu memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruh masyarakat (Ali & Son, 2007). Di samping itu, dimensi ini juga secara eksplisit berfokus pada penciptaan lapangan kerja produktif yang dapat diakses secara luas, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Kakwani & Pernia, 2000).

Ranieri dan Ramos (2013) menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi inklusif harus memperluas kesempatan ekonomi agar seluruh individu, khususnya kelompok miskin, dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi, dengan akses dan partisipasi sebagai elemen utama. Klasen (2010) menekankan perlunya kebijakan pembangunan infrastruktur dan investasi di sektor produktif untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong stabilitas ekonomi. Habito (2009) mencatat bahwa di banyak negara Asia, pertumbuhan tinggi tidak selalu diikuti pengurangan kemiskinan, sehingga perlu memastikan pertumbuhan juga

meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah. Ravallion dan Chen (2003) mengusulkan konsep "pro-poor growth," yaitu pertumbuhan yang secara langsung menurunkan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki distribusi pendapatan, menegaskan bahwa pertumbuhan harus menjadi sarana pemerataan kesejahteraan, bukan hanya capaian makroekonomi.

Dimensi kedua Pembangunan ekonomi inklusif adalah dimensi sosial. Dimensi sosial dalam pembangunan ekonomi inklusif bertujuan untuk secara eksplisit mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, meningkatkan keadilan sosial, serta memberdayakan kelompok rentan agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dimensi ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai oleh kebijakan redistribusi pendapatan yang progresif, perluasan akses pendidikan berkualitas, peningkatan layanan kesehatan yang terjangkau, serta penciptaan peluang ekonomi yang adil bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan (Ali & Zhuang, 2007; Kanbur & Rauniar, 2010).

Ali dan Son (2007) memandang Pembangunan ekonomi inklusif sebagai proses yang menciptakan peluang ekonomi luas dan memberikan manfaat langsung bagi kelompok miskin, dengan penekanan pada pengurangan ketimpangan sebagai langkah menuju keadilan sosial. Ianchovichina dan Lundstrom (2009) menyoroti pentingnya redistribusi manfaat ekonomi, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, guna memastikan seluruh masyarakat merasakan hasil pembangunan. Kanbur dan Rauniar (2010) membedakan Pembangunan ekonomi inklusif sosial dari pertumbuhan agregat semata, dengan menekankan perlunya redistribusi pendapatan dan akses merata ke layanan publik. Bourguignon (2004) menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan dan ketimpangan adalah bagian integral dari Pembangunan ekonomi inklusif, yang menekankan pencapaian keadilan sosial dan kesetaraan peluang di samping peningkatan pendapatan agregat.

Kemudian dimensi ketiga adalah dimensi universal. Dimensi akses universal dalam pembangunan ekonomi inklusif menegaskan pentingnya menjamin ketersediaan dan akses yang setara bagi seluruh masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar, serta teknologi informasi dan komunikasi. Dimensi ini menekankan bahwa inklusivitas tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi atau pengurangan ketimpangan,

melainkan juga memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografisnya, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari layanan publik yang mendasar bagi peningkatan kualitas hidup dan produktivitas mereka (Ali & Zhuang, 2007; Sachs, 2015).

World Bank (2009) dan UNDP (2015) menyoroti bahwa akses universal terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kapabilitas masyarakat, yang merupakan inti dari Pembangunan ekonomi inklusif. Asian Development Bank (2010) menegaskan bahwa investasi dalam infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, dan listrik mendukung akses universal dan mendorong inklusivitas, terutama di negara berkembang. Sabharwal dan Malhotra (2013) menambahkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memperluas peluang ekonomi dan pendidikan, terutama di wilayah pedesaan. Dimensi ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat disebut inklusif jika semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan manfaatnya.

Dimensi ke empat Pembangunan ekonomi inklusif adalah dimensi keberlanjutan. Dimensi keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi inklusif menekankan perlunya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang, tanpa menyebabkan kerusakan terhadap sumber daya alam maupun keseimbangan lingkungan. Dimensi ini didasarkan pada prinsip bahwa pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan kapasitas lingkungan dalam menyediakan sumber daya sekaligus dalam menyerap limbah atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh generasi saat ini tidak mengorbankan kesejahteraan generasi masa depan (Sachs, 2015; Costanza et al., 2009).

Dalam analisis pembangunan ekonomi inklusif, kemungkinan terjadinya trade-off antar dimensi—yakni dimensi ekonomi, sosial, keberlanjutan, dan universalitas—sangat mungkin terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat sering kali dicapai melalui eksploitasi sumber daya alam dan ekspansi industri yang kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat menggerus modal

alam dan memperburuk ketimpangan antargenerasi, sebagaimana ditunjukkan oleh Arrow et al. (2012). Di sisi lain, kebijakan sosial seperti bantuan tunai atau subsidi dapat memperkuat dimensi inklusif secara sosial, tetapi jika tidak disertai peningkatan produktivitas, dapat menimbulkan ketergantungan dan mengurangi efisiensi ekonomi, seperti dicatat oleh Ravallion (2013). Sementara itu, prinsip universalitas dalam penyediaan layanan publik dapat bertabrakan dengan kebutuhan akan pendekatan yang kontekstual dan spesifik wilayah, terutama dalam konteks geografis dan ekonomi yang sangat beragam seperti di Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh Kanbur dan Rauniar (2010).

Meski demikian, *trade-off antar* dimensi tidak bersifat mutlak dan dapat diminimalkan melalui desain kebijakan yang integratif dan berbasis kebutuhan lokal. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pendidikan vokasional kontekstual, serta sistem perlindungan sosial yang disertai pemberdayaan ekonomi adalah contoh pendekatan yang mampu menciptakan sinergi antar dimensi. OECD (2018) menekankan pentingnya koherensi kebijakan lintas sektor agar pembangunan tidak berjalan secara parsial.

Penelitian terkait Pembangunan ekonomi inklusif terus berkembang ke arah model dan indikator Pembangunan ekonomi inklusif yang sesuai dengan kondisi pada suatu wilayah. McKinley dan ADB mengembangkan indeks komposit Pembangunan ekonomi inklusif di enam negara (Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Filipina, dan Uzbekistan) dengan indikator seperti produktivitas tenaga kerja, infrastruktur, kemiskinan, dan ketimpangan. Indeks ini dihitung dengan metode skoring dan dikategorikan menjadi tiga hasil: tidak memuaskan, memuaskan, dan sangat memuaskan (McKinley, 2010). Penelitian oleh UNDP dan Ramos dkk. di 43 negara berkembang menggunakan tiga indikator utama: kemiskinan, ketimpangan (rasio Gini), dan rasio tenaga kerja terhadap populasi (EPR). Indeks ini dinormalisasi dengan metode min-max dan mengukur inklusivitas tanpa memasukkan PDB sebagai indikator. Hasilnya bervariasi: beberapa negara menunjukkan hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali antara pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas (Ramos, 2013).

World Economic Forum mengembangkan *Inclusive Growth and Development Index (IDI)* sebagai alternatif pengukuran terhadap indikator ekonomi

konvensional seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). IDI bertujuan menilai sejauh mana manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, bukan hanya pada agregat ekonomi secara keseluruhan. Indeks ini diukur melalui tujuh pilar utama, yaitu: (1) pendidikan dan keterampilan, (2) infrastruktur dasar dan digital, (3) pekerjaan dan kesempatan kerja, (4) inklusi keuangan, (5) perlindungan sosial, (6) kualitas aset dan kepemilikan, serta (7) kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru. Pilar-pilar tersebut merefleksikan aspek multidimensi dari pertumbuhan inklusif yang mencakup pemerataan, keberlanjutan, dan kapasitas partisipasi masyarakat secara luas dalam aktivitas ekonomi (World Economic Forum, 2017; Samans, Blanke, Corrigan, & Drzeniek, 2017).

Di Indonesia, BAPPENAS menggunakan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai alat untuk mengukur inklusivitas pembangunan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (Bappenas, 2008). Sihombing (2022) mendefinisikan IPEI sebagai alat untuk mengukur dan memantau tingkat inklusivitas pembangunan di Indonesia. Indeks ini mengukur aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, serta akses dan kesempatan bagi masyarakat. Aisyah Safitri (2024) menambahkan bahwa IPEI merupakan tolok ukur penting yang menilai bagaimana pembangunan di Indonesia dapat memberikan akses dan peluang yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Maryam dan Irwan (2022) juga menyatakan bahwa semakin tinggi nilai IPEI, semakin tinggi pula kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena mereka memperoleh akses yang lebih luas terhadap manfaat pertumbuhan ekonomi.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) menggunakan pendekatan multidimensi yang mencakup tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; serta perluasan akses dan kesempatan, untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Bappenas, 2018; Ali & Zhuang, 2007). Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan dengan analisis tradisional berbasis PDB atau indikator tunggal lainnya. Dengan memasukkan aspek sosial, ekonomi, dan pemerataan secara terpadu, pendekatan multidimensi tersebut lebih mencerminkan realitas kompleks

pembangunan ekonomi yang terjadi di masyarakat (Anand, Mishra, & Peiris, 2013; Kanbur & Rauniyar, 2010).

Penelitian oleh Anand et al. (2013) menegaskan pentingnya pendekatan multidimensi untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan, karena indikator tunggal sering kali gagal menangkap keragaman dan kompleksitas yang ada dalam masyarakat. Dengan mengintegrasikan ketiga pilar ini, IPEI tidak hanya menilai hasil ekonomi, tetapi juga menempatkan manusia dan kesejahteraan sosial sebagai fokus utama pembangunan.

Keunggulan IPEI terletak pada kemampuannya untuk diterapkan hingga tingkat lokal, seperti provinsi dan kabupaten/kota. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai karakteristik wilayahnya (Bappenas, 2018; Mawardi, Widiati, & Taufiq, 2022). Dengan demikian, penerapan IPEI di tingkat lokal menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mengevaluasi kemajuan pembangunan yang tidak hanya terfokus pada indikator agregat nasional, tetapi juga memperhatikan dinamika lokal secara lebih detail (Kuncoro, 2004; Siagian et al., 2019). Sebagai contoh, penelitian oleh Mawardi et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, nilai IPEI-nya tetap rendah karena ketimpangan dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar masih menjadi masalah utama.

Dalam praktiknya, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) memiliki beberapa keterbatasan dalam mengontekstualisasi kondisi spesifik setiap wilayah. Salah satu isu utama adalah pendekatan IPEI yang cenderung fokus pada agregat nasional atau regional, yang hanya memberikan gambaran umum tentang tingkat inklusivitas pembangunan tanpa secara detail memperhitungkan dinamika dan karakteristik unik di setiap wilayah (Kanbur & Rauniyar, 2010; Rauniyar & Kanbur, 2010). Misalnya, dua wilayah dengan skor IPEI yang sama dapat memiliki kondisi pembangunan yang sangat berbeda: wilayah pertama bisa saja memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun distribusi manfaat yang tidak merata, sementara wilayah kedua memiliki pertumbuhan ekonomi rendah tetapi dengan

distribusi manfaat yang relatif adil. Pendekatan agregat ini berisiko mengaburkan perbedaan esensial antarwilayah, yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan pembangunan kurang relevan dengan kebutuhan lokal (Ravallion & Chen, 2003; Anand et al., 2013). Oleh karena itu, pengukuran inklusivitas seharusnya lebih sensitif terhadap konteks lokal, agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan spesifik di masing-masing daerah.

Keterbatasan lain dari Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) adalah kurangnya analisis terhadap ketimpangan antarwilayah. Meskipun IPEI telah mencakup indikator internal seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar, instrumen ini masih belum dirancang secara khusus untuk mengidentifikasi ketimpangan regional dalam konteks pembangunan yang lebih luas (Ravallion & Chen, 2003; Kanbur & Venables, 2005). Sebuah wilayah yang memiliki skor IPEI tinggi bisa saja berada di tengah kawasan yang memiliki ketimpangan regional yang signifikan, suatu kondisi yang berpotensi menghambat stabilitas dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Ravallion dan Chen (2003) secara khusus menegaskan bahwa ketimpangan antarwilayah merupakan tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif secara nasional, karena ketimpangan tersebut dapat menciptakan hambatan struktural yang sulit diatasi jika tidak diidentifikasi dan diatasi secara eksplisit. Tanpa mempertimbangkan posisi relatif antarwilayah, IPEI kehilangan peluang untuk mengevaluasi dan merespons implikasi ketimpangan regional terhadap inklusivitas pembangunan secara keseluruhan (Kanbur & Rauniyar, 2010; Anand et al., 2013).

Selain itu, indikator-indikator yang digunakan oleh Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sering kali bersifat umum, seperti angka kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapatan, serta akses terhadap layanan publik dasar, tanpa mempertimbangkan secara memadai konteks lokal yang spesifik. Kondisi geografis seperti wilayah pesisir, pedalaman, atau kepulauan, serta aspek sosial dan budaya lokal, memiliki dampak signifikan terhadap struktur ekonomi dan partisipasi ekonomi masyarakat (Kanbur & Rauniyar, 2010; Sachs, 2015). Setiap wilayah yang memiliki dominasi ekonomi pada sektor tertentu seperti pertanian, manufaktur, atau jasa memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan membutuhkan indikator

pembangunan yang disesuaikan dengan kekhususan tersebut. Analisis pembangunan yang terlalu generik berisiko mengabaikan perbedaan lokal yang krusial, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang efektif dalam mengatasi tantangan pembangunan spesifik di daerah tersebut (Kanbur & Venables, 2005). Dasgupta (1993) secara eksplisit menegaskan bahwa indikator pembangunan harus mempertimbangkan karakteristik lokal agar relevan dan efektif untuk perancangan kebijakan pembangunan yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan unik dari masing-masing wilayah

Oleh karena itu, penting untuk melengkapi IPEI dengan pendekatan yang lebih kontekstual, dinamis, dan berorientasi lokal untuk meningkatkan relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung Pembangunan ekonomi inklusif. Salah satunya dengan melakukan pemetaan karakteristik wilayah. Pemetaan karakteristik wilayah dapat dilakukan dengan Tipologi Klassen. Pemetaan berdasarkan tipologi Klassen memungkinkan identifikasi daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berbeda-beda, sehingga membantu dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pemetaan wilayah menggunakan tipologi Klassen sangat membantu dalam analisis Pembangunan ekonomi inklusif karena metode ini mengklasifikasikan wilayah berdasarkan kinerja ekonomi relatif, seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Tipologi ini mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi khusus, seperti wilayah yang tumbuh cepat tetapi masih menghadapi ketimpangan. Penelitian sebelumnya, seperti oleh Artobolevskii dan Takhumova (2018), menunjukkan bahwa tipologi Klassen membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi wilayah yang pertumbuhannya tidak inklusif, sehingga dapat dirancang kebijakan yang lebih adil dan fokus pada kelompok marginal. Selain itu, penelitian oleh Kuncoro (2004) menyoroti bahwa wilayah tertinggal sering kali memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik dasar. Tipologi ini juga menunjukkan perbedaan kualitas pertumbuhan antar wilayah, bahkan di daerah yang maju sekalipun, seperti ditunjukkan oleh Siagian et al. (2019). Penggunaan tipologi Klassen juga relevan untuk memahami disparitas regional di Indonesia, di mana wilayah-wilayah di luar Jawa sering tertinggal. Pemetaan dengan tipologi Klassen memberikan pandangan

yang lebih mendalam mengenai kebutuhan kebijakan yang mendukung Pembangunan ekonomi inklusif di berbagai wilayah.

Berdasarkan uraian di atas maka pada disertasi ini akan dilakukan pengembangan konsep IPEI dari Bappenas dengan mengklasifikasi karakteristik daerah.

1.2 Isu Konseptual

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), yang dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi di berbagai tingkatan administratif, baik nasional maupun lokal. Indeks ini secara khusus mengevaluasi aspek-aspek penting dalam pembangunan inklusif, seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan kemiskinan, serta memperluas pemahaman mengenai pentingnya distribusi kesempatan ekonomi dan akses layanan dasar yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Bappenas, 2018; Mawardi, Widiati, & Taufiq, 2022).

Menurut Sihombing (2022), IPEI dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pembangunan ekonomi dalam mencapai inklusivitas. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Safitri (2024) menganggap IPEI sebagai alat ukur yang krusial, yang tidak hanya mengevaluasi hasil ekonomi namun juga menilai seberapa jauh pembangunan tersebut dapat diakses oleh semua segmen masyarakat. Pendekatan ini dipertegas oleh Maryam dan Irwan (2022), yang mengaitkan peningkatan nilai IPEI dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi, dimana masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

IPEI memfokuskan pada tiga dimensi utama yang dianggap sebagai pilar pembangunan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan (Taufiq, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali dianggap sebagai syarat mendasar bagi tercapainya pembangunan yang inklusif. Todaro dan Smith (2015) menekankan bahwa tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,

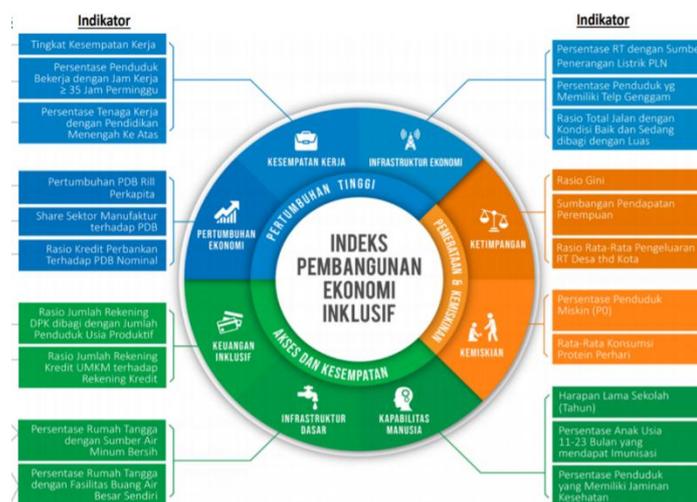
peningkatan kualitas hidup serta pengurangan kemiskinan secara signifikan akan sulit dicapai. Sejalan dengan itu, sejumlah penelitian lain seperti Ravallion (2024), Bourguignon (2003), dan Dollar dan Kraay (2002) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung proses pemerataan pendapatan secara lebih luas.

Di sisi lain, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan menjadi inti dari pendekatan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Dollar dan Kraay (2002) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada umumnya menguntungkan kelompok miskin, dan bahwa pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada peningkatan pendapatan kelompok tersebut. Ravallion (2004) lebih lanjut mengembangkan gagasan *pro-poor growth*, yakni strategi pertumbuhan yang secara eksplisit diarahkan untuk memberi manfaat kepada kelompok miskin, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara efektif. Konsep *shared growth* yang dikemukakan oleh Bourguignon (2003) juga memperkuat pentingnya distribusi hasil pertumbuhan yang lebih adil agar manfaatnya dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain pertumbuhan dan pemerataan, perluasan akses dan kesempatan menjadi dimensi penting dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif. Konsep *broad-based growth* menekankan perlunya menyediakan akses merata terhadap sumber daya ekonomi agar semua kelompok sosial dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan. Todaro dan Smith (2015) menggarisbawahi bahwa akses yang setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas adalah kunci dalam memperkuat partisipasi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Barro (1991) juga menunjukkan bahwa peningkatan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, perluasan akses terhadap layanan dasar ini tidak hanya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi inklusif, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam pembangunan jangka panjang.

Peningkatan nilai IPEI menjadi indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan berhasil dalam menciptakan akses yang lebih luas dan kesempatan yang lebih merata, menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa IPEI tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai panduan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia, kendatipun masih memiliki beberapa kelemahan.

Variabel – variabel yang digunakan untuk menganalisis pembangunan inklusif pun bervariasi. Dalam konteks Indeks Pembangunan Inklusif (IPEI) Variabel tersebut dapat diuraikan berdasarkan pilar utama pembentuknya. Pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan infrastruktur ekonomi merupakan representasi pilar/dimensi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Variabel ketimpangan dan kemiskinan representasi dari pilar/dimensi pemerataan dan kemiskinan. Kemudian variabel keuangan inklusif, infrastruktur dasar serta kapabilitas manusia representasi pilar/dimensi akses dan kesempatan. Variabel-variabel tersebut tergambar pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Sumber : Bappenas.inklusif.go.id

Variabel pertama yang dianalisis karena pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi sering kali dianggap sebagai motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2020). Namun demikian, dampaknya terhadap pembangunan ekonomi inklusif—yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang merata dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat—sangat bergantung pada berbagai faktor seperti konteks sosial, kebijakan yang diterapkan pemerintah, serta struktur ekonomi suatu negara (Ali & Son, 2007; Ravallion, 2004). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menciptakan inklusivitas tanpa adanya kebijakan redistribusi yang efektif, strategi pengurangan ketimpangan, serta penguatan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi kelompok miskin dan marginal (Bourguignon, 2003; Dollar & Kraay, 2002).

Pertumbuhan ekonomi berpotensi mendorong pembangunan inklusif dengan meningkatkan pendapatan nasional dan memungkinkan investasi pada sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Bourguignon, 2003). Pertumbuhan juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat, mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas. Namun, hubungan antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan tidak selalu berlangsung secara otomatis. Piketty (2014) memperingatkan bahwa tanpa kebijakan redistribusi yang memadai, pertumbuhan justru memperbesar ketimpangan, terutama di negara yang bergantung pada akumulasi kapital. Hal ini sejalan dengan temuan World Bank (2016) yang menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati sektor formal, sedangkan kelompok rentan masih menghadapi hambatan akses ekonomi. Kanbur dan Rauniyar (2010) menekankan bahwa pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan aset berisiko menimbulkan eksklusi sosial. Karena itu, kebijakan publik perlu mendorong redistribusi dan pemberdayaan kelompok marginal agar pertumbuhan menjadi inklusif.

Selain itu, pertumbuhan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan juga dapat memperlemah inklusivitas. Dasgupta (2001) menyatakan bahwa kerusakan lingkungan dapat menimbulkan kemiskinan struktural, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada ekosistem lokal seperti petani dan nelayan. Stiglitz (2012) menyarankan agar kebijakan redistributif juga mencakup akses

universal terhadap layanan dasar, investasi daerah tertinggal, dan perlindungan sosial untuk mendukung struktur pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

Salah satu variabel kunci lain dalam pembangunan inklusif adalah tingkat kesempatan kerja. Ali dan Son (2007) menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi inklusif sangat bergantung pada ketersediaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan yang merata. Akses terhadap pekerjaan tidak hanya meningkatkan konsumsi dan investasi domestik, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi. Hal ini didukung oleh Ayyagari, Demirgüç-Kunt, dan Maksimovic (2014) yang menemukan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan pekerjaan bagi kelompok rentan. Tolmacheva (2020) menambahkan bahwa migrasi juga turut mendorong dinamika pasar tenaga kerja di Eropa.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu diiringi peningkatan kesempatan kerja. Leshoro (2013) mencatat adanya fenomena “pertumbuhan tanpa pekerjaan” di mana PDB meningkat tanpa penyerapan tenaga kerja yang berarti. Di Malaysia, Jajri dan Ismail (2010) menemukan bahwa produktivitas lebih dipengaruhi oleh modal fisik dibanding kualitas tenaga kerja. Sementara di Tiongkok, Bai, Hsieh, dan Qian (2012) memperkirakan bahwa peningkatan tenaga kerja sebesar 10% hanya meningkatkan GDP per kapita sebesar 4%.

Dalam konteks Indonesia, Astari dan Setiawina (2016) menekankan pentingnya efisiensi tenaga kerja dalam meningkatkan pendapatan petani, sedangkan Suryahadi, Suryadarma, dan Sumarto (2019) menunjukkan bahwa kombinasi program perlindungan sosial dan penciptaan pekerjaan memiliki dampak nyata dalam menurunkan ketimpangan dan mendorong pembangunan inklusif di tingkat lokal.

McMillan dan Rodrik (2011) menekankan pentingnya pergeseran tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah seperti pertanian ke sektor berproduktivitas tinggi seperti manufaktur. Laporan World Bank (2013), serta studi lainnya (Soleh & Suwarni, 2021; Fields, 2012; Lopez & Robertson, 2012; Usman & Juliyani, 2018), juga menyatakan bahwa penciptaan lapangan kerja inklusif adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Dengan demikian, kebijakan penciptaan lapangan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan

produktivitas nasional, tetapi juga berperan penting dalam pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi inklusif juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi. Investasi dalam pembangunan sarana infrastruktur diketahui memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi suatu negara maupun wilayah (Todaro & Smith, 2020). Infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan listrik, irigasi pertanian, fasilitas air bersih, serta sanitasi, yang secara kolektif disebut sebagai *social overhead capital*, memiliki hubungan kuat dengan perkembangan wilayah yang dicirikan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (World Bank, 2009; Calderón & Servén, 2014). Dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, akses masyarakat terhadap pasar, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta berbagai peluang ekonomi akan meningkat secara signifikan. Kondisi ini pada akhirnya akan membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan ketimpangan antarwilayah secara efektif, sehingga mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Ali & Pernia, 2003; Kanbur & Rauniyar, 2010).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi memainkan peran penting dalam mendukung Pembangunan ekonomi inklusif. Calderón dan Servén (2004) menemukan bahwa kualitas infrastruktur yang lebih baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan. Ali dan Zhuang (2007) menekankan pentingnya investasi infrastruktur di wilayah pedesaan untuk memperluas akses terhadap layanan dasar dan membuka peluang ekonomi.

Estache dan Wodon (2014) menunjukkan bahwa reformasi infrastruktur yang berorientasi inklusif dapat mempercepat pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Di Afrika Selatan, Perkins, Fedderke, dan Luiz (2005) mencatat bahwa investasi pada sektor transportasi dan energi dapat memperluas akses ekonomi dan mendukung Pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian di Asia oleh Straub dan Terada-Hagiwara (2011) juga menyimpulkan bahwa pengembangan infrastruktur berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan inklusivitas.

Lebih lanjut, Seneviratne dan Sun (2013) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur di negara-negara ASEAN membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Chatterjee dan Turnovsky (2012) menunjukkan bahwa investasi infrastruktur yang dilakukan secara merata berdampak positif terhadap penurunan ketimpangan dan peningkatan Pembangunan ekonomi inklusif. Temuan serupa dikemukakan oleh Jerome (2011), Gajigo dan Lukoma (2011), Lanchovichina, Lundström, dan Rodriguez (2013), serta Ali dan Yao (2004), yang secara umum menyimpulkan bahwa infrastruktur yang inklusif menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kemiskinan merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi pembangunan ekonomi inklusif. Secara konseptual, kemiskinan telah didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Soekanto (1987) menekankan aspek ketidakberdayaan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup sesuai standar kelompok sosialnya. Amartya Sen (1999) memandang kemiskinan sebagai keterbatasan kapabilitas, yakni ketidakmampuan untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. UNDP (2022) memperluas definisi ini ke dalam dimensi multidimensi, mencakup kekurangan akses terhadap layanan publik, standar hidup layak, dan partisipasi sosial.

Kemiskinan secara langsung memengaruhi inklusivitas pembangunan melalui terbatasnya akses individu miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya keterampilan, produktivitas, serta kapasitas ekonomi individu miskin, yang selanjutnya membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi produktif (Sen, 1999; Ravallion, 2004). Penelitian oleh Demirgüç-Kunt et al. (2017) menegaskan bahwa keterbatasan akses ini memperbesar kesenjangan sosial dan memperlambat proses inklusi ekonomi.

Kemiskinan yang bersifat kronis juga secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan, yang pada gilirannya dapat menghambat distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata (Ravallion, 2004; Bourguignon, 2003). Kondisi kemiskinan kronis ini menciptakan hambatan struktural bagi kelompok miskin dalam mengakses sumber daya produktif, layanan

dasar, serta kesempatan ekonomi yang lebih luas, sehingga memperlebar jarak antara kelompok miskin dan kaya dalam masyarakat (Ali & Son, 2007; Todaro & Smith, 2020). Ketimpangan pendapatan yang meningkat tidak hanya menghambat pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperlambat laju penurunan angka kemiskinan dan membatasi tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Dollar & Kraay, 2002; Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2010).

Dalam perspektif makroekonomi, kemiskinan berdampak negatif dengan menurunkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya melemahkan permintaan domestik dan mempersempit potensi terciptanya pembangunan ekonomi inklusif yang manfaatnya tersebar secara merata. Fadillah (2021) menunjukkan bahwa rendahnya daya beli secara langsung menghambat ekspansi kegiatan ekonomi yang inklusif karena membatasi permintaan domestik terhadap barang dan jasa yang diproduksi. Lebih lanjut, tingginya tingkat kemiskinan juga menyebabkan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan formal, yang berperan penting dalam mengelola risiko ekonomi, meningkatkan tabungan, dan memanfaatkan peluang investasi produktif (Demirgüç-Kunt et al., 2017; Beck et al., 2007).

Kemiskinan menciptakan dampak struktural yang signifikan terhadap pembangunan inklusif, baik melalui hambatan langsung terhadap partisipasi ekonomi individu miskin maupun melalui peningkatan ketimpangan dan eksklusi sosial yang lebih luas (Ali & Son, 2007; Ravallion, 2004). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan inklusi keuangan formal menjadi strategi fundamental untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan dalam jangka panjang (Sen, 1999; Todaro & Smith, 2020).

Inklusi keuangan merupakan variabel penting yang secara signifikan mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Dengan memperluas akses masyarakat—terutama kelompok miskin dan marjinal—terhadap layanan keuangan formal, inklusi keuangan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan partisipasi ekonomi secara luas (Demirgüç-Kunt et al., 2017; Sarma & Pais, 2011).

Melalui sistem keuangan yang inklusif dan terbuka, individu dan pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk menabung, memperoleh kredit produktif, serta melakukan investasi jangka panjang, yang selanjutnya dapat meningkatkan kapasitas ekonomi individu maupun komunitas (Beck, Demirgüç-Kunt, & Levine, 2007). Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, stabil, dan berkelanjutan (Ali & Zhuang, 2007; Todaro & Smith, 2020).

Berbagai penelitian mendukung pentingnya peran inklusi keuangan dalam menciptakan Pembangunan ekonomi inklusif. Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine (2007) menunjukkan bahwa perluasan akses ke layanan keuangan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Temuan ini diperkuat oleh Demirgüç-Kunt, Klapper, dan Singer (2017) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan yang lebih adil. Dalam konteks sistem keuangan formal, Neaime dan Gaysset (2018) menyoroti pentingnya peningkatan jumlah lembaga keuangan sebagai sarana memperluas akses kredit dan tabungan bagi kelompok miskin. Sarma dan Pais (2011) juga mencatat bahwa negara-negara dengan inklusi keuangan yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Studi empiris di India oleh Tiwari dan Shahbaz (2012) menemukan bahwa kebijakan keuangan yang inklusif mampu mengurangi ketimpangan wilayah antara pedesaan dan perkotaan. Sementara itu, analisis kawasan Asia oleh Park dan Mercado (2015) menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan berkorelasi dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan pertumbuhan yang menyeluruh.

Penelitian lainnya juga memperkuat korelasi positif antara inklusi keuangan dan inklusivitas pembangunan. Studi oleh Omar dan Inaba (2020), Mushtaq dan Bruneau (2019), Churchill dan Marisetty (2020), serta Allen et al. (2016) secara konsisten menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal menjadi katalis utama bagi pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan di berbagai negara.

Infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Fasilitas ini meningkatkan akses terhadap layanan dasar, mendorong partisipasi ekonomi, dan mengurangi

ketimpangan sosial. WHO dan UNICEF (2019) menyebut bahwa keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi menjadi penyebab utama penyakit yang dapat dicegah di negara berkembang, yang memperburuk kerentanan kelompok miskin.

Investasi di sektor ini memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya kesehatan (Hutton & Haller, 2004). Akses air bersih juga berdampak positif terhadap kesetaraan gender, karena mengurangi beban perempuan dalam pengambilan air dan membuka peluang partisipasi dalam pendidikan dan pekerjaan produktif (UN Women, 2017). Sanitasi yang memadai turut melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan (Prüss-Ustün et al., 2008). United Nations melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menempatkan air bersih dan sanitasi sebagai prioritas pembangunan inklusif. Hal ini diperkuat oleh temuan Asian Development Bank (2010) yang menunjukkan bahwa investasi di sektor ini mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang

Modal manusia merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Konsep ini mencakup kualitas tidak berwujud seperti pendidikan, pelatihan, kesehatan, serta keterampilan dan nilai-nilai kerja yang mendukung produktivitas. Pendidikan, sebagai salah satu komponen utama modal manusia, memainkan peran penting dalam penyebaran dan pengelolaan teknologi, dan negara tanpa modal manusia yang memadai akan kesulitan mengelola aset fisik secara efektif (Nelson & Phelps, 1966; Benhabib & Spiegel, 2005).

Berbagai penelitian menunjukkan hubungan kuat antara modal manusia dan Pembangunan ekonomi inklusif. Oyinyela dan Adediji (2017) menekankan pentingnya partisipasi sekolah dan produktivitas dalam menciptakan Pembangunan ekonomi inklusif di Afrika Sub-Sahara. Kwabena Gyimah-Brempong et al. (2006) juga mencatat kontribusi pendidikan tinggi terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita di kawasan tersebut. Meski tingkat partisipasi sekolah meningkat, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan utama, sebagaimana dicatat oleh Oluwatosin Adeniyi et al. (2020). Di Pakistan, Jalil dan Idrees (2012) menemukan bahwa pendidikan di semua tingkatan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan di Nepal, Nowak dan Dahal (2016) menunjukkan bahwa pendidikan menengah dan tinggi secara signifikan berkontribusi terhadap PDB nasional.

Penelitian di tingkat negara juga menunjukkan hasil serupa. Lin (2002) menemukan bahwa pendidikan memiliki peran lebih penting daripada kemajuan teknologi dalam mendorong pertumbuhan di Taiwan. Di Indonesia, peran modal manusia dalam mendorong Pembangunan ekonomi inklusif diperkuat oleh temuan Prabandari (2018) serta Susilo dan Wicesa (2021), yang menunjukkan bahwa pendidikan dan produktivitas tenaga kerja membantu mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Modal manusia bersama dengan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, infrastruktur ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, keuangan inklusif, dan infrastruktur dasar, merupakan faktor pendorong utama Pembangunan ekonomi inklusif. Variabel-variabel ini mendukung partisipasi ekonomi yang lebih luas, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kemudian dalam disertasi ini akan dilakukan analisa Pembangunan ekonomi inklusif pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang sebelumnya telah dipetakan menggunakan tipologi klassen. Pemetaan wilayah menggunakan tipologi Klassen sangat berguna dalam analisis Pembangunan ekonomi inklusif karena dapat mengklasifikasikan wilayah-wilayah berdasarkan kinerja pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita relatif. Tipologi ini membagi wilayah ke dalam empat kategori: wilayah maju dan tumbuh cepat, wilayah maju tetapi tertekan, wilayah berkembang cepat, dan wilayah tertinggal. Klasifikasi ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mengidentifikasi wilayah yang meskipun mengalami pertumbuhan, mungkin menghadapi ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi.

Berbagai penelitian menegaskan pentingnya penggunaan tipologi Klassen dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan regional. Artobolevskii dan Takhumova (2018) menemukan bahwa beberapa wilayah meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, distribusi manfaatnya tidak merata, menyebabkan kelompok berpenghasilan rendah tetap terpinggirkan. Tipologi Klassen digunakan untuk mengidentifikasi wilayah "maju tetapi tertekan"—wilayah yang tumbuh namun tidak inklusif—yang memerlukan

kebijakan redistributif untuk memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

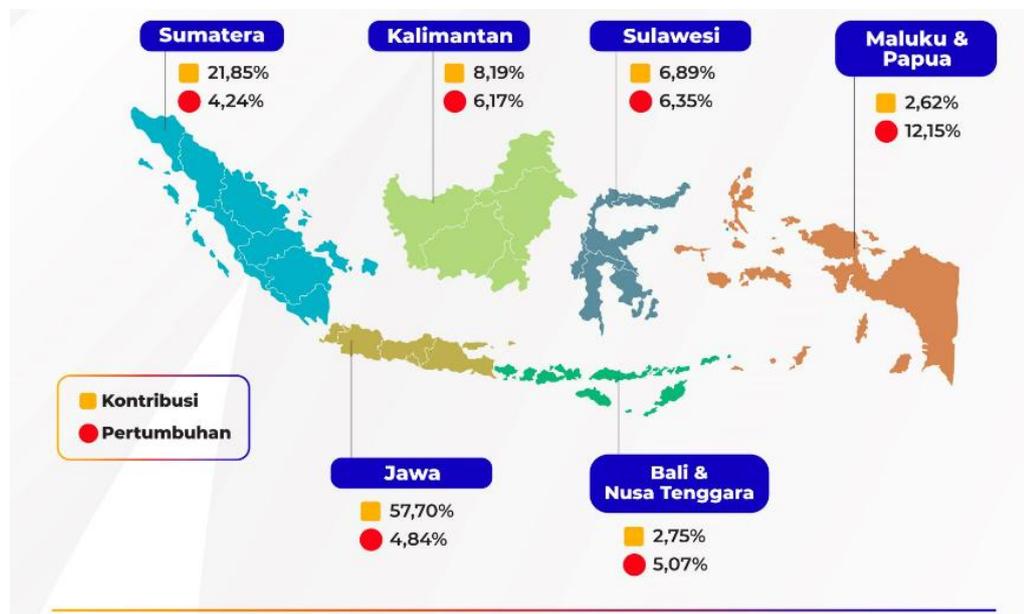
Kuncoro (2004) menambahkan bahwa pemetaan wilayah melalui tipologi Klassen berguna dalam mengidentifikasi daerah tertinggal yang membutuhkan investasi signifikan, khususnya pada infrastruktur dan pelayanan publik, guna mengatasi hambatan struktural. Dalam konteks ini, strategi Pembangunan ekonomi inklusif harus mencakup intervensi terhadap daerah tertinggal untuk mencegah peningkatan ketimpangan. Siagian et al. (2019) juga menegaskan bahwa wilayah yang tergolong "maju dan tumbuh cepat" belum tentu memiliki distribusi pertumbuhan yang merata. Tipologi Klassen memberi panduan penting bagi pembuat kebijakan agar tidak hanya melihat pertumbuhan agregat, tetapi juga siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut—inti dari pendekatan Pembangunan ekonomi inklusif. Fujita et al. (2001) menggarisbawahi relevansi tipologi Klassen dalam memahami dinamika pembangunan regional, terutama dalam konteks negara berkembang yang mengalami pertumbuhan tidak merata. Mereka menekankan pentingnya investasi pada infrastruktur konektivitas antarwilayah untuk mengurangi disparitas pembangunan. Temuan ini didukung oleh Budiyanto et al. (2018), yang menunjukkan kesenjangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, di mana wilayah Jawa lebih unggul dalam infrastruktur, pendidikan, dan industrialisasi.

Rodríguez-Pose (2018) menyatakan bahwa disparitas regional yang berkelanjutan dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan ancaman terhadap stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, tipologi Klassen menjadi alat penting untuk mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam rangka mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Martin dan Sunley (1998) melengkapi temuan-temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah sering berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi. Wilayah tertinggal kesulitan bersaing dengan wilayah maju karena kekurangan modal produktif dan inovasi. Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan memerlukan peningkatan akses ke sumber daya produktif, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasional.

Secara keseluruhan, penggunaan tipologi Klassen dalam analisis Pembangunan ekonomi inklusif membantu dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi kebijakan redistributif maupun intervensi pembangunan yang lebih mendalam. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pola-pola pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antarwilayah, pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mendorong Pembangunan ekonomi inklusif di seluruh wilayah, memastikan bahwa tidak ada kelompok atau wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan.

1.3 Isu Kontekstual

Disertasi ini akan mengkaji perkembangan kondisi perekonomian yang terjadi pada wilayah Kabupaten/Kota pada provinsi di Jawa. Pemilihan Pulau Jawa sebagai wilayah kajian di lakukan mengingat kedua pulau tersebut merupakan pusat ekonomi Indonesia serta berdasarkan analisa pada berbagai data indikator perekonomian menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di wilayah Jawa tidak inklusif.



Gambar 2. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Pulau 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik (Triwulan 1, 2024)

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat jelas bahwa Pulau Jawa dan Sumatera memiliki peran yang sangat signifikan dalam struktur perekonomian Indonesia. Kedua pulau ini, secara bersama-sama, menyumbang lebih dari 79% terhadap

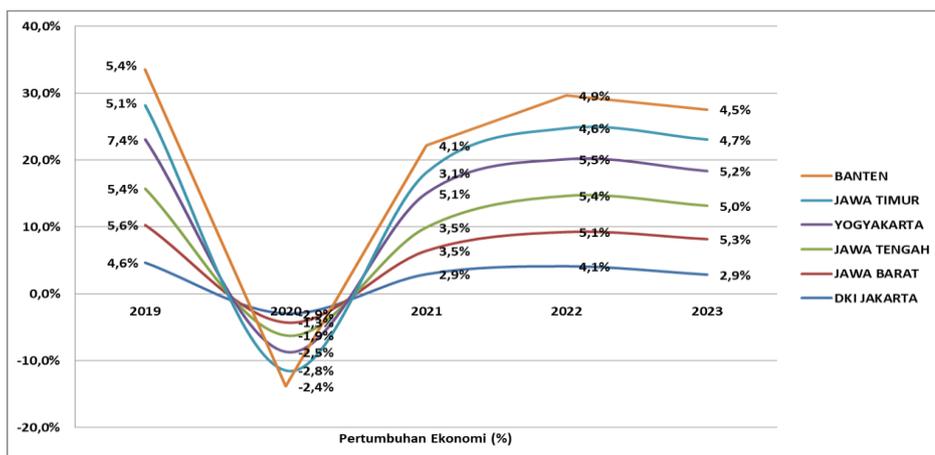
Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar.

Pulau Jawa berkontribusi sebesar 57,70% terhadap PDB nasional, menjadikannya sebagai pusat ekonomi utama Indonesia. Kontribusi ini didorong oleh dominasi sektor industri, perdagangan, serta jasa yang berkembang pesat di pulau ini. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang paling maju di Indonesia, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara internasional, dan pusat logistik, semakin memperkuat peran Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional (Produk Domestik Bruto Indonesia, Triwulan I 2024). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa yang mencapai 4,84% mengindikasikan stabilitas ekonomi yang baik. Meskipun angka pertumbuhannya tidak setinggi beberapa wilayah lainnya, hal ini menunjukkan tingkat keamanan ekonomi Jawa. Pertumbuhan yang relatif stabil ini juga mencerminkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masih terpusat di wilayah Jawa, di mana populasi yang tinggi dan urbanisasi memengaruhi struktur pertumbuhan tersebut.

Hingga saat ini pulau Jawa memang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan investasi, serta menjadi lokasi dari mayoritas industri manufaktur dan jasa. Namun, dominasi Jawa dalam perekonomian nasional juga menimbulkan tantangan terkait distribusi kesejahteraan dan ketergantungan yang tinggi terhadap wilayah ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengembangan ekonomi yang lebih merata ke wilayah di luar Jawa guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan berkontribusi lebih besar. Kendala-kendala tersebut menunjukkan kemungkinan terjadinya pertumbuhan yang tidak inklusif di wilayah Jawa. Hal tersebut dapat di amati pada kondisi kondisi beberapa indikator perekonomian yang diuraikan sebagai berikut. Grafik berikut ini akan gambaran umum pergerakan pertumbuhan ekonomi di Jawa

Gambar 3 menunjukkan Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa menunjukkan karakteristik pemulihan bertahap setelah kontraksi akibat pandemi pada 2020. Yogyakarta konsisten mencatat pertumbuhan tertinggi, sementara DKI Jakarta mengalami pemulihan lebih lambat. Jawa Barat dan Jawa Tengah menunjukkan pemulihan yang stabil dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, sedangkan Jawa Timur dan Banten mengalami tren moderat. Secara umum, provinsi dengan ekonomi lebih kuat sebelum pandemi cenderung pulih lebih cepat.

Pertumbuhan ekonomi di enam provinsi di Pulau Jawa menunjukkan pola yang serupa sepanjang 2019-2023, dengan penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi COVID-19, diikuti dengan pemulihan bertahap. Yogyakarta mencatat pertumbuhan tertinggi pada 2019 (7,4%), tetapi juga mengalami kontraksi yang cukup dalam pada 2020 (-2,5%). DKI Jakarta mengalami penurunan terbesar pada 2020 (-2,9%) dan pemulihannya relatif lebih lambat dibandingkan provinsi lain, dengan pertumbuhan hanya mencapai 2,9% pada 2023. Jawa Barat dan Jawa Tengah menunjukkan pemulihan yang stabil, dengan pertumbuhan masing-masing 5,3% dan 5,0% pada 2023. Sementara itu, Jawa Timur dan Banten mengalami tren pemulihan yang serupa, meskipun pertumbuhan mereka cenderung lebih moderat. Secara keseluruhan, provinsi dengan basis ekonomi yang lebih kuat sebelum pandemi cenderung mengalami pemulihan yang lebih cepat, dengan Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mencatat pertumbuhan tertinggi pada 2023.



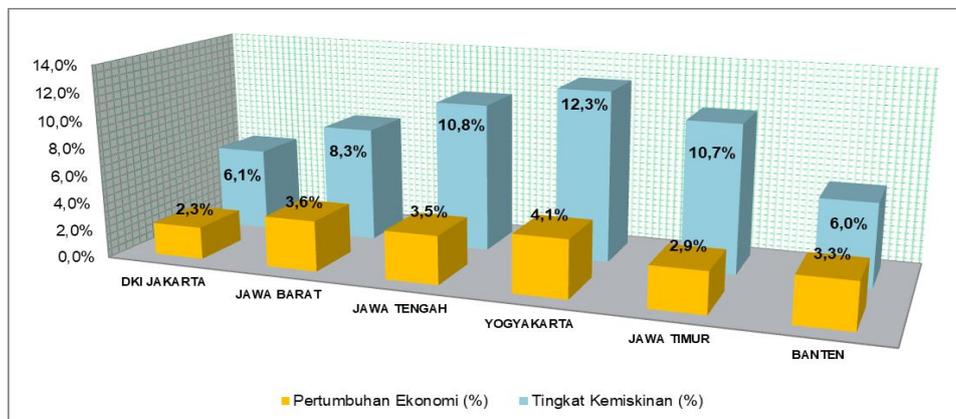
Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 2023

Provinsi di Jawa diuntungkan oleh infrastruktur yang lebih baik dan konektivitas yang mendukung efisiensi ekonomi. Jakarta dan Yogyakarta mengalami pemulihan yang lebih cepat berkat sektor teknologi dan pendidikan, sementara provinsi yang bergantung pada ekspor komoditas, seperti Riau, lebih terdampak parah. Diversifikasi ekonomi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas. Provinsi dengan ekonomi yang terdiferensiasi, seperti DI Yogyakarta, Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan seringkali dianggap sebagai sarana efektif untuk mengurangi kemiskinan. Ketika ekonomi suatu negara tumbuh,

umumnya terjadi peningkatan jumlah pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi, yang secara langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut ini adalah gambaran kondisi tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pada provinsi – provinsi di pulau Jawa.

Gambar 4 Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa bervariasi, dengan Yogyakarta memiliki angka tertinggi (12,3%), diikuti oleh Jawa Tengah (10,8%) dan Jawa Timur (10,7%). Sementara itu, DKI Jakarta (6,1%) dan Banten (6,0%) mencatat tingkat kemiskinan terendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan pusat ekonomi besar cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah yang masih bergantung pada sektor tradisional.



Gambar 4. Tingkat Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi-Provinsi Jawa Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 2019 - 2023

Gambar ini juga menunjukkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di beberapa provinsi. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa menunjukkan variasi dalam pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Yogyakarta memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi (4,1%) tetapi juga tingkat kemiskinan tertinggi (12,3%), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi ini belum sepenuhnya inklusif atau terdistribusi secara merata. Jawa Tengah (3,5%) dan Jawa Timur (2,9%) juga mencatat tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, masing-masing 10,8% dan 10,7%, yang mencerminkan tantangan dalam pemerataan hasil pembangunan. DKI Jakarta memiliki pertumbuhan ekonomi terendah (2,3%) tetapi tingkat kemiskinan yang cukup rendah (6,1%), menunjukkan peran dominan sektor jasa dan ekonomi perkotaan dalam mengurangi kemiskinan. Sementara itu, Banten memiliki tingkat kemiskinan

terendah (6,0%) dengan pertumbuhan ekonomi moderat (3,3%), yang mengindikasikan stabilitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan provinsi lain. Jawa Barat, dengan pertumbuhan ekonomi 3,6% dan kemiskinan 8,3%, berada dalam posisi menengah dalam hal pengurangan kemiskinan. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan, terutama jika distribusi pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi tidak merata.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif sering kali menjadi penyebab utama mengapa tingkat kemiskinan tetap tinggi di banyak provinsi, meskipun terdapat peningkatan ekonomi. Salah satu faktor yang mendasari hal ini adalah distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Di berbagai wilayah, pertumbuhan sering kali didorong oleh sektor-sektor yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas, sementara kelompok masyarakat miskin tidak mendapatkan manfaat yang proporsional. Contoh yang relevan dapat ditemukan di Provinsi DI Yogyakarta, di mana pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Sektor-sektor dominan seperti pariwisata dan pendidikan sering kali melibatkan pekerja informal yang menerima upah rendah atau pekerjaan yang tidak permanen. Hal ini menjelaskan mengapa, meskipun pertumbuhannya baik, angka kemiskinan di provinsi ini tetap tinggi, yaitu sekitar 11,97%.

Selain itu, akses terbatas terhadap layanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, memperparah ketidakmampuan kelompok miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, provinsi-provinsi dengan angka kemiskinan yang tinggi sering kali masih menghadapi keterbatasan dalam menyediakan layanan sosial yang berkualitas. Di Jawa Timur, meskipun pertumbuhan ekonomi cukup stabil pada 3,84%, tingkat kemiskinan tetap berada pada 10,80%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pedesaan masih mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang baik, yang pada akhirnya membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan keluar dari kemiskinan.

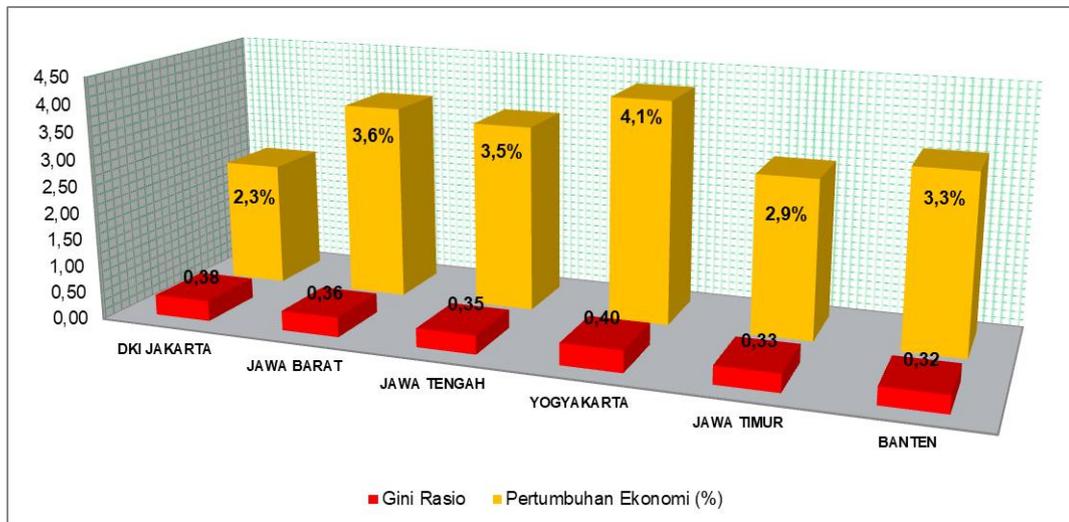
Selain itu, gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi akan "mengalir ke bawah" atau *trickle-down effect* sering kali tidak terbukti efektif. Kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi belum mampu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut sampai kepada kelompok masyarakat miskin. Provinsi Jawa Tengah, meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, masih menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, sekitar 10%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum berhasil menjangkau kelompok masyarakat miskin secara signifikan.

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar terhadap struktur perekonomian di banyak provinsi. Beberapa provinsi seperti DI Yogyakarta yang sangat bergantung pada pariwisata, dan Riau yang bergantung pada ekspor minyak dan gas, sangat terdampak oleh penurunan aktivitas ekonomi global. Meskipun beberapa sektor masih mampu bertahan, masyarakat yang bekerja di sektor informal paling terdampak, sehingga angka kemiskinan meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi tetap positif. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di banyak provinsi di Indonesia belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan karena berbagai faktor. Ketimpangan pendapatan, keterbatasan akses terhadap layanan sosial, dan ketergantungan pada sektor-sektor tertentu menghambat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan PDB, tetapi juga mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 5 di bawah ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat ketimpangan di provinsi-provinsi di Jawa pada periode 2019–2023 bervariasi. Secara keseluruhan, angka Gini Rasio di provinsi-provinsi di Pulau Jawa menunjukkan variasi dalam tingkat ketimpangan ekonomi.

Yogyakarta memiliki ketimpangan tertinggi dengan Gini Rasio 0,40, diikuti oleh DKI Jakarta (0,38) dan Jawa Barat (0,36), yang mencerminkan adanya kesenjangan pendapatan yang lebih besar di daerah perkotaan dan pusat ekonomi utama. Sementara itu, Jawa Tengah (0,35), Jawa Timur (0,33), dan Banten (0,32) memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah, menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Secara umum, wilayah dengan sektor jasa dan

urbanisasi tinggi cenderung memiliki ketimpangan lebih besar dibandingkan wilayah dengan perekonomian berbasis industri dan pertanian.



Gambar 5. Keadaan ketimpangan (rasio gini) dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 2019 – 2023

Selain itu, Gambar 5 Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan Gini Rasio di berbagai provinsi mencerminkan tingkat kesenjangan ekonomi yang bervariasi. Yogyakarta mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 4,1% tetapi memiliki Gini Rasio tertinggi (0,40), yang menunjukkan bahwa meskipun ekonomi tumbuh pesat, distribusi pendapatan di wilayah ini masih timpang. DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi nasional, memiliki Gini Rasio 0,38 dengan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah (2,3%), yang mengindikasikan bahwa meskipun ketimpangan relatif tinggi, pertumbuhan ekonomi di ibu kota lebih lambat dibandingkan provinsi lainnya. Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir serupa (3,6% dan 3,5%) dengan Gini Rasio masing-masing 0,36 dan 0,35, yang menunjukkan keseimbangan relatif antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Sementara itu, Jawa Timur dan Banten memiliki Gini Rasio terendah (0,33 dan 0,32) dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing 2,9% dan 3,3%, menandakan bahwa wilayah ini cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan provinsi lain. Secara keseluruhan, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tidak selalu linear, karena daerah dengan pertumbuhan tinggi seperti Yogyakarta justru mengalami ketimpangan lebih besar, sementara provinsi dengan

pertumbuhan lebih moderat seperti Jawa Timur dan Banten memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor yang memengaruhi distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi didorong oleh sektor-sektor tertentu yang tidak sepenuhnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Misalnya, sektor jasa modern, industri teknologi, dan keuangan cenderung menghasilkan nilai tambah yang tinggi, tetapi kontribusinya pada penciptaan lapangan kerja sering kali terbatas. Sektor-sektor ini cenderung memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang memiliki akses pada pendidikan tinggi dan keterampilan khusus, yang umumnya merupakan kelompok menengah ke atas. Sementara itu, masyarakat yang bekerja di sektor informal atau sektor dengan upah rendah, seperti pertanian dan perdagangan kecil, tidak menikmati manfaat yang proporsional dari pertumbuhan tersebut.

Di provinsi seperti DI Yogyakarta dan DKI Jakarta, perbedaan akses terhadap pendidikan dan keterampilan berperan besar dalam memperparah ketimpangan. Akses terhadap pendidikan berkualitas, yang lebih mudah dijangkau oleh kelompok berpendapatan menengah ke atas, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal dengan gaji yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang kurang terdidik atau tidak memiliki keterampilan khusus sulit untuk keluar dari sektor informal atau pekerjaan dengan pendapatan rendah, yang menyebabkan jurang pendapatan semakin lebar. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis mengurangi kemiskinan atau ketimpangan karena kelompok masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi mendapat keuntungan lebih besar dari ekspansi ekonomi dibandingkan kelompok rentan.

Ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh urbanisasi yang pesat, terutama di provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Urbanisasi sering kali memperbesar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan, pendapatan cenderung lebih tinggi karena adanya

akses yang lebih baik ke infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan layanan sosial. Namun, masyarakat yang pindah ke kota dari wilayah pedesaan sering kali tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing dalam perekonomian perkotaan. Akibatnya, mereka terjebak dalam pekerjaan sektor informal dengan pendapatan yang rendah, sementara masyarakat yang sudah mapan di perkotaan dapat terus meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketimpangan antara pendapatan di sektor formal dan informal inilah yang memperburuk distribusi ekonomi di daerah perkotaan, meskipun provinsi-provinsi tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Selain itu, tingginya ketergantungan pada sektor informal di banyak provinsi juga menjadi penyebab utama ketimpangan. Sektor informal umumnya tidak menawarkan jaminan sosial atau upah layak, sehingga pekerja di sektor ini sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka meskipun perekonomian tumbuh. Sebaliknya, kelompok pekerja di sektor formal, yang biasanya terdiri dari kelas menengah, dapat menikmati stabilitas pendapatan dan akses yang lebih baik ke layanan sosial, yang memperlebar kesenjangan ekonomi antara kedua kelompok ini.

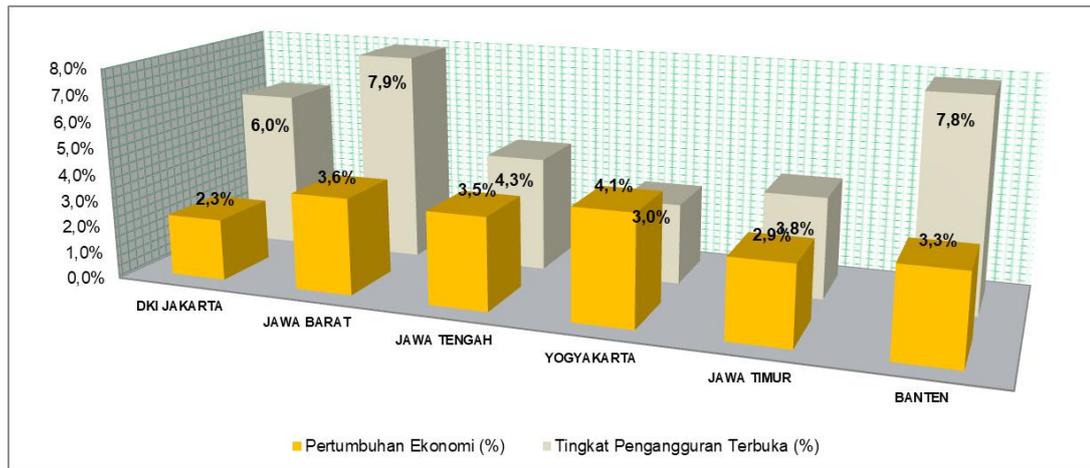
Kenaikan harga properti dan biaya hidup di wilayah perkotaan juga memainkan peran dalam memperburuk ketimpangan. Di provinsi-provinsi dengan urbanisasi tinggi seperti DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten, lonjakan harga properti menguntungkan kelompok kaya yang memiliki aset, sementara masyarakat berpenghasilan rendah semakin tertekan oleh biaya hidup yang terus meningkat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk mengakses aset produktif seperti tanah dan properti justru memperdalam ketimpangan.

Faktor lain yang turut memperburuk ketimpangan adalah kebijakan redistribusi yang kurang efektif. Meskipun beberapa provinsi memiliki program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan, kebijakan-kebijakan tersebut sering kali tidak cukup kuat untuk menyeimbangkan disparitas pendapatan yang sudah besar. Di banyak kasus, program-program redistribusi seperti subsidi atau bantuan langsung tunai hanya memiliki dampak jangka pendek, sementara ketimpangan

struktural yang disebabkan oleh perbedaan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan tetap bertahan.

Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan tetap menjadi masalah yang signifikan di provinsi-provinsi Jawa. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, di mana manfaat dari pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, telah menciptakan kondisi di mana kesenjangan pendapatan semakin melebar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang lebih fokus pada redistribusi manfaat ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor informal agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi secara lebih adil.

Gambar 6 mengilustrasikan tingkat pengangguran Tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa menunjukkan variasi yang signifikan meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi. Yogyakarta memiliki tingkat pengangguran terendah (3,0%) dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi (4,1%), yang menunjukkan efektivitas penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, Jawa Barat dan Banten memiliki tingkat pengangguran tertinggi (7,9% dan 7,8%) meskipun pertumbuhan ekonominya relatif baik (3,6% dan 3,3%), mengindikasikan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja. DKI Jakarta juga mengalami pengangguran cukup tinggi (6,0%) dengan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah (2,3%), mencerminkan dampak sektor jasa dan urbanisasi terhadap pasar kerja. Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi (3,5% dan 2,9%) dan tingkat pengangguran yang relatif rendah (4,3% dan 3,8%). Secara keseluruhan, terdapat indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran, bergantung pada struktur ekonomi dan sektor dominan di tiap provinsi.



Gambar 6. Keadaan Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa– 2023

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut belum bersifat inklusif, di mana manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak menyebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja. Beberapa faktor dapat menjelaskan fenomena ini. Salah satunya adalah struktur ekonomi yang cenderung berfokus pada sektor-sektor yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, seperti sektor industri berteknologi tinggi dan jasa keuangan. Sektor-sektor ini meskipun mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang rendah. Hal ini berarti pertumbuhan yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut tidak memerlukan tambahan tenaga kerja dalam jumlah besar karena proses produksi di sektor ini lebih bergantung pada teknologi dan otomatisasi.

Sebagai contoh, Banten yang merupakan salah satu pusat industri manufaktur di Indonesia, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, industri manufaktur di wilayah ini, terutama di sektor elektronik dan otomotif, semakin bergantung pada otomatisasi dan teknologi yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Hal ini berdampak pada rendahnya penciptaan lapangan kerja baru, meskipun pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Dampak dari perkembangan sektor yang tidak padat karya ini terlihat dari tingginya tingkat pengangguran di provinsi tersebut.

Selain itu, urbanisasi yang cepat juga berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja formal. Provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat mengalami laju urbanisasi yang sangat pesat, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja di wilayah perkotaan. Migrasi dari daerah pedesaan ke kota-kota besar untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik semakin memperbesar tekanan terhadap pasar tenaga kerja. Namun, laju urbanisasi ini tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal yang memadai, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh industri-industri modern di kota-kota besar. Sebagai akibatnya, banyak pendatang baru yang masuk ke sektor informal atau mengalami pengangguran karena tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan permintaan pasar tenaga kerja perkotaan.

Lebih lanjut, ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan kebutuhan industri atau dikenal dengan istilah mismatch juga menjadi salah satu penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di wilayah-wilayah yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi. Banyak provinsi di Jawa mengalami perkembangan di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terampil, seperti industri teknologi dan jasa modern. Namun, pendidikan dan pelatihan di wilayah tersebut mungkin belum cukup untuk menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Ketidaksesuaian ini menyebabkan banyak lulusan baru tidak dapat langsung terserap oleh pasar kerja, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Situasi ini dapat dilihat di Jawa Barat dan Banten, yang memiliki banyak industri, namun tingkat pengangguran tetap tinggi karena keterampilan yang dibutuhkan oleh industri-industri tersebut tidak dimiliki oleh sebagian besar tenaga kerja yang tersedia.

Sektor informal yang masih mendominasi di banyak provinsi di Jawa dan Sumatera juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran. Sektor informal, seperti perdagangan kecil, jasa non-formal, dan sektor pertanian di wilayah pedesaan, menyerap sebagian besar tenaga kerja, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Namun, jenis pekerjaan di sektor informal sering kali tidak stabil, bersifat musiman, dan tidak menawarkan

upah yang layak atau jaminan sosial yang memadai. Hal ini mengakibatkan banyak pekerja tetap berada dalam kondisi rentan meskipun mereka bekerja, dan dalam banyak kasus, mereka kehilangan pekerjaan ketika sektor informal menghadapi tekanan ekonomi atau perubahan kebijakan. Ketergantungan pada sektor informal ini memperburuk kondisi tenaga kerja di provinsi-provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, karena sektor informal tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang stabil dan layak dalam jangka panjang.

Faktor lain yang memengaruhi tingginya tingkat pengangguran meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi adalah terpusatnya pertumbuhan pada sektor-sektor tertentu yang tidak menyebar ke seluruh wilayah atau kelompok masyarakat. Di DKI Jakarta dan Banten, misalnya, sektor jasa keuangan dan industri menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, namun kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja terbatas. Sektor-sektor ini cenderung melibatkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil, sementara banyak pekerja di sektor lain, seperti konstruksi, perdagangan kecil, atau sektor pertanian, tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan tersebut. Akibatnya, ketimpangan dalam penciptaan lapangan kerja menjadi semakin nyata, dengan sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor informal atau menghadapi pengangguran.

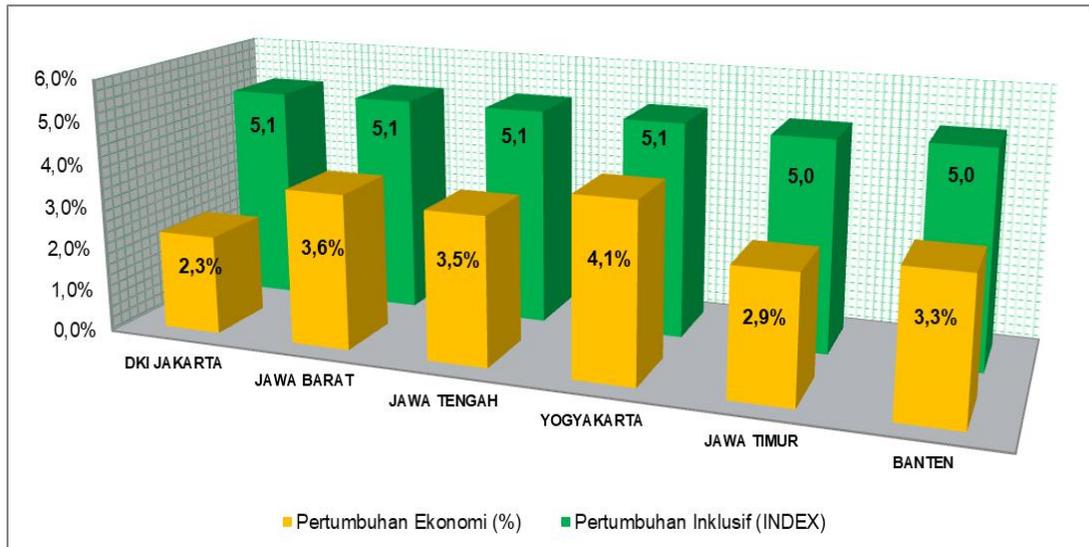
Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang paling terdampak oleh pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi, seperti pariwisata, transportasi, dan sektor jasa informal. Banyak pekerja di sektor ini kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan jam kerja selama pandemi, yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun perekonomian mulai pulih, proses pemulihan penyerapan tenaga kerja berjalan lebih lambat, sehingga angka pengangguran tetap tinggi di beberapa provinsi yang terdampak berat oleh pandemi.

Secara keseluruhan, kondisi di atas mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, di mana pertumbuhan yang tinggi tidak diiringi dengan peningkatan lapangan kerja yang memadai. Fenomena ini menunjukkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi konvensional, seperti peningkatan PDB, tidak cukup untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Diperlukan kebijakan yang lebih fokus pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, dan perluasan akses ke pekerjaan formal yang layak, agar manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi konvensional berfokus pada peningkatan output tanpa memperhatikan distribusi kesejahteraan atau kesenjangan sosial. Sebaliknya, Pembangunan ekonomi inklusif memastikan bahwa hasil pertumbuhan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan terpinggirkan, serta berupaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial (Besley, 2007). Seperti yang diuraikan oleh Krysovatty (2023), Pembangunan ekonomi inklusif harus mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, serta pengelolaan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Gambar 7 di bawah ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam pertumbuhan ekonomi antarprovinsi, indeks Pembangunan ekonomi inklusif cenderung stabil di kisaran 5,0 hingga 5,1. Yogyakarta mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 4,1% dengan indeks inklusif 5,1, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya relatif merata dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi yang hampir setara, masing-masing 3,6% dan 3,5%, dengan indeks inklusif yang sama, yaitu 5,1, yang mengindikasikan distribusi ekonomi yang cukup baik. Sementara itu, Banten dengan pertumbuhan ekonomi 3,3% dan Jawa Timur dengan 2,9% memiliki indeks inklusif sedikit lebih rendah di angka 5,0, yang dapat mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi yang lebih besar dibandingkan provinsi lainnya. DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi terendah, yakni 2,3%, tetapi tetap memiliki indeks inklusif 5,1, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang mengurangi ketimpangan di ibu kota. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan tingkat inklusivitas yang lebih baik, sehingga diperlukan kebijakan yang memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi tersebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 7. Perbandingan Rata – rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPEI pada Provinsi di Jawa Tahun 2019 – 2023

Sumber: Bappenas, Statistik Provinsi Jawa, 2022

Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan ekonomi inklusif di berbagai provinsi menunjukkan bahwa peningkatan PDB tidak selalu diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) menilai bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga sejauh mana pertumbuhan itu berdampak pada pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

DKI Jakarta mencatat IPEI tertinggi meskipun pertumbuhannya sedang, karena manfaat pertumbuhan tersebar lebih merata melalui sektor formal, akses layanan publik, dan infrastruktur yang baik. Keunggulan sektor jasa seperti keuangan, pendidikan, dan teknologi mendukung penciptaan pekerjaan yang inklusif. Sebaliknya, DI Yogyakarta yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi justru mencatat nilai inklusivitas lebih rendah, disebabkan oleh tingginya ketimpangan dan dominasi sektor informal yang membuat sebagian besar masyarakat tidak merasakan manfaat pertumbuhan secara proporsional.

Contoh lain adalah Provinsi Banten, yang meskipun ekonominya tumbuh cukup tinggi, mencatat IPEI terendah. Pertumbuhan Banten didorong oleh sektor industri manufaktur yang padat modal namun minim penciptaan lapangan kerja. Ketimpangan pendapatan dan tingginya proporsi tenaga kerja informal turut menurunkan inklusivitas pembangunan di wilayah ini.

Kesimpulannya, perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan ekonomi inklusif terjadi karena pertumbuhan ekonomi konvensional, yang sering diukur melalui PDB, tidak selalu mencerminkan bagaimana manfaat tersebut didistribusikan di masyarakat. Provinsi dengan IPEI yang lebih tinggi cenderung memiliki kebijakan redistribusi yang lebih baik, akses yang lebih merata terhadap layanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal yang lebih efektif, terlepas dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi mereka. Di sisi lain, provinsi yang pertumbuhannya terpusat pada sektor-sektor yang tidak menyerap banyak tenaga kerja atau yang memiliki ketimpangan tinggi mungkin mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal memberikan manfaat yang merata, sehingga memiliki nilai inklusivitas yang rendah.

1.4 Isu Metodologi

Disertasi ini akan menguraikan Pembangunan ekonomi inklusif dengan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh BAPPENAS, yakni Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai indikator utama. Analisis Pembangunan ekonomi inklusif akan dilakukan pada daerah yang telah dipetakan sebelumnya menggunakan tipologi klassen.

Tipologi Klassen mengklasifikasikan daerah berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang sering digunakan untuk menganalisis perbedaan kinerja ekonomi antarwilayah secara relatif (Kuncoro, 2004; Sjafrizal, 2018). Dalam penelitian Kuncoro (2004), tipologi ini diterapkan untuk mengelompokkan daerah ke dalam empat kategori utama, yaitu daerah maju, berkembang cepat, terbelakang, atau stagnan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi berbasis tipologi Klassen efektif dalam membantu pemerintah untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih spesifik dan tepat sasaran bagi masing-masing kategori wilayah, terutama untuk mengatasi ketimpangan regional yang sering kali kurang diperhatikan dalam pendekatan pembangunan makroekonomi yang bersifat umum (Sjafrizal, 2018; Artobolevskii & Takhumova, 2018). Dengan demikian, tipologi Klassen memberikan panduan penting bagi pengambilan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan secara regional (Siagian et al., 2019).

Berdasarkan penelitian oleh Ranieri & Ramos (2013) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menciptakan nilai tambah secara agregat, tetapi juga memperbaiki indikator kesejahteraan sosial di seluruh wilayah. Mereka menekankan bahwa tanpa Pembangunan ekonomi inklusif, kesenjangan antarwilayah dan antarindividu akan semakin melebar, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang. Ini sejalan dengan temuan Pouw & Gupta (2017) yang menunjukkan bahwa daerah-daerah yang tertinggal cenderung terjebak dalam lingkaran setan ketidakmampuan untuk mengakses peluang ekonomi, yang pada gilirannya memperparah ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, analisis Pembangunan ekonomi inklusif yang dikombinasikan dengan tipologi Klassen memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang tertinggal. Penelitian-penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan inklusif dalam pembangunan wilayah, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat ditekan dan pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di latar belakang, serta tinjauan mengenai isu kontekstual, konseptual, dan metodologi, disertasi ini akan berfokus pada pemodelan pembangunan inklusif dengan karakteristik wilayah pada Kabupaten/Kota di Jawa. Beberapa variabel seperti Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Infrastruktur Ekonomi, Ketimpangan, Kemiskinan, Keuangan Inklusif, Infrastruktur Dasar dan Modal Manusia akan dianalisis untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Analisis ini akan mengembangkan konsep IPEI (Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif) yang dikembangkan oleh Bappenas, yang mencakup tiga dimensi utama: 1) Inklusivitas Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi (PIPP), 2) Inklusivitas Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan (PIPK), dan 3) Inklusivitas Akses serta Kesempatan (PIAK). Penelitian ini akan melibatkan 119 (seratus Sembilan belas) Kabupaten/Kota pada seluruh provinsi yang ada di Jawa, dengan tujuan untuk memahami pengaruh variabel-variabel tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif pada berbagai karakteristik wilayah.

1.5 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Modal Manusia, Keuangan Inklusif, Kesempatan Kerja, Ketimpangan, Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Dasar terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif pada berbagai karakteristik wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa?
2. Apa kebijakan dan program yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif pada berbagai karakteristik wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa?

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab tujuan berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Modal Manusia, Keuangan Inklusif, Kesempatan Kerja, Ketimpangan, Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Dasar terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif pada berbagai karakteristik wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
2. Untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif pada berbagai karakteristik wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.

1.7 Keaslian dan Kebaruan Penelitian

Disertasi ini mengembangkan konsep Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), yang pada penelitian sebelumnya hanya menjelaskan hubungan antar variabel secara agregat tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik antar wilayah secara jelas. Dalam penelitian ini, pengembangan konsep IPEI dilakukan berdasarkan perspektif ekonomi regional, yang secara teoritis menegaskan bahwa pembangunan ekonomi inklusif dipengaruhi oleh karakteristik spesifik tiap wilayah. Variabel-variabel kunci seperti Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Modal Manusia, Ketimpangan, Kemiskinan, Keuangan Inklusif,

Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Dasar dikaji secara khusus, dengan mempertimbangkan tipologi atau klasifikasi wilayah yang lebih detail. Secara teoretis, pendekatan ini memperkuat konsep pembangunan inklusif dengan menekankan pentingnya perbedaan kondisi awal, struktur ekonomi, dan kapasitas institusional di setiap wilayah yang menjadi faktor penentu utama keberhasilan pembangunan ekonomi inklusif.

1.8 Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi teori dan metodologis : penelitian tentang pembangunan ekonomi inklusif diperlukan karena pendekatan pembangunan konvensional yang berfokus semata pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) telah terbukti tidak cukup efektif untuk menjamin kesejahteraan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat mengatasi masalah ketimpangan, kemiskinan, dan keterbatasan akses masyarakat pada peluang ekonomi secara berkelanjutan. Konsep pembangunan inklusif muncul sebagai paradigma alternatif yang menempatkan pemerataan dan keberlanjutan sebagai tujuan penting di samping pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Dari perspektif pembangunan regional, perbedaan karakteristik wilayah seperti struktur ekonomi lokal, kualitas infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan merupakan aspek kritis yang memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan inklusif. Dengan demikian, penelitian mengenai pembangunan ekonomi inklusif secara teoritis penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pencapaian inklusivitas, serta memberikan dasar ilmiah bagi formulasi kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

2. Kontribusi empiris : penelitian pembangunan ekonomi inklusif di Pulau Jawa adalah menyediakan pemetaan karakteristik wilayah terpadat di Indonesia yang menunjukkan pola pembangunan serta disparitas regional secara lebih jelas. Penelitian ini mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor spesifik

seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, modal manusia, ketimpangan, kemiskinan, keuangan inklusif, dan infrastruktur yang dominan mempengaruhi inklusivitas pembangunan di tingkat regional Jawa. Hasil empiris tersebut memberikan dasar kuat dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah serta membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan strategi pembangunan berbasis data, khususnya dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran

3. Kontribusi kebijakan: temuan penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih adil, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pendapatan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa secara lebih komprehensif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif telah menjadi paradigma dominan dalam wacana pembangunan kontemporer. Paradigma ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari seberapa cepat output nasional meningkat, tetapi juga sejauh mana manfaat dari pertumbuhan tersebut terdistribusi secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan terpinggirkan (Todaro & Smith, 2015). Pendekatan ini lahir dari kritik terhadap model pertumbuhan konvensional yang terlalu fokus pada agregat makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa memperhatikan kualitas distribusinya.

Kritik tersebut diperkuat oleh temuan empiris bahwa pertumbuhan tinggi sering kali tidak diikuti oleh pengurangan kemiskinan atau ketimpangan. Sebaliknya, pertumbuhan yang tidak inklusif justru dapat memperdalam kesenjangan ekonomi, meminggirkan kelompok lemah, dan menciptakan ketidakstabilan sosial (Stiglitz, 2012; Piketty, 2014). Oleh karena itu, pendekatan inklusif menuntut pertumbuhan yang disertai perluasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, pekerjaan produktif, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Konsep pembangunan inklusif juga menggabungkan dimensi pertumbuhan, pemerataan, dan partisipasi, serta sangat selaras dengan pendekatan kapabilitas manusia yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999). Dalam pendekatan ini, pembangunan dianggap berhasil bila mampu memperluas kebebasan substantif individu, termasuk kebebasan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selain menjadi wacana ilmiah, pembangunan ekonomi inklusif juga menjadi bagian penting dari agenda kebijakan global, sebagaimana tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs),

terutama Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan) (UNDP, 2015). Dengan demikian, secara teoretis maupun praktis, pembangunan ekonomi inklusif memberikan kerangka normatif dan operasional yang kuat dalam merancang strategi pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan

A. Grand Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif

Teori pembangunan ekonomi inklusif berfokus pada prinsip bahwa pembangunan ekonomi harus menghasilkan pertumbuhan yang merata, partisipatif, dan berkelanjutan. Tujuan utama pembangunan inklusif adalah memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok marjinal, dengan menciptakan kesempatan kerja produktif, menurunkan ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Ali & Son, 2007; Anand et al., 2013).

Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer memberikan fondasi teoritis yang relevan dan kuat. Lucas (1988) menempatkan modal manusia (*human capital*) sebagai pendorong internal utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Lucas, investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menciptakan pertumbuhan berkelanjutan yang berasal dari kemampuan internal sistem ekonomi itu sendiri. Sementara Romer (1986, 1990) menambahkan bahwa inovasi teknologi dan pengetahuan merupakan faktor internal (endogen) yang terus mendorong pertumbuhan. Romer menekankan pentingnya investasi pemerintah dalam penelitian, pengembangan, serta difusi teknologi yang menghasilkan eksternalitas positif secara luas. Dengan inovasi yang terus-menerus berlangsung, pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan menghasilkan manfaat yang tersebar secara luas dalam masyarakat.

Kaitan utama antara kedua teori ini terletak pada peran sentral modal manusia dan inovasi sebagai alat mencapai tujuan pembangunan inklusif. Dalam pembangunan ekonomi inklusif, modal manusia berupa pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan menjadi fondasi kunci agar setiap individu memiliki kesempatan berpartisipasi aktif dalam perekonomian, sehingga mengurangi kesenjangan sosial-

ekonomi. Begitu pula, inovasi teknologi yang didorong oleh investasi dalam pengetahuan dapat menciptakan lapangan kerja produktif, meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses ekonomi yang merata ke berbagai lapisan masyarakat (Romer, 1990; Lucas, 1988).

Dengan demikian, integrasi teori pertumbuhan endogen Lucas dan Romer dalam pembangunan ekonomi inklusif menunjukkan bahwa investasi dalam modal manusia dan inovasi bukan hanya menciptakan pertumbuhan yang tinggi tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, merata, dan berkelanjutan. Hal ini memberikan dasar kuat bagi kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi inklusivitas, di mana penguatan kapasitas sumber daya manusia dan dorongan terhadap inovasi menjadi inti dari strategi pembangunan yang efektif.

B. Pengukuran Indikator Pembangunan Ekonomi Inklusif.

1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi suatu negara sudah tergolong inklusif atau tidak inklusif dapat diketahui dari besaran Indeks. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan (Bappenas, 2019). Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif atau disebut dengan indeks Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Inklusive Growth Index = IGI) merupakan angka yang menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh suatu negara maupun wilayah provinsi maupun kabupaten/kota yang ada dalam negara tersebut.

Besaran yang dihasilkan oleh Inklusive Growth Index (IGI) dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aktivitas pembangunan yang telah dilaksanakan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri

dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

- a) Pilar I yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi, terdiri dari 3 sub pilar yaitu:
 - 1) Pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari 3 indikator;
 - 2) Kesempatan kerja yang terdiri dari 3 indikator dan
 - 3) Infrastruktur ekonomi yang terdiri dari 3 indikator.
- b) Pilar II yaitu Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan yang terdiri dari 2 sub pilar yaitu:
 - 1) Ketimpangan terdiri dari 3 indikator;
 - 2) Kemiskinan yang terdiri dari 2 indikator;
- c) Pilar III yaitu Perluasan Akses dan Kesempatan yang terdiri dari 3 sub pilar yaitu:
 - 1) Kapabilitas manusia terdiri dari 3 indikator;
 - 2) Infrastruktur dasar terdiri dari 2 indikator; dan
 - 3) Keuangan inklusif terdiri dari 2 indikator.

Kriteria Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Inklusif adalah:

- 1) Jika besarnya indeks yang dicapai 1 – 3 masuk katagori “tidak memuaskan.
- 2) Jika besarnya indeks yang dicapai 4 – 7 masuk katagori “memuaskan”
- 3) Jika besarnya indeks yang dicapai 8 – 10 masuk katagori “sangat memuaskan”

2. Indeks Komposit Perekonomian Inklusif

Metode pengukuran indeks komposit pertumbuhan inklusif yang dikembangkan oleh McKinley (2010) dan Asian Development Bank (ADB) dirancang untuk menangkap dimensi pertumbuhan ekonomi yang lebih luas daripada sekadar kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB). Indeks ini dikembangkan dengan mengintegrasikan berbagai indikator yang mencerminkan distribusi manfaat pertumbuhan, peluang ekonomi yang setara, serta keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi.

Secara khusus, pendekatan McKinley dan ADB mengukur indeks pertumbuhan inklusif melalui tiga pilar utama, yaitu:

1. Pilar Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth)

Pilar ini menggunakan indikator yang merefleksikan kinerja ekonomi makro, seperti tingkat pertumbuhan PDB per kapita dan kestabilan ekonomi secara umum. Pilar ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang stabil sebagai syarat mendasar dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif (McKinley, 2010).

2. Pilar Kesempatan Ekonomi dan Pemerataan (Equity and Opportunity)

Pilar kedua mencakup indikator-indikator yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta kesempatan kerja yang setara. Indikator yang digunakan umumnya adalah tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan (misalnya indeks Gini), tingkat pengangguran, akses pendidikan, dan partisipasi pasar kerja. Dengan pilar ini, McKinley dan ADB ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menghasilkan manfaat yang terdistribusi secara adil dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan (McKinley, 2010; ADB, 2011).

3. Pilar Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Sustainability)

Pilar ketiga ini mencakup indikator yang berkaitan dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan, seperti akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, serta dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Tujuan dari pilar ini adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berlangsung tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan jangka panjang dari aspek sosial dan lingkungan (McKinley, 2010; ADB, 2011).

Untuk mengukur indeks komposit ini secara praktis, setiap indikator yang dipilih dinormalisasi ke dalam suatu indeks standar (misalnya skala 0–1 atau 0–100). Kemudian, hasilnya diintegrasikan dengan memberikan bobot tertentu kepada setiap indikator berdasarkan tingkat relevansi dan kepentingannya. Selanjutnya, indeks komposit diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian indikator dengan bobotnya masing-masing. Dengan demikian, pendekatan McKinley dan ADB

menghasilkan indeks tunggal yang mampu menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi secara multidimensi, bukan hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi tetapi juga dari aspek pemerataan, kesempatan, dan keberlanjutan.

Pendekatan ini sangat relevan bagi pembuat kebijakan, karena memberikan dasar empiris yang jelas dan komprehensif untuk mengevaluasi dan merancang kebijakan pembangunan yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan (McKinley, 2010; ADB, 2011)

3. Inclusive Growth and Development Index (IDI)

Inclusive Growth and Development Index (IDI) merupakan metode pengukuran komprehensif yang dikembangkan oleh World Economic Forum (2017) dengan tujuan mengevaluasi pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari aspek kenaikan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga memperhitungkan seberapa merata manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut dirasakan oleh masyarakat. IDI menekankan pentingnya inklusivitas sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Secara metodologis, IDI mengukur inklusivitas melalui tiga dimensi utama, yaitu:

a. *Pertumbuhan dan Pembangunan (Growth and Development)*

Dimensi ini mengukur kinerja ekonomi melalui indikator-indikator standar seperti tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, produktivitas tenaga kerja, tingkat lapangan kerja, serta stabilitas ekonomi makro. Tujuannya adalah mengevaluasi kondisi fundamental ekonomi yang mendukung pembangunan jangka panjang dan memastikan bahwa pertumbuhan berlangsung secara stabil dan konsisten.

b. *Inklusi (Inclusion)*

Dimensi ini mencakup indikator yang secara khusus menilai distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara luas. Indikator dalam dimensi ini meliputi tingkat ketimpangan pendapatan (misalnya indeks Gini), tingkat kemiskinan, akses terhadap kesempatan kerja yang layak, serta inklusi keuangan dan partisipasi ekonomi perempuan. Dimensi ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat nyata kepada semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan marjinal.

c. Kesetaraan Antar Generasi dan Keberlanjutan (Intergenerational Equity and Sustainability)

Dimensi ini menggunakan indikator-indikator yang mengukur kemampuan ekonomi untuk mempertahankan pembangunan dalam jangka panjang tanpa merusak peluang generasi mendatang. Indikator utama pada dimensi ini mencakup akses terhadap pendidikan yang berkualitas, ketersediaan layanan kesehatan dasar, perlindungan lingkungan hidup, serta investasi jangka panjang dalam infrastruktur dasar dan digital.

Setiap dimensi dari IDI terdiri dari beberapa pilar spesifik sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan keterampilan
- 2) Infrastruktur dasar dan digital
- 3) Pekerjaan dan kesempatan kerja
- 4) Perlindungan sosial
- 5) Kualitas aset dan kepemilikan
- 6) Inklusi keuangan
- 7) Kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru

Dalam implementasinya, data yang diperoleh pada masing-masing pilar ini dinormalisasi terlebih dahulu dengan menggunakan skala standar (misalnya skala 0–1 atau 0–100). Selanjutnya, data tersebut diberi bobot relatif berdasarkan relevansi dan urgensi dalam konteks inklusivitas pembangunan ekonomi. Setelah proses pembobotan selesai, indeks komposit inklusif kemudian dihitung sebagai agregasi tertimbang dari seluruh indikator yang telah dinormalisasi tersebut.

Metode pengukuran IDI ini membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi area prioritas yang memerlukan intervensi lebih lanjut dan memastikan bahwa strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan tidak hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi secara agregat tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dirasakan secara adil, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat (Samans et al., 2017; WEF, 2017).

4. Indeks Inklusifitas Perekonomian

Metode pengukuran Indeks Inklusifitas Perekonomian atau Inclusive Economic Index (IEI) yang dikembangkan oleh United Nations Development

Programme (UNDP) bersama Ramos, Ranieri, dan Lammens secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Metode IEI dikembangkan oleh Ramos et al. (2013) bersama UNDP untuk menilai inklusivitas ekonomi secara lebih luas dibandingkan dengan indikator ekonomi tradisional. Indeks ini menggabungkan berbagai dimensi sosial dan ekonomi yang mencerminkan tingkat inklusivitas dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

a) Dimensi Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi

Indikator pada dimensi ini mencakup pertumbuhan pendapatan riil, volatilitas pendapatan, serta stabilitas ekonomi secara umum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ekonomi bertumbuh secara berkelanjutan dan tidak fluktuatif, sehingga menciptakan kondisi stabil untuk pembangunan jangka panjang.

b) Dimensi Kesenjangan Sosial (*Equity*)

Pada dimensi ini, indikator yang digunakan mencakup ukuran-ukuran ketimpangan pendapatan seperti indeks Gini, rasio pembagian pendapatan antar kelompok (misalnya kuintil pendapatan), serta indikator ketimpangan gender. Dimensi ini menekankan pentingnya pemerataan dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi.

c) Dimensi Inklusi Sosial (*Social Inclusion*)

Dimensi ini meliputi indikator-indikator seperti tingkat pengangguran, partisipasi angkatan kerja, akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Indikator-indikator ini mengukur sejauh mana masyarakat secara aktif dan setara berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan sosial.

Dalam implementasi praktisnya, masing-masing indikator terlebih dahulu dinormalisasi menggunakan metode standar seperti min-max scaling atau Z-score untuk memastikan indikator memiliki skala yang sama. Kemudian, indikator-indikator tersebut diberi bobot tertentu berdasarkan relevansi dan urgensi masing-masing indikator terhadap konsep inklusivitas ekonomi yang diukur. Setelah itu, indeks komposit IEI diperoleh dengan cara mengagregasi seluruh indikator yang

telah dinormalisasi dengan bobotnya masing-masing. Metode ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat inklusivitas ekonomi suatu negara atau wilayah dan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif, adil, dan berkelanjutan.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu ekonomi yang merujuk pada peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Teori pertumbuhan ekonomi berfungsi untuk menjelaskan sumber, mekanisme, dan dinamika pertumbuhan tersebut, serta bagaimana pertumbuhan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sejak abad ke-18, para ekonom telah mengembangkan berbagai teori untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang mendorong kemajuan ekonomi dan bagaimana negara-negara dapat mempercepat proses pertumbuhan mereka.

A. Perkembangan Teori Pertumbuhan Ekonomi

Berikut ini merupakan perkembangan utama teori pertumbuhan ekonomi dari klasik hingga kontemporer.

1. Teori Klasik

Teori pertumbuhan klasik merupakan pendekatan awal yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebagai proses akumulasi modal dan perluasan tenaga kerja dalam kerangka pasar bebas. Tokoh sentral dalam teori ini adalah Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus.

Adam Smith dalam *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh spesialisasi kerja, efisiensi pasar, dan akumulasi kapital. Ia menekankan pentingnya pasar bebas dan pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas. David Ricardo menambahkan unsur *law of diminishing returns*, terutama pada sektor agrikultur. Pertumbuhan penduduk dan penggunaan lahan pertanian, produktivitas marjinal akan menurun, yang pada akhirnya membatasi pertumbuhan. Thomas

Malthus dalam *An Essay on the Principle of Population* (1798) melihat pertumbuhan penduduk sebagai ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia berargumen bahwa penduduk tumbuh lebih cepat daripada produksi pangan, sehingga dalam jangka panjang akan terjadi kemiskinan dan stagnasi ekonomi. Meskipun bersifat deterministik dan pesimistis, teori klasik meletakkan dasar penting dalam pemahaman tentang peran akumulasi modal, tenaga kerja, dan sumber daya dalam pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori neo-klasik dikembangkan pada pertengahan abad ke-20 untuk menanggapi keterbatasan teori klasik. Model paling berpengaruh dikembangkan oleh Robert Solow (1956) dan Trevor Swan secara terpisah. Model ini memasukkan teknologi sebagai faktor utama dalam pertumbuhan jangka panjang. Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tiga faktor utama: akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi yang bersifat eksogen. Salah satu kontribusi penting dari model ini adalah penjelasan tentang *steady-state growth*, yaitu kondisi di mana ekonomi tumbuh secara stabil setelah penyesuaian terhadap akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Solow juga memperkenalkan konsep *diminishing returns to capital*, yang menyatakan bahwa setiap tambahan investasi akan menghasilkan peningkatan output yang semakin kecil, sehingga pertumbuhan tidak bisa bertumpu pada investasi fisik saja. Model ini memprediksi bahwa negara-negara miskin akan tumbuh lebih cepat daripada negara maju jika memiliki akses terhadap teknologi yang sama, dalam proses yang dikenal sebagai *conditional convergence*. Namun dalam praktiknya, konvergensi ini tidak selalu terjadi karena perbedaan dalam kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia.

3. Teori Pertumbuhan Endogen

Berbeda dari pendekatan Solow, teori pertumbuhan endogen menolak asumsi bahwa teknologi bersifat eksogen. Teori ini, yang dikembangkan oleh Romer (1986), Lucas (1988), dan Barro (1991), menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan melalui mekanisme internal seperti inovasi, peningkatan pengetahuan, akumulasi modal manusia, dan pembelajaran dalam

proses produksi. Romer (1986) menekankan peran *spillover effects* dari pengetahuan sebagai sumber pertumbuhan produktivitas yang tidak mengalami diminishing returns. Lucas (1988) menyoroti pentingnya modal manusia, khususnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik seperti subsidi pendidikan, investasi pada riset dan pengembangan (R&D), serta perlindungan hak kekayaan intelektual dapat memengaruhi tingkat pertumbuhan melalui jalur inovasi dan akumulasi kapabilitas teknologi.

4. Teori Pertumbuhan Schumpeterian

Teori ini mengacu pada pemikiran Joseph Schumpeter yang menekankan bahwa pertumbuhan bersumber dari proses inovasi dan *creative destruction*—yakni penghancuran struktur ekonomi lama oleh struktur baru yang lebih produktif. Dalam teori Schumpeterian, pelaku usaha yang inovatif menjadi motor penggerak pertumbuhan melalui penciptaan produk dan teknologi baru. Dalam versi modern, teori ini dikembangkan oleh Aghion dan Howitt (1992) melalui *Schumpeterian Growth Model* yang menempatkan kegiatan riset dan pengembangan sebagai inti pertumbuhan. Pertumbuhan dipahami sebagai hasil dari kompetisi antarfirma dalam menciptakan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi. Model ini juga menjelaskan dinamika siklus pertumbuhan dan kemunduran teknologi, serta hubungan antara regulasi pasar, tingkat persaingan, dan tingkat inovasi.

5. Teori Harold Domar

Dalam sejarah pemikiran ekonomi pembangunan, teori Harrod-Domar menempati posisi penting sebagai salah satu model awal yang menjelaskan bagaimana perekonomian dapat tumbuh secara mantap dari waktu ke waktu. Meskipun pada awalnya dirumuskan dalam konteks ekonomi makro Keynesian pasca-Depresi Besar, teori ini kemudian dikembangkan menjadi kerangka untuk merancang strategi pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang.

Teori ini pertama kali dikembangkan secara terpisah oleh Roy Harrod pada tahun 1939 dan Evsey Domar pada tahun 1946, tetapi memiliki struktur dan asumsi

dasar yang serupa sehingga dalam literatur dikenal sebagai model Harrod-Domar. Inti dari model ini adalah gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh dua faktor utama, yakni tingkat tabungan dan efisiensi investasi yang tercermin dalam rasio modal terhadap output (capital-output ratio). Dalam kerangka ini, tabungan masyarakat akan dikonversi menjadi investasi, dan investasi tersebut akan menghasilkan penambahan output yang proporsional, tergantung pada efisiensi penggunaan modal.

Model ini berasumsi bahwa hubungan antara investasi dan pertumbuhan output bersifat tetap, dan seluruh tabungan akan diinvestasikan secara produktif. Oleh karena itu, untuk mencapai target pertumbuhan tertentu, negara harus menjaga kestabilan tabungan dan meningkatkan efisiensi investasi. Dalam konteks ini, teori Harrod-Domar menjadi sangat populer dalam perencanaan pembangunan negara-negara berkembang selama dekade 1950-an hingga 1970-an, karena memberikan kerangka operasional sederhana dalam menghitung kebutuhan investasi untuk mencapai sasaran pertumbuhan tertentu

B. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi secara konvensional didefinisikan sebagai peningkatan output riil suatu negara dari waktu ke waktu, biasanya diukur melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ini sering dijadikan indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi karena mencerminkan kapasitas suatu negara dalam menciptakan kekayaan. Namun, dalam dua dekade terakhir, muncul kritik yang kuat terhadap pendekatan pertumbuhan yang hanya berorientasi pada agregat makroekonomi dan mengabaikan dimensi distribusi, partisipasi, dan keberlanjutan. Kritik inilah yang melahirkan konsep pembangunan ekonomi inklusif.

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan siapa yang berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dan siapa yang memperoleh manfaat darinya. Dengan kata lain, pertumbuhan tidak cukup jika hanya menciptakan nilai tambah secara nasional; ia harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan terpinggirkan.

Oleh karena itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif menjadi krusial dalam menentukan kualitas pembangunan.

Secara teoretis, hubungan keduanya dapat dijelaskan dalam kerangka *pro-poor growth*, yakni pertumbuhan yang memberikan manfaat lebih besar secara proporsional kepada kelompok miskin. Ravallion dan Chen (2003) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi baru bisa disebut inklusif jika mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan secara simultan. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial.

Studi oleh Ali dan Son (2007) yang dilakukan oleh Asian Development Bank menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai kebijakan redistributif cenderung lebih efektif dalam memperkuat pembangunan inklusif. Mereka menyatakan bahwa inklusivitas pembangunan hanya bisa terjadi bila negara berperan aktif dalam menyediakan layanan dasar dan menciptakan lingkungan ekonomi yang memungkinkan partisipasi penuh seluruh warga negara.

Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif tidak selalu linear. Di banyak negara berkembang, pertumbuhan tinggi justru memperbesar ketimpangan karena didominasi oleh sektor padat modal atau terkonsentrasi di wilayah tertentu. Seperti yang dicatat oleh Piketty (2014), ketika pertumbuhan tidak disertai mekanisme distribusi yang adil, maka pengembalian modal akan lebih besar daripada laju pertumbuhan ekonomi, sehingga memperkuat konsentrasi kekayaan dan melemahkan inklusivitas.

Dalam laporan *World Development Report* (World Bank, 2013), dijelaskan bahwa kualitas pertumbuhan lebih penting dibanding kecepatan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja luas, menjangkau sektor informal dan usaha kecil-menengah, serta menurunkan hambatan terhadap partisipasi perempuan dan kelompok marjinal, cenderung mendorong inklusivitas dan memperluas pemerataan kesejahteraan.

Amartya Sen (1999) juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi baru dapat disebut inklusif apabila mampu memperluas kebebasan substantif manusia, termasuk kebebasan dari kelaparan, kebodohan, dan kemiskinan. Dalam pendekatan *capability*, pembangunan inklusif dipahami sebagai proses memperluas

kapabilitas dasar seluruh warga negara, dan pertumbuhan ekonomi menjadi sarana untuk mendanai dan memperluas akses terhadap kapabilitas tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif bersifat saling bergantung. Pertumbuhan menyediakan sumber daya untuk membiayai program-program inklusif, sementara inklusivitas memperkuat fondasi pertumbuhan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, dan perluasan pasar domestik. Dalam kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang, pertumbuhan dan inklusivitas tidak dapat dipisahkan—keduanya harus menjadi satu kesatuan yang saling menopang

2.1.3 Kesempatan Kerja

A. Konsep Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Konsep ini tidak hanya merujuk pada jumlah pekerjaan yang tersedia, tetapi juga mencakup aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengertian dan makna strategis dari kesempatan kerja dalam konteks pembangunan, baik dari sisi teoritis maupun empiris.

Penelitian oleh Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa kesempatan kerja adalah situasi di mana setiap individu yang mampu dan bersedia bekerja dapat memperoleh pekerjaan yang produktif dan memberikan pendapatan yang layak. Mereka menekankan bahwa pekerjaan tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kapabilitas sosial, dan mendorong partisipasi dalam pembangunan. Dalam pandangan ini, pembangunan ekonomi yang berhasil bukan hanya ditandai oleh peningkatan PDB, tetapi juga oleh peningkatan jumlah dan kualitas pekerjaan.

Penelitian empiris oleh Kapsos (2005), yang dilakukan dalam kerangka International Labour Organization (ILO), mendefinisikan kesempatan kerja sebagai “jumlah posisi pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja yang aktif secara ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal, yang mampu menyediakan pendapatan dan memberikan perlindungan kerja minimal.” Dalam studi tersebut, Kapsos juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja yang stabil dan layak

sangat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, khususnya di negara berkembang.

Dalam studi oleh Wicaksono dan Firmansyah (2020) yang meneliti keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu otomatis menciptakan peningkatan kesempatan kerja, terutama ketika pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang oleh sektor padat modal daripada sektor padat karya. Oleh karena itu, mereka menggarisbawahi bahwa kesempatan kerja harus dipahami secara kontekstual, yakni sebagai hasil interaksi antara dinamika ekonomi makro, struktur industri, dan kebijakan ketenagakerjaan.

Sementara itu, Sen (1999) dalam pendekatannya tentang *capability* menyatakan bahwa kesempatan kerja harus dimaknai lebih luas sebagai “freedom to work” atau kebebasan untuk memilih jenis pekerjaan yang bermakna dan sesuai dengan kemampuan individu. Bagi Sen, pekerjaan yang layak merupakan sarana untuk memperluas kapabilitas manusia, karena melalui pekerjaan seseorang tidak hanya memperoleh penghasilan, tetapi juga memperoleh harga diri, keanggotaan sosial, dan ruang partisipasi dalam masyarakat.

B. Hubungan Kesempatan Kerja dengan Pembangunan Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif secara mendasar bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara agregat, tetapi juga menyebar dan partisipatif. Dalam kerangka ini, kesempatan kerja merupakan salah satu jalur utama melalui mana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat diakses oleh masyarakat luas. Kesempatan kerja tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana keterlibatan sosial, penguatan kapabilitas manusia, serta jembatan mobilitas ekonomi. Oleh karena itu, ketersediaan pekerjaan yang layak dan inklusif menjadi indikator kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Secara teoritis, hubungan antara kesempatan kerja dan pembangunan inklusif dijelaskan dalam kerangka teori human capital (Becker, 1993; Schultz, 1961), yang menekankan bahwa tenaga kerja bukan hanya faktor produksi, tetapi juga aset pembangunan yang harus dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan.

Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi pula kemampuan mereka untuk mengisi peluang kerja yang tersedia dalam struktur ekonomi yang modern. Namun, agar pendidikan dan pelatihan dapat bermakna secara ekonomi, diperlukan pasar kerja yang terbuka, adil, dan menyerap tenaga kerja secara produktif.

Dalam pendekatan pembangunan inklusif, kesempatan kerja bukan hanya soal kuantitas, melainkan juga kualitas pekerjaan. Pekerjaan yang bersifat informal, tidak bergaji layak, dan tidak memiliki perlindungan sosial tidak dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Organisasi Buruh Internasional (ILO, 2013) melalui konsep *Decent Work Agenda* menegaskan bahwa pekerjaan yang inklusif adalah pekerjaan yang aman, memiliki jaminan sosial, upah yang memadai, dan menjamin kesetaraan gender serta nondiskriminasi. Oleh karena itu, penciptaan kesempatan kerja yang layak adalah prasyarat bagi pemerataan hasil pembangunan.

Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2009) dalam laporan *Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress* menekankan bahwa partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif—yakni melalui pekerjaan—merupakan salah satu komponen utama dari inklusi ekonomi. Jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak menciptakan lapangan kerja, maka pertumbuhan tersebut tidak dapat disebut sebagai pertumbuhan yang inklusif. Hal ini diperkuat dengan konsep *jobless growth*, yakni fenomena pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan penciptaan lapangan kerja, yang justru memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan kerentanan kelompok miskin.

Selain sebagai mekanisme distribusi pendapatan, pekerjaan juga memainkan peran penting dalam membangun kapabilitas sosial. Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk bekerja bukan hanya berkaitan dengan penghasilan, tetapi juga dengan kebebasan untuk memilih gaya hidup yang bernilai. Dalam konteks ini, pekerjaan yang layak memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi dirinya, membangun rasa percaya diri, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya,

pengangguran atau keterlibatan dalam pekerjaan yang rentan mengurangi kebebasan substantif dan memperkuat eksklusi sosial.

Hubungan positif antara penciptaan lapangan kerja dan inklusivitas pembangunan juga terbukti secara empiris. Laporan *World Employment and Social Outlook* oleh ILO (2020) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi kerja yang tinggi, terutama di sektor-sektor produktif seperti manufaktur dan jasa modern, cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah dan indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi. Dalam konteks negara berkembang, seperti Indonesia, penciptaan pekerjaan formal yang inklusif di sektor-sektor padat karya, seperti industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian berbasis teknologi, telah menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada inklusi sosial.

Keterkaitan antara kesempatan kerja dan pembangunan inklusif juga bersifat timbal balik. Tidak hanya pembangunan inklusif yang menciptakan pekerjaan, tetapi juga penciptaan pekerjaan—khususnya pekerjaan yang menysasar kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas—akan memperkuat inklusi sosial dan memperluas basis pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, pembangunan inklusif tidak mungkin tercapai tanpa strategi sistematis untuk memperluas akses terhadap pasar kerja yang adil dan kompetitif.

2.1.4 Infrastruktur

A. Konsep Infrastruktur

Infrastruktur memegang peran vital dalam pembangunan ekonomi modern. Secara konseptual, infrastruktur mencakup seluruh sistem fisik dan kelembagaan yang memungkinkan terselenggaranya aktivitas ekonomi dan sosial secara efisien. Ini meliputi transportasi, energi, air bersih, telekomunikasi, serta infrastruktur sosial seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dalam ekonomi pembangunan, infrastruktur sering disebut sebagai *public capital* karena memiliki karakteristik barang publik—yakni tidak bersifat eksklusif dan bersifat non-rival dalam penggunaannya—sehingga membutuhkan peran dominan dari negara dalam penyediaannya.

Dalam literatur awal, terutama dalam tradisi ekonomi klasik, infrastruktur belum dikaji secara terpisah, tetapi telah diakui sebagai bagian penting dalam

memperluas pasar dan menurunkan biaya transaksi. Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776) menekankan bahwa pembangunan jalan dan kanal adalah prasyarat untuk memperluas pembagian kerja dan meningkatkan produktivitas nasional. Meskipun teorinya belum membahas infrastruktur secara eksplisit, konsep efisiensi pasar dan pertumbuhan berbasis spesialisasi yang dia kemukakan berimplikasi pada pentingnya konektivitas fisik antarwilayah.

Peran infrastruktur mulai mendapat perhatian lebih sistematis dalam pendekatan pertumbuhan neo-klasik. Dalam model Solow (1956), akumulasi modal merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, meskipun dalam model ini, infrastruktur masih digolongkan dalam kategori kapital secara umum dan tidak dibedakan secara spesifik. Model ini memandang bahwa pertumbuhan jangka panjang hanya dapat dipertahankan melalui kemajuan teknologi, namun peran infrastruktur tetap signifikan dalam mendorong pertumbuhan jangka pendek melalui peningkatan produktivitas faktor produksi lainnya.

Perkembangan lebih lanjut terjadi dalam teori pertumbuhan endogen. Paul Romer (1986) dan Robert Lucas (1988) menolak anggapan bahwa kemajuan teknologi bersifat eksogen. Mereka menyatakan bahwa pertumbuhan dapat dihasilkan dari proses internal dalam ekonomi, seperti akumulasi pengetahuan, modal manusia, dan investasi pada infrastruktur. Dalam pendekatan ini, infrastruktur dianggap sebagai faktor yang menciptakan eksternalitas positif, yakni memberikan keuntungan tidak hanya bagi investor langsung, tetapi juga bagi pelaku ekonomi lainnya. Infrastruktur transportasi yang baik, misalnya, menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperluas pasar kerja. David Aschauer (1989) dalam studinya bahkan menyebut infrastruktur publik sebagai "core capital" bagi perekonomian, karena ia berfungsi sebagai kerangka dasar yang menopang semua aktivitas ekonomi.

Dalam konteks pembangunan wilayah dan teori pertumbuhan spasial, infrastruktur memainkan peran sebagai alat konektivitas antarwilayah yang mempengaruhi lokasi industri, konsentrasi aktivitas ekonomi, dan aliran migrasi tenaga kerja. Teori pertumbuhan kumulatif dan *cumulative causation* dari Gunnar Myrdal serta *growth pole theory* dari François Perroux menjelaskan bahwa investasi infrastruktur yang terfokus di wilayah tertentu akan menciptakan efek

pengganda (multiplier effect) yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Namun jika tidak diimbangi dengan distribusi spasial yang adil, kebijakan infrastruktur justru dapat memperbesar ketimpangan antarwilayah. Hal ini ditegaskan dalam pendekatan *New Economic Geography* oleh Paul Krugman (1991) yang menunjukkan bahwa aglomerasi industri dan kemudahan akses akibat pembangunan infrastruktur dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, tetapi juga dapat menimbulkan polarisasi ekonomi jika wilayah tertinggal tidak mendapatkan akses yang sama.

B. Hubungan Infrastruktur dengan Pembangunan Inklusif

Dalam literatur ekonomi pembangunan kontemporer, infrastruktur dipahami sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga menciptakan akses terhadap layanan dasar, memperluas konektivitas wilayah, dan mengurangi kesenjangan sosial serta spasial. Pandangan ini tercermin dalam banyak studi mutakhir yang menekankan pentingnya investasi infrastruktur publik sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Asian Development Bank (ADB, 2017) dalam laporan *Meeting Asia's Infrastructure Needs* menyatakan bahwa investasi infrastruktur yang berkualitas tinggi mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mempercepat integrasi pasar, dan mendukung konektivitas regional. Infrastruktur yang inklusif—seperti jalan desa, akses air bersih, listrik perdesaan, dan jaringan digital—secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan memperluas peluang ekonomi di daerah terpencil. Laporan ini menegaskan bahwa infrastruktur harus dirancang tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan, tetapi juga untuk menjamin pemerataan hasil pembangunan.

World Bank (2020) melalui studi *Infrastructure in Developing Countries: Perils and Promise* menguraikan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, terutama jika investasi tersebut diarahkan ke sektor-sektor yang padat karya dan pro-poor. Studi ini juga menekankan pentingnya *infrastructure governance*, karena kualitas kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek infrastruktur sangat menentukan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan dan inklusi.

Penelitian oleh Estache dan Garsous (2022) dalam *Handbook on Infrastructure and Inclusive Development* menambahkan bahwa infrastruktur berperan penting dalam menurunkan ketimpangan jika aksesnya bersifat universal dan tidak diskriminatif. Mereka menunjukkan bahwa negara-negara yang mengintegrasikan kebijakan infrastruktur dengan agenda sosial, seperti pelayanan publik berbasis komunitas dan infrastruktur sosial (sekolah, rumah sakit, transportasi umum), cenderung lebih berhasil dalam mendorong pembangunan inklusif. Dengan demikian, kualitas pertumbuhan lebih ditentukan oleh struktur dan pemerataan infrastruktur ketimbang oleh laju pertumbuhan itu sendiri.

Temuan penting juga datang dari Calderón, Moral-Benito, dan Servén (2015), yang dalam studi panel lintas negara menemukan bahwa infrastruktur yang berkualitas tinggi memiliki korelasi signifikan dengan penurunan ketimpangan dan peningkatan inklusivitas ekonomi. Mereka menekankan bahwa bukan hanya ketersediaan, tetapi juga kualitas dan distribusi infrastruktur yang menentukan keberhasilannya sebagai motor pertumbuhan yang inklusif.

Dengan mengacu pada literatur terkini tersebut, semakin jelas bahwa infrastruktur tidak hanya memiliki fungsi teknis sebagai pendukung kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Investasi infrastruktur yang dirancang dengan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat terbukti mampu memperluas akses ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat kohesi sosial dalam jangka panjang.

2.1.5 Ketimpangan

A. Konsep Ketimpangan

Ketimpangan/disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*Developed Region*) dan daerah terbelakang

(Underdeveloped Region) (Sjafrizal, 2012). Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012). Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila proses pembangunan berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan.

B. Hubungan Ketimpangan dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka ini, ketimpangan bukan hanya dianggap sebagai persoalan moral atau sosial, tetapi sebagai indikator penting untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pembangunan itu sendiri. Semakin tinggi ketimpangan, semakin rendah tingkat inklusivitas pembangunan yang terjadi.

Secara teoretis, hubungan antara ketimpangan dan pembangunan inklusif bersifat negatif dan saling menghambat. Ketimpangan ekonomi yang tinggi—baik dalam bentuk distribusi pendapatan, kekayaan, atau akses terhadap pendidikan dan layanan dasar—akan menciptakan eksklusivitas sosial dan mempersempit partisipasi kelompok miskin dan rentan dalam proses ekonomi. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung bersifat eksklusif, di mana hanya sebagian kecil populasi yang memperoleh manfaat dari pembangunan, sementara kelompok lainnya tetap tertinggal dalam kondisi keterbatasan struktural.

Stiglitz (2012) menjelaskan bahwa ketimpangan tidak hanya berdampak pada distribusi pendapatan, tetapi juga melemahkan daya beli masyarakat, menghambat mobilitas sosial, serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi. Ketika kelompok miskin tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak, modal usaha, dan pekerjaan produktif, maka kapasitas produktif ekonomi nasional secara keseluruhan menjadi terbatas. Hal ini pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang seharusnya bersifat inklusif.

Teori pertumbuhan endogen juga memberikan argumen bahwa ketimpangan dalam distribusi modal manusia akan menghambat akumulasi pengetahuan dan inovasi. Galor dan Zeira (1993), dalam model ketimpangan dan pertumbuhan mereka, menunjukkan bahwa masyarakat yang mengalami ketimpangan tinggi akan cenderung underinvest dalam pendidikan karena kelompok miskin tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Akibatnya, potensi sumber daya manusia tidak berkembang optimal, dan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkelanjutan. Di sisi lain, pembangunan yang bersifat inklusif justru memiliki efek langsung dalam mengurangi ketimpangan. Ketika negara menjalankan kebijakan redistributif seperti perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan gratis, sistem jaminan sosial, serta penyediaan lapangan kerja bagi kelompok rentan, maka distribusi pendapatan akan menjadi lebih merata. Hal ini tidak hanya meningkatkan keadilan sosial, tetapi juga memperluas basis konsumsi dan produksi dalam ekonomi. Dalam jangka panjang, pemerataan akses ini mendorong pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa kebijakan pemerataan akan memperbesar kesenjangan. Sebaliknya, negara-negara yang mengombinasikan pertumbuhan dengan investasi sosial dan kebijakan inklusi—seperti Korea Selatan, Irlandia, dan negara-negara Skandinavia—berhasil menurunkan ketimpangan sembari mempertahankan daya saing ekonomi.

Thomas Piketty (2014) menunjukkan bahwa jika distribusi kekayaan tidak dikendalikan, maka akumulasi kapital akan semakin terkonsentrasi, dan ketimpangan akan terus meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu instabilitas sosial dan mengancam demokrasi ekonomi. Oleh karena itu,

pembangunan ekonomi inklusif mensyaratkan adanya mekanisme koreksi terhadap ketimpangan melalui pajak progresif, perlindungan tenaga kerja, dan inklusi keuangan. Dari sisi institusional, Acemoglu dan Robinson (2012) menekankan bahwa pembangunan ekonomi hanya dapat bersifat inklusif jika dijalankan dalam sistem institusi yang inklusif pula. Ketimpangan yang bersumber dari institusi ekstraktif, yang hanya melayani elite tertentu, akan menghalangi partisipasi ekonomi masyarakat luas. Maka, mengatasi ketimpangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda reformasi kelembagaan dalam pembangunan inklusif.

Dengan demikian, hubungan antara ketimpangan dan pembangunan inklusif bersifat dialektis: ketimpangan menghambat inklusi, dan sebaliknya, pembangunan yang inklusif adalah mekanisme untuk mengoreksi ketimpangan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan agregat tanpa memperhatikan dimensi distribusi akan menciptakan masyarakat yang rentan terhadap instabilitas sosial, eksklusi ekonomi, dan stagnasi dalam jangka panjang

2.1.6 Kemiskinan

A. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan fundamental dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang telah lama menjadi perhatian para ekonom, sosiolog, dan ilmuwan pembangunan. Meskipun secara umum kemiskinan sering dipahami sebagai kondisi kekurangan pendapatan, secara teoretis kemiskinan memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks, mencakup kekurangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, perumahan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, teori-teori tentang kemiskinan berkembang dalam spektrum pendekatan yang luas—dari yang bersifat ekonomistik hingga struktural dan multidimensional.

1. Teori Kemiskinan Absolut

Teori ini merupakan pendekatan awal yang menjelaskan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup secara layak, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Pandangan ini digunakan secara luas dalam pengukuran kemiskinan yang berbasis pada garis kemiskinan atau *poverty line*, di mana individu dianggap miskin jika pendapatannya berada di bawah standar tertentu.

Konsep ini banyak digunakan oleh lembaga seperti World Bank, yang menetapkan garis kemiskinan ekstrem internasional pada pendapatan USD 2,15 per hari (World Bank, 2022). Teori ini bersifat kuantitatif dan cenderung universal, namun kerap dikritik karena tidak mempertimbangkan perbedaan konteks sosial, budaya, dan aspirasi lokal.

2. Teori Kemiskinan Relatif

Berbeda dengan pendekatan absolut, teori kemiskinan relatif memandang kemiskinan sebagai kondisi keterbatasan dalam hubungan sosial ekonomi. Individu dianggap miskin bukan hanya karena kekurangan sumber daya, tetapi karena tidak dapat menikmati standar hidup yang dianggap layak dalam masyarakat tempat ia hidup. Peter Townsend (1979) menjadi tokoh penting dalam pendekatan ini. Menurutnya, seseorang dikatakan miskin jika ia tidak memiliki akses terhadap gaya hidup, aktivitas, dan sumber daya yang umum dimiliki oleh masyarakat pada umumnya.

Pendekatan relatif menekankan bahwa kemiskinan adalah persoalan eksklusif sosial. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai kekurangan finansial, tetapi sebagai ketimpangan dalam kemampuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menjadi dasar bagi banyak kebijakan kesejahteraan di negara maju.

3. Teori Kemiskinan Struktural

Teori ini menjelaskan kemiskinan sebagai hasil dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Kemiskinan bukan semata akibat kegagalan individu, tetapi akibat dari sistem yang meminggirkan kelompok tertentu dari akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan. Dalam pendekatan ini, ketimpangan distribusi lahan, diskriminasi gender dan etnis, serta sentralisasi ekonomi menjadi faktor utama yang memelihara kemiskinan.

Para pemikir dari tradisi teori ketergantungan dan strukturalisme, seperti Samir Amin dan Andre Gunder Frank, menyatakan bahwa ketimpangan global dan eksploitasi kolonial menjadi penyebab utama kemiskinan yang terstruktur dalam sistem ekonomi dunia. Dalam konteks domestik, teori ini menjelaskan bagaimana

kemiskinan mereproduksi dirinya karena keterbatasan sistemik terhadap pendidikan, pasar kerja, dan layanan sosial (Todaro & Smith, 2015).

4. Teori Kapabilitas

Pendekatan ini diperkenalkan oleh Amartya Sen dalam bukunya *Development as Freedom* (1999). Menurut Sen, kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan, tetapi merupakan ketidakmampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga. Dalam pandangan ini, kemiskinan adalah kekurangan kapabilitas untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat—misalnya, tidak bisa membaca, tidak bisa bekerja produktif, atau tidak bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan kapabilitas menjadi sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan pembangunan yang berfokus pada manusia, serta menjadi basis dari pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh UNDP. Dalam konteks pembangunan inklusif, teori kapabilitas menjadi sangat relevan karena menekankan bahwa pembangunan harus menjamin bahwa semua individu memiliki akses yang adil terhadap kesempatan untuk berkembang.

5. Teori Lingkaran Kemiskinan

Konsep ini menekankan bahwa kemiskinan memiliki sifat siklikal dan mereproduksi dirinya sendiri. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan berlangsung antargenerasi karena keluarga miskin tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang baik, modal ekonomi, layanan kesehatan, dan jaringan sosial. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin tumbuh dalam kondisi yang sama dan mengalami keterbatasan struktural yang serupa.

Lewis (1966) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki subkultur tersendiri yang ditandai dengan nilai-nilai dan sikap yang tidak mendorong akumulasi produktivitas, seperti pasifisme, fatalisme, dan ketergantungan. Meskipun mendapat kritik karena cenderung menyalahkan korban, teori ini tetap penting dalam menjelaskan kenapa kemiskinan terus berlangsung tanpa intervensi sosial yang sistemik dan komprehensif.

B. Hubungan Kemiskinan dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pentingnya partisipasi luas dan distribusi hasil pertumbuhan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Dalam pendekatan ini, pengurangan kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai tujuan moral pembangunan, tetapi juga sebagai syarat struktural bagi terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan, stabil, dan adil.

Kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif memiliki hubungan yang bersifat kausal sekaligus timbal balik. Di satu sisi, tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi penghambat utama bagi inklusivitas pembangunan, karena individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, modal usaha, atau pekerjaan yang layak. Mereka juga seringkali tersisih dari sistem keuangan formal dan jaringan sosial yang produktif, sehingga tidak dapat berkontribusi secara optimal dalam proses ekonomi (Todaro & Smith, 2015). Ketika kelompok miskin terpinggirkan dari partisipasi ekonomi, maka struktur pembangunan yang terjadi cenderung eksklusif dan memperkuat ketimpangan sosial.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif merupakan strategi paling efektif untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan PDB secara agregat, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dinikmati oleh kelompok miskin melalui penciptaan lapangan kerja yang layak, penyediaan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *pro-poor growth* yang dikembangkan oleh Ravallion dan Chen (2003), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang lebih besar secara proporsional kepada kelompok miskin agar dapat disebut sebagai inklusif.

Dalam pendekatan *capability* yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1999), kemiskinan dipahami bukan sekadar kekurangan pendapatan, melainkan sebagai ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Oleh karena itu, pembangunan yang inklusif harus berfokus pada perluasan kapabilitas individu—terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi miskin—melalui

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan memperluas pilihan dan kesempatan hidup kelompok miskin, pembangunan dapat menjadi proses pembebasan dari kemiskinan struktural dan ketergantungan jangka panjang.

Selain itu, kemiskinan juga memengaruhi kinerja ekonomi makro secara keseluruhan. Masyarakat miskin yang tidak memiliki daya beli menurunkan permintaan agregat domestik, membatasi ukuran pasar, dan mengurangi insentif investasi. Dalam jangka panjang, hal ini menurunkan produktivitas nasional dan menghambat proses transformasi ekonomi. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan bukan hanya isu sosial, tetapi juga strategi ekonomi untuk memperluas basis permintaan dan tenaga kerja yang produktif.

2.1.7 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran pembangunan manusia, yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak usia sekolah, dengan asumsi bahwa struktur dan pola partisipasi pendidikan saat ini tetap berlaku. Konsep ini dikembangkan sebagai bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh United Nations Development Programme (UNDP, 2020) dan dipandang sebagai representasi dari investasi jangka panjang suatu negara dalam pembangunan modal manusia.

Secara teoritis, indikator HLS bertumpu pada landasan *human capital theory* yang dipelopori oleh Theodore Schultz (1961) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Gary Becker (1993). Dalam teori ini, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan, pada gilirannya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Schultz mengemukakan bahwa pengeluaran untuk pendidikan, seperti halnya investasi fisik, menghasilkan keuntungan ekonomi berupa peningkatan output dan efisiensi. Gary Becker dalam bukunya *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis* menekankan bahwa modal manusia—yang terbentuk melalui pendidikan dan pelatihan—merupakan salah satu faktor utama yang menjelaskan perbedaan produktivitas dan pendapatan antar individu dan antar negara.

Harapan Lama Sekolah tidak hanya mencerminkan tingkat akses terhadap pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai proyeksi kapasitas suatu negara dalam

membentuk generasi mendatang yang produktif dan adaptif terhadap perubahan ekonomi. Dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif, HLS memainkan peran strategis karena semakin tinggi harapan lama sekolah suatu kelompok masyarakat, semakin besar pula peluang kelompok tersebut untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja modern, memperoleh pekerjaan yang layak, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, HLS dapat dipahami bukan hanya sebagai ukuran pendidikan, tetapi juga sebagai alat ukur inklusi sosial dan mobilitas ekonomi.

Pendekatan *capability* yang diperkenalkan oleh Amartya Sen (1999) juga menguatkan pentingnya pendidikan sebagai komponen utama dalam perluasan kebebasan individu. Sen menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat instrumental untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga merupakan tujuan intrinsik dari pembangunan itu sendiri. Dalam pandangan ini, HLS menjadi indikator yang mencerminkan sejauh mana negara memberikan peluang kepada warganya untuk mengembangkan kemampuan dasar mereka, memilih jalur hidup yang mereka nilai bermakna, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, serta ekonomi.

Berbagai penelitian telah menunjukkan hubungan positif antara HLS dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Barro dan Lee (2013) dalam studi kuantitatifnya menunjukkan bahwa peningkatan tahun sekolah secara konsisten berkontribusi terhadap kenaikan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, laporan World Bank (2020) menyebutkan bahwa peningkatan satu tahun harapan lama sekolah dapat meningkatkan PDB per kapita negara-negara berkembang hingga 1,5–2 persen, tergantung pada kualitas pendidikan yang menyertainya. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan, khususnya di tingkat dasar dan menengah, tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga terhadap dinamika makroekonomi dan struktur ketenagakerjaan secara nasional.

Oleh karena itu, teori Harapan Lama Sekolah merupakan bagian integral dari pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkeadilan. Peningkatan HLS, terutama di wilayah tertinggal dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya akan memperkuat kualitas sumber daya manusia, tetapi juga akan memperluas basis produktif nasional, mengurangi ketimpangan sosial, serta

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan publik, hal ini menuntut komitmen negara untuk memperluas akses pendidikan, memperbaiki kualitas pengajaran, dan memastikan bahwa pendidikan benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

2.1.8 Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) merujuk pada kondisi di mana individu dan pelaku usaha memiliki akses yang efektif, terjangkau, dan berkelanjutan terhadap layanan keuangan formal seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, asuransi, dan layanan keuangan digital. Dalam konteks pembangunan ekonomi, inklusi keuangan bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga strategi untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang produktif, sekaligus memperkuat daya tahan mereka terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, inklusi keuangan memainkan peran penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Pembangunan ekonomi inklusif menekankan prinsip pertumbuhan yang merata, keterlibatan seluruh kelompok sosial dalam proses pembangunan, serta distribusi manfaat yang adil. Inklusi keuangan memberikan fondasi yang diperlukan bagi prinsip-prinsip ini untuk diwujudkan. Ketika masyarakat miskin, perempuan, pelaku usaha mikro, dan kelompok rentan memiliki akses terhadap layanan keuangan, mereka memperoleh kemampuan untuk menabung, berinvestasi dalam pendidikan atau usaha, dan menghadapi risiko ekonomi. Dengan kata lain, inklusi keuangan menjadi jembatan antara potensi individu dan kapabilitas ekonomi yang nyata.

Penelitian oleh Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine (2007) menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan secara signifikan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan. Mereka menemukan bahwa negara-negara dengan sistem keuangan yang lebih inklusif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan menyebar. Dalam konteks ini, inklusi keuangan bukan hanya memperkuat sisi permintaan dalam ekonomi, tetapi juga memperluas basis produksi masyarakat kelas bawah.

World Bank (2017) dalam laporan *Global Findex Database* menjelaskan bahwa akses ke layanan keuangan formal mendorong penguatan ekonomi rumah tangga, karena individu dapat mengelola risiko dengan lebih baik, merencanakan pengeluaran, dan mengakses modal kerja. Inklusi keuangan juga memiliki korelasi kuat dengan indikator pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Dalam laporan Asian Development Bank (ADB, 2020), dijelaskan bahwa inklusi keuangan mendukung pembangunan inklusif dalam empat cara utama: pertama, dengan memperluas akses kredit bagi UMKM yang menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja; kedua, dengan memfasilitasi transaksi digital yang mempercepat integrasi ekonomi; ketiga, dengan memperluas program bantuan sosial non-tunai; dan keempat, dengan mendorong penguatan literasi keuangan bagi masyarakat kelas bawah.

Penting juga untuk dicatat bahwa inklusi keuangan tidak secara otomatis menciptakan pembangunan inklusif, terutama jika tidak disertai dengan kebijakan pendukung seperti regulasi perlindungan konsumen, edukasi keuangan, dan penguatan kelembagaan keuangan mikro. Penelitian oleh Demirgüç-Kunt et al. (2020) menekankan bahwa inklusi keuangan yang terlalu fokus pada ekspansi produk tanpa memperhatikan keberlanjutan dan literasi pengguna justru berisiko menciptakan over-indebtedness, terutama di kalangan rumah tangga miskin.

Studi di tingkat negara juga memperkuat argumen ini. Di Indonesia, penelitian oleh Nasution dan Kusuma (2019) menemukan bahwa peningkatan indeks inklusi keuangan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan, khususnya di daerah perdesaan. Inklusi keuangan mendorong pembiayaan UMKM, mengurangi ketergantungan terhadap rentenir, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, baik di dalam maupun luar negeri, telah dilakukan. Penelitian-penelitian ini menjadi dasar penting dalam pemilihan berbagai variabel dan acuan materi yang digunakan oleh berbagai peneliti tentang Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.

Beberapa studi terdahulu telah mengeksplorasi determinan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Calderón dan Servén (2004) menemukan bahwa pengembangan infrastruktur mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% sekaligus menurunkan ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang. Demikian pula, Hutton dan Haller (2004) menunjukkan pentingnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, yang terbukti mampu menurunkan prevalensi penyakit hingga 40% serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara signifikan.

Loayza dan Raddatz (2010) melalui penelitian di negara-negara berkembang Asia dan Amerika Latin menekankan bahwa pertumbuhan pada sektor-sektor padat karya efektif mengurangi tingkat kemiskinan hingga 15%. Dalam perspektif jangka panjang, Barro dan Lee (2013) menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor penting karena secara konsisten meningkatkan produktivitas dan memacu pertumbuhan ekonomi melalui adopsi teknologi.

Penelitian yang lebih luas dari Stiglitz (2012) menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 2% dan memicu ketidakstabilan sosial, sehingga distribusi manfaat pertumbuhan harus menjadi perhatian utama. World Economic Forum (2017) juga menyoroti peran kebijakan inklusi, seperti redistribusi pendapatan dan investasi sosial, dalam mempercepat pertumbuhan inklusif, terutama di negara-negara berkembang.

OECD (2018) menguatkan bahwa investasi infrastruktur di negara-negara maju meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan ekonomi, sementara Beck et al. (2014) menemukan bahwa inklusi keuangan meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat hingga 20% di negara berkembang Afrika dan Asia. Di sisi lain, Dollar dan Kraay (2002) menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi efektif mengurangi kemiskinan, dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan bervariasi tergantung pada kondisi distribusi awal di tiap negara.

Klasen (2010) dan Ali serta Son (2007) mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai kebijakan redistribusi dan investasi sosial akan lebih efektif dalam meningkatkan inklusivitas. Studi regional di Asia Selatan oleh Ghani dan Kanbur (2012) serta di India oleh Banerjee et al. (2017) menunjukkan bahwa

pengembangan jalan dan infrastruktur transportasi sangat efektif mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pasar.

Sementara ILO (2018) dan OECD (2019) menyoroti peran penciptaan lapangan kerja berkualitas dalam meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok rentan serta mengurangi ketimpangan. Hal ini sejalan dengan temuan Bourguignon (2004), Ravallion (2011), dan Ostry et al. (2014) bahwa redistribusi pendapatan moderat dan pengurangan ketimpangan ekonomi sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif.

Beberapa penelitian di Indonesia juga memberikan wawasan penting. Adika (2021) dan Rofatunnisa (2024) menyoroti bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi inklusif. Sementara Pratiwi dan Kurniasari (2023) serta Hartati (2021) menunjukkan bahwa teknologi informasi, pendidikan, keterbukaan perdagangan, dan investasi merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan inklusif di Indonesia.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian lanjutan yang melibatkan variabel-variabel tersebut secara bersamaan—yaitu pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, keuangan inklusif, harapan lama sekolah, tingkat kesempatan kerja, ketimpangan, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur dasar. Pendekatan penelitian ini perlu dilakukan dengan pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik yang spesifik, agar kebijakan pembangunan inklusif yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi nyata setiap wilayah. Melalui pendekatan ini, diharapkan intervensi kebijakan dapat lebih efektif dalam mengatasi perbedaan regional dan mendorong inklusivitas secara nyata, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Penelitian yang mempertimbangkan variabel tersebut secara integratif dan spasial akan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi manfaat pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berpijak pada paradigma pembangunan ekonomi inklusif, sebuah pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan

ekonomi secara agregat, tetapi secara eksplisit memastikan manfaat pembangunan tersebut terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat (Ali & Son, 2007; Anand et al., 2013). Dalam konteks Indonesia, Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional menghadapi tantangan pembangunan berupa ketimpangan ekonomi antar wilayah yang tinggi, sehingga penting untuk memahami karakteristik wilayah secara spesifik agar kebijakan pembangunan yang inklusif dapat diterapkan secara tepat dan efektif (Kuncoro, 2018).

Secara teoritis, konsep pembangunan inklusif bertujuan mengintegrasikan aspek pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, kesempatan kerja, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur ekonomi dan dasar, serta akses yang luas terhadap layanan keuangan inklusif (World Economic Forum, 2017; McKinley, 2010). Integrasi aspek-aspek tersebut penting karena terbukti secara empiris bahwa pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa disertai distribusi manfaat yang merata dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi (Stiglitz, 2012; Ravallion, 2011).

Untuk menerapkan pendekatan inklusif ini dalam konteks spesifik kabupaten/kota di Pulau Jawa, maka penelitian ini mengadopsi pendekatan tipologi wilayah yang dikenal sebagai klasifikasi Klassen (Sjafrizal, 2012). Melalui pendekatan ini, seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa diklasifikasikan menjadi empat kelompok berdasarkan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Kelompok pertama adalah kabupaten/kota maju dan cepat tumbuh (kuadran I), kelompok kedua adalah kabupaten/kota maju tapi tertekan (kuadran II), kelompok ketiga adalah kabupaten/kota berkembang pesat (kuadran III), dan kelompok terakhir adalah kabupaten/kota relatif tertinggal (kuadran IV). Pemetaan karakteristik wilayah berdasarkan tipologi ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai pola dan determinan pembangunan inklusif pada setiap kelompok wilayah secara terukur dan spesifik.

Dalam setiap kelompok wilayah tersebut, penelitian ini secara eksplisit akan mengukur pengaruh sejumlah variabel utama terhadap terciptanya kondisi pembangunan ekonomi yang inklusif. Variabel-variabel tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, keuangan inklusif, harapan lama sekolah sebagai indikator kapabilitas manusia, tingkat kesempatan kerja,

ketimpangan pendapatan, serta ketersediaan infrastruktur ekonomi (jalan, listrik, pasar) dan infrastruktur dasar (air bersih, pendidikan, sanitasi) (Ali & Son, 2007; Calderón & Servén, 2004; Barro & Lee, 2013).

Dalam rangka mengukur inklusivitas pembangunan ekonomi secara lebih konkret dan terukur, penelitian ini akan menggunakan suatu instrumen komposit yaitu Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Konsep IPEI dari Bappenas ini merupakan sebuah kerangka pengukuran yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kapabilitas manusia, serta ketersediaan infrastruktur dasar dan ekonomi. Dalam penelitian ini, IPEI dari Bappenas akan disesuaikan secara spesifik dengan konteks wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa, sehingga menghasilkan gambaran empiris mengenai tingkat inklusivitas ekonomi di tiap daerah secara lebih akurat dan relevan dengan kondisi lokal (Bappenas, 2010). Berikut ini akan diuraikan variabel – variabel yang dalam disertasi ini diduga memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi inklusif.

1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara atau wilayah yang tercermin dari naiknya Produk Domestik Bruto (PDB) secara berkelanjutan. Pertumbuhan ini mengindikasikan peningkatan total output barang dan jasa dalam perekonomian dari waktu ke waktu (Todaro & Smith, 2020). Dalam konteks ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan suatu wilayah atau negara karena dianggap merefleksikan kemajuan dalam kapasitas produktif serta kesejahteraan ekonomi masyarakat secara agregat (Mankiw, 2019).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi inklusif, pertumbuhan ekonomi bukan hanya dipandang sebagai tujuan akhir pembangunan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata dan adil di tengah masyarakat. Menurut Ali dan Son (2007), pembangunan inklusif menekankan perlunya pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh

kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan. Meskipun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif tidak selalu linear. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap inklusivitas, tergantung pada kondisi struktur sosial-ekonomi dan kebijakan redistribusi yang diterapkan di masing-masing wilayah.

Dollar dan Kraay (2002) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan bervariasi, tergantung pada distribusi pendapatan awal. Secara umum, hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan bersifat positif dan signifikan, namun pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan tidak selalu signifikan.

Ali dan Son (2007) juga menemukan hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi di negara-negara Asia dan Afrika. Namun, dalam kondisi di mana ketimpangan pendapatan sangat tinggi, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap inklusivitas menjadi relatif lemah. Dengan kata lain, meskipun hubungan umumnya positif, signifikansi dampaknya dapat berkurang karena ketimpangan yang tinggi.

Penelitian Klasen (2010) mendukung temuan tersebut dengan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif dalam meningkatkan inklusivitas jika disertai kebijakan redistribusi pendapatan serta investasi sosial. Tanpa kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi saja cenderung tidak mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif secara signifikan.

Di Indonesia, penelitian Hartati (2021) menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi inklusif yang diukur menggunakan Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbukti mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan ketika dilakukan intervensi kebijakan yang tepat.

Secara umum, temuan-temuan penelitian sebelumnya konsisten bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi inklusif memiliki arah positif. Namun demikian, signifikansi dari pengaruh pertumbuhan terhadap inklusivitas sangat bergantung pada konteks kebijakan dan struktur

ekonomi di masing-masing wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang diperlukan, tetapi tidak otomatis menjamin inklusivitas tanpa kebijakan pendukung yang memastikan distribusi manfaat yang adil dan merata.

2) Pengaruh Presentase Penduduk Miskin terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, serta layanan kesehatan yang memadai (Todaro & Smith, 2020). Secara umum, kemiskinan sering kali diukur dengan indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu ambang batas pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan dianggap sebagai tujuan utama karena menjadi ukuran keberhasilan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat (Kakwani & Pernia, 2000).

Kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan semata, tetapi mencakup dimensi multidimensi yang melibatkan aspek kesehatan, pendidikan, akses terhadap infrastruktur dasar, serta kesempatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi (World Bank, 2018). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hubungan antara persentase penduduk miskin dengan pembangunan ekonomi inklusif adalah hubungan yang signifikan karena inklusivitas pembangunan secara implisit bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan. Dalam berbagai penelitian sebelumnya, variabel persentase penduduk miskin sering kali digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur tingkat inklusivitas suatu pembangunan.

Loayza dan Raddatz (2010), dalam penelitiannya di negara-negara berkembang Asia dan Amerika Latin, menemukan bahwa sektor-sektor yang padat karya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan persentase penduduk miskin. Pertumbuhan di sektor-sektor ini secara nyata memberikan

manfaat ekonomi langsung kepada kelompok miskin, mengindikasikan hubungan positif yang signifikan antara pengurangan kemiskinan dengan inklusivitas pembangunan ekonomi.

Selaras dengan temuan tersebut, penelitian Dollar dan Kraay (2002) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara umum memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mengurangi persentase penduduk miskin, meskipun tidak selalu berpengaruh langsung terhadap ketimpangan. Namun, penelitian ini menekankan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung lebih kuat dalam menurunkan kemiskinan ketika kondisi awal distribusi pendapatan di suatu wilayah relatif lebih merata.

Di sisi lain, penelitian Ravallion (2011) menyimpulkan bahwa ketimpangan yang rendah akan memperkuat pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan persentase penduduk miskin. Dengan demikian, kondisi awal ketimpangan memainkan peran penting dalam menentukan seberapa efektif pertumbuhan ekonomi berdampak positif dalam menurunkan kemiskinan dan menciptakan pembangunan yang inklusif. Dalam konteks Indonesia, Hartati (2021) juga menegaskan bahwa persentase penduduk miskin memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pencapaian pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah persentase penduduk miskin, maka semakin tinggi tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi yang dicapai suatu wilayah. Namun demikian, penelitian Ali dan Son (2007) menunjukkan bahwa hubungan antara penurunan persentase penduduk miskin dan pembangunan inklusif menjadi kurang signifikan jika ketimpangan di wilayah tersebut tinggi. Artinya, kebijakan yang semata-mata berfokus pada pengurangan angka kemiskinan tanpa mengatasi ketimpangan secara struktural mungkin tidak cukup untuk menghasilkan pembangunan yang inklusif secara signifikan

3. Pengaruh Modal Manusia atau Harapan Lama Sekolah Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif

Modal manusia merupakan konsep ekonomi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas yang dimiliki individu sebagai hasil investasi dalam pendidikan dan pelatihan, yang berkontribusi secara signifikan terhadap produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2020).

Dalam penelitian ini, modal manusia secara spesifik direpresentasikan melalui indikator harapan lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh seseorang sepanjang hidupnya. Harapan lama sekolah menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah karena mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki peluang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kapabilitas yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian

Modal manusia, yang diukur dengan harapan lama sekolah, memiliki hubungan yang erat dengan pencapaian pembangunan ekonomi inklusif karena pendidikan meningkatkan kapabilitas individu untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi serta memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi secara lebih efektif. Dengan pendidikan yang memadai, individu memiliki kapasitas lebih besar dalam meningkatkan produktivitas kerja, mengakses kesempatan kerja yang lebih baik, serta mengurangi risiko terjebak dalam kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi.

Penelitian Barro dan Lee (2013) menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan (yang tercermin dalam indikator seperti harapan lama sekolah) secara signifikan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Temuan ini didasarkan pada analisis data panel global yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi secara konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabil, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata di antara penduduknya.

Secara lebih spesifik dalam konteks inklusivitas, OECD (2019) menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan yang meningkatkan harapan lama sekolah memiliki dampak signifikan terhadap inklusivitas pembangunan ekonomi. Pendidikan yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja yang berkualitas, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan secara efektif.

Studi yang dilakukan oleh World Economic Forum (2017) juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam mendorong pembangunan inklusif. Menurut studi tersebut, negara-negara yang berhasil meningkatkan harapan lama sekolah

penduduknya cenderung lebih sukses dalam mencapai inklusivitas ekonomi, karena pendidikan yang tinggi secara signifikan meningkatkan kapabilitas individu untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.

Di negara-negara berkembang, penelitian yang dilakukan Loayza dan Raddatz (2010) menekankan bahwa peningkatan modal manusia melalui pendidikan sangat efektif dalam menurunkan kemiskinan, karena pendidikan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam sektor-sektor ekonomi yang produktif, terutama sektor padat karya. Dalam konteks Indonesia, Hartati (2021) menemukan bahwa modal manusia, khususnya melalui indikator harapan lama sekolah, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini memperkuat bahwa pendidikan merupakan salah satu variabel kunci yang harus diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan ekonomi untuk menciptakan kondisi inklusif secara nyata dan berkelanjutan.

4. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif

Inklusi keuangan merupakan kondisi di mana seluruh individu atau kelompok masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan formal, seperti tabungan, kredit, asuransi, serta layanan pembayaran dan transfer, yang disediakan oleh lembaga keuangan resmi secara terjangkau, aman, dan nyaman (World Bank, 2018). Konsep ini menekankan pentingnya akses universal terhadap layanan keuangan formal sebagai salah satu sarana pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi kelompok miskin, marjinal, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang sebelumnya belum tersentuh oleh sistem keuangan formal (Beck et al., 2014).

Inklusi keuangan memiliki hubungan erat dan langsung dengan pembangunan ekonomi inklusif, karena akses terhadap layanan keuangan formal secara luas memberikan peluang ekonomi yang lebih besar kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya terpinggirkan secara ekonomi. Melalui akses tersebut, masyarakat bisa mengelola pendapatan secara lebih baik, melakukan investasi produktif, membangun aset ekonomi, serta mengurangi risiko keuangan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Beck et al. (2014) menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap inklusivitas pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Studi ini menemukan bahwa peningkatan akses terhadap produk keuangan seperti kredit mikro, tabungan, dan asuransi secara nyata meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan perempuan, hingga sebesar 20 persen lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan inklusi keuangan rendah.

Lebih lanjut, studi oleh Ostry et al. (2014) juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pengurangan ketimpangan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika akses terhadap layanan keuangan semakin luas, maka masyarakat miskin dan berpendapatan rendah memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam perekonomian secara aktif, sehingga mampu meningkatkan pendapatan serta mengurangi ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan.

Di samping itu, penelitian yang dilakukan World Economic Forum (2017) menegaskan bahwa negara-negara dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi secara konsisten menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam indeks pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan secara langsung menciptakan iklim yang mendukung pemerataan ekonomi dan stabilitas sosial, yang pada akhirnya memperkuat fondasi pembangunan inklusif.

Dalam konteks regional di Asia dan Afrika, Ali dan Son (2007) menemukan bahwa akses ke layanan keuangan formal sangat memengaruhi inklusivitas pembangunan. Namun demikian, signifikansi hubungan ini dapat menurun ketika ketimpangan ekonomi sangat tinggi atau ketika infrastruktur pendukung seperti pendidikan dan infrastruktur dasar masih terbatas.

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan Hartati (2021) juga memperlihatkan bahwa peningkatan inklusi keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat inklusi keuangan yang dicapai suatu wilayah, semakin inklusif pula pembangunannya ekonominya

5. Pengaruh Tingkat Kesempatan Kerja terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tingkat kesempatan kerja merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana tenaga kerja tersedia dan terserap dalam pasar tenaga kerja melalui lapangan pekerjaan yang tersedia. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi ditandai dengan tingkat pengangguran yang rendah, yang berarti sebagian besar angkatan kerja aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Todaro & Smith, 2020). Kesempatan kerja bukan hanya berkaitan dengan kuantitas pekerjaan, tetapi juga kualitasnya—yakni sejauh mana pekerjaan tersebut memberikan penghasilan yang layak, stabil, serta akses terhadap berbagai manfaat sosial (ILO, 2018).

Kesempatan kerja memiliki hubungan erat dan langsung dengan pembangunan ekonomi inklusif karena melalui penciptaan lapangan kerja produktif, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat secara nyata dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan instrumen kunci dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam perekonomian, sekaligus menjadi saluran utama distribusi manfaat ekonomi secara merata (OECD, 2019).

Penelitian oleh International Labour Organization (ILO, 2018) menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang memadai secara signifikan berdampak positif terhadap inklusivitas pembangunan ekonomi. Penciptaan lapangan kerja berkualitas dapat meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok-kelompok rentan, seperti kaum muda, perempuan, dan masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Demikian pula, OECD (2019) dalam laporannya menegaskan bahwa kebijakan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja secara signifikan mampu memperkuat inklusivitas pembangunan di negara-negara maju. Penelitian ini menemukan bahwa kesempatan kerja yang luas dan merata tidak hanya meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga secara langsung mengurangi ketimpangan dan memperkuat stabilitas sosial-ekonomi.

Loayza dan Raddatz (2010), melalui studi empiris di negara-negara berkembang Asia dan Amerika Latin, menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara kesempatan kerja di sektor-sektor padat karya dengan pengurangan kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa penciptaan kesempatan kerja di sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara besar-besaran secara nyata meningkatkan inklusivitas pembangunan dengan mengurangi jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2021) juga menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kesempatan kerja memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pencapaian pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika semakin tinggi tingkat kesempatan kerja yang tersedia, inklusivitas pembangunan ekonomi akan semakin meningkat karena lebih banyak masyarakat yang memiliki akses langsung terhadap manfaat pembangunan ekonomi.

Sebaliknya, ketika kesempatan kerja rendah, ketimpangan ekonomi cenderung meningkat karena manfaat pertumbuhan ekonomi hanya terdistribusi kepada sebagian kecil masyarakat yang memiliki akses terhadap pekerjaan yang memadai. Hal ini sesuai dengan temuan Stiglitz (2012) yang menyatakan bahwa keterbatasan kesempatan kerja cenderung memperparah ketimpangan ekonomi dan melemahkan efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan inklusivitas.

6. Pengaruh Ketimpangan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif

Ketimpangan dalam konteks ekonomi merujuk pada kondisi di mana distribusi pendapatan, kekayaan, atau kesempatan dalam masyarakat berlangsung secara tidak merata. Ketimpangan sering kali diukur dengan indikator statistik seperti indeks Gini, yang mencerminkan sejauh mana pendapatan atau sumber daya ekonomi terkonsentrasi di tangan kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain (Todaro & Smith, 2020). Tingkat ketimpangan yang tinggi menunjukkan disparitas yang besar antara kelompok kaya dengan kelompok miskin, yang mengindikasikan adanya kelompok masyarakat yang tidak menikmati secara proporsional manfaat pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ketimpangan ini dianggap sebagai tantangan utama bagi pembangunan ekonomi

yang inklusif, karena dapat memperlemah efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Stiglitz, 2012).

Ketimpangan memiliki hubungan yang kuat dengan pembangunan ekonomi inklusif, di mana semakin tinggi tingkat ketimpangan, semakin sulit pula pencapaian pembangunan ekonomi inklusif. Ketimpangan yang tinggi cenderung membatasi akses kelompok masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja produktif, sehingga mempersempit peluang mereka untuk meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Sebaliknya, semakin rendah ketimpangan, semakin besar pula peluang tercapainya pembangunan ekonomi inklusif, karena manfaat pertumbuhan ekonomi dapat lebih mudah tersebar secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat (Ravallion, 2011).

Penelitian Stiglitz (2012) menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kondisi ketidakstabilan sosial. Menurut studi tersebut, ketimpangan yang tinggi memperlemah mekanisme distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan gagal menciptakan inklusivitas yang sesungguhnya.

Senada dengan itu, penelitian Ravallion (2011) menemukan bahwa negara-negara dengan ketimpangan ekonomi yang rendah cenderung lebih efektif dalam mentransmisikan manfaat pertumbuhan ekonomi kepada kelompok masyarakat miskin, sehingga mampu secara nyata mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi inklusif. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam rangka meningkatkan inklusivitas pembangunan.

Bourguignon (2004) juga menemukan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi memiliki dampak negatif terhadap pengurangan kemiskinan dan efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan kondisi pembangunan inklusif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi cenderung memperlambat proses pengentasan kemiskinan serta mengurangi manfaat yang diperoleh masyarakat miskin dari pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Ostry et al. (2014) menyatakan bahwa redistribusi pendapatan yang moderat, yang bertujuan menurunkan tingkat ketimpangan, secara signifikan mampu meningkatkan inklusivitas pembangunan tanpa secara negatif mempengaruhi produktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang secara aktif menurunkan ketimpangan dapat memperkuat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif. Dalam konteks Indonesia, Hartati (2021) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan pembangunan ekonomi inklusif. Studi ini menegaskan bahwa semakin tinggi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, semakin rendah pula tingkat inklusivitas pembangunan ekonominya.

7. Pengaruh Infrastruktur Ekonomi (rasio panjang jalan dalam kondisi baik) terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif

Infrastruktur ekonomi mengacu pada sarana fisik dan fasilitas yang menjadi pendukung utama aktivitas ekonomi, seperti jalan raya, jembatan, jaringan listrik, pelabuhan, bandara, jaringan telekomunikasi, dan berbagai fasilitas logistik lainnya yang secara langsung menunjang produksi serta distribusi barang dan jasa dalam suatu wilayah atau negara (Calderón & Servén, 2004). Infrastruktur ekonomi dianggap sebagai prasyarat esensial untuk aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, karena keberadaannya mampu menurunkan biaya produksi, mempercepat mobilitas barang, jasa, serta tenaga kerja, serta meningkatkan aksesibilitas pasar yang lebih luas (Todaro & Smith, 2020). Secara teoritis, pembangunan infrastruktur ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas ekonomi, efisiensi pasar, serta daya saing suatu wilayah, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta merata manfaatnya (World Economic Forum, 2017).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi inklusif, infrastruktur ekonomi memegang peranan kunci, karena tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga memastikan manfaat pertumbuhan tersebut merata dan dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya terisolasi atau kurang mendapat manfaat (OECD, 2018).

Penelitian Calderón dan Servén (2004) menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur ekonomi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perbaikan dan peningkatan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi secara langsung memperluas akses ekonomi masyarakat ke pasar yang lebih luas, serta meningkatkan pendapatan kelompok marjinal secara signifikan, sehingga tercipta distribusi manfaat ekonomi yang lebih inklusif.

Hasil penelitian Ghani dan Kanbur (2012) di negara-negara Asia Selatan juga menegaskan hubungan positif yang signifikan antara pembangunan infrastruktur ekonomi, khususnya infrastruktur jalan, dengan pembangunan inklusif. Studi ini menemukan bahwa perbaikan kondisi jalan secara nyata meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, pasar kerja, serta kegiatan ekonomi produktif lainnya, sehingga dapat mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif di wilayah-wilayah terpencil.

Secara spesifik, penelitian Banerjee et al. (2017) di India menemukan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan memberikan dampak positif signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, karena meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan akses pasar secara langsung mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Penelitian ini menguatkan temuan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi merupakan prasyarat penting bagi pencapaian pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan.

Dalam konteks negara maju, studi OECD (2018) menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur ekonomi secara positif dan signifikan berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya memperkuat pemerataan manfaat ekonomi dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa peran infrastruktur ekonomi dalam menciptakan pertumbuhan inklusif tidak hanya relevan bagi negara berkembang, tetapi juga penting bagi negara-negara maju. Di sisi lain, World Economic Forum (2017) dalam laporannya juga menegaskan pentingnya infrastruktur ekonomi sebagai faktor pendorong utama pembangunan inklusif, dengan menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki kualitas infrastruktur ekonomi yang baik cenderung mampu mempercepat

terciptanya kondisi pembangunan inklusif secara lebih efektif dibanding negara-negara yang infrastrukturnya tertinggal.

8. Pengaruh Infrastruktur Dasar (rumah tangga dengan sumber air minum bersih) terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif

Infrastruktur dasar merujuk pada fasilitas fundamental yang secara langsung mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap air minum bersih, sanitasi layak, layanan kesehatan dasar, dan pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, infrastruktur dasar secara khusus didefinisikan sebagai tersedianya akses terhadap sumber air minum bersih yang layak bagi rumah tangga. Akses terhadap air minum bersih adalah salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia karena secara langsung memengaruhi kondisi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat (WHO, 2019).

Penyediaan akses terhadap air minum bersih memiliki hubungan langsung yang signifikan dengan pembangunan ekonomi inklusif. Infrastruktur dasar ini tidak hanya meningkatkan kesehatan individu, tetapi juga memiliki efek multiplier terhadap produktivitas ekonomi serta kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Ketika rumah tangga memiliki akses yang baik terhadap air bersih, waktu dan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk mendapatkan air bersih dapat dialihkan pada aktivitas produktif seperti pendidikan dan pekerjaan yang memberikan penghasilan, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian Hutton dan Haller (2004) yang dilakukan di berbagai wilayah miskin secara global menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap air minum bersih memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dengan menurunkan prevalensi penyakit yang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih hingga 40 persen. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa peningkatan akses air bersih memiliki efek positif langsung terhadap produktivitas tenaga kerja karena mengurangi angka absensi akibat penyakit dan meningkatkan kapasitas kerja individu. Dengan demikian, akses terhadap air bersih tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Penelitian Calderón dan Servén (2004) juga menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur dasar seperti air bersih memberikan dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan di negara-negara berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap fasilitas dasar ini memungkinkan masyarakat, terutama kelompok miskin, untuk memiliki peluang lebih baik dalam aktivitas ekonomi produktif, sehingga manfaat pembangunan menjadi lebih merata.

World Economic Forum (2017) dalam laporan pembangunan inklusifnya juga menemukan bahwa negara-negara yang memiliki kualitas infrastruktur dasar, termasuk akses terhadap air minum bersih yang lebih baik, cenderung mencapai skor inklusivitas pembangunan yang lebih tinggi. Temuan ini menggarisbawahi bahwa penyediaan air bersih secara signifikan mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas.

Dalam konteks regional Asia dan Afrika, penelitian Ali dan Son (2007) menyatakan bahwa infrastruktur dasar seperti air minum bersih merupakan variabel kunci dalam menciptakan kondisi pembangunan inklusif yang signifikan. Mereka menekankan bahwa peningkatan akses infrastruktur dasar ini memberikan peluang nyata bagi masyarakat miskin untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian secara produktif. Di Indonesia, temuan Hartati (2021) menunjukkan bahwa tersedianya infrastruktur dasar seperti air minum bersih berhubungan positif dan signifikan dengan peningkatan pencapaian indeks pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini menguatkan bahwa peningkatan akses terhadap air bersih merupakan elemen penting yang harus dipenuhi dalam kebijakan pembangunan yang bertujuan inklusivitas.

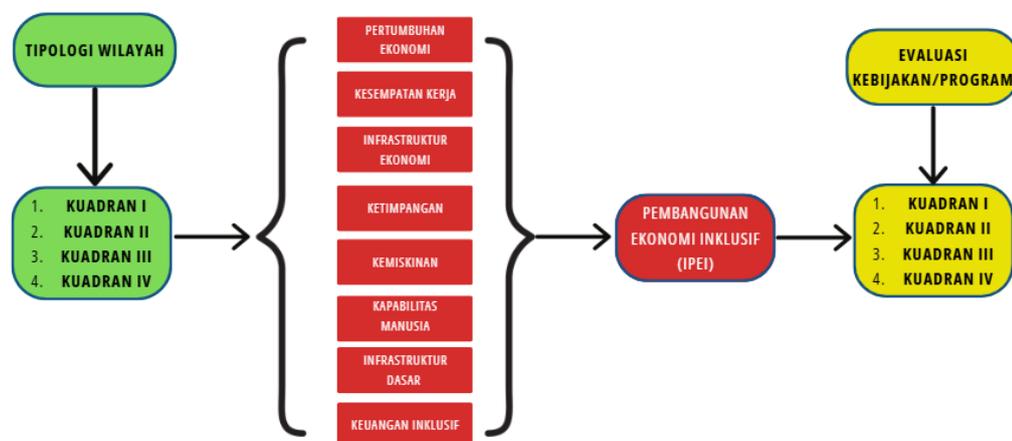
Kemudian dapat dipahami bahwa setiap wilayah memiliki potensi, tantangan, serta karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda-beda (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, pendekatan pembangunan ekonomi inklusif yang universal tanpa mempertimbangkan karakteristik wilayah cenderung tidak efektif. Untuk memastikan kebijakan pembangunan inklusif tepat sasaran, analisis harus mencakup pemetaan karakteristik wilayah agar dapat mengenali keunikan potensi dan kendala lokal secara akurat (Kuncoro, 2013).

Analisis yang memperhitungkan pemetaan karakteristik wilayah memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi, efisien, dan efektif (Arsyad, 2015). Dengan demikian, sumber daya dapat dialokasikan secara optimal sesuai kebutuhan spesifik setiap wilayah, meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah dan swasta dalam mengurangi kesenjangan dan mendorong pembangunan inklusif secara nyata (McKinley, 2010).

Model tipologi Klassen merupakan salah satu metode pemetaan wilayah yang efektif dalam menganalisis pembangunan inklusif. Model ini membagi wilayah menjadi empat kategori berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita (Mahi, 2016). Pemilihan model ini relevan karena memungkinkan analisis kebijakan yang spesifik sesuai kebutuhan wilayah, seperti wilayah berkembang pesat yang memerlukan strategi pemerataan, wilayah maju yang membutuhkan inovasi berkelanjutan, atau wilayah tertinggal yang memerlukan intervensi khusus (Klassen, 1965 dalam Sjafrizal, 2008).

Analisis spasial yang menyeluruh akan membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk tidak hanya memahami kondisi aktual di berbagai wilayah, tetapi juga memprediksi dan mengantisipasi tren pembangunan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan inklusif menjadi lebih tanggap terhadap perubahan kondisi lokal dan global, sehingga mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (World Bank, 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka dalam disertasi ini disusun kerangka alur pemikiran sebagai berikut :



Gambar 8. Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, maka hipotesis pada disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) Terhadap IPEI

Menurut Todaro dan Smith dalam buku mereka *Economic Development* (2015), pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pembangunan inklusif. Todaro dan Smith menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, yang semuanya merupakan komponen penting dari pembangunan inklusif. Ketika ekonomi tumbuh, sektor-sektor seperti manufaktur, jasa, dan konstruksi cenderung berkembang, membuka lebih banyak peluang kerja formal yang stabil dan produktif. Hal ini membantu individu di sektor informal atau mereka yang menganggur untuk memasuki pasar tenaga kerja yang lebih terstruktur, meningkatkan pendapatan mereka, dan mendorong mobilitas sosial. Dengan demikian hipotesis pertama penelitian ini adalah :

H₁ : Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif Terhadap IPEI

2. Pengaruh Kemiskinan (PM) terhadap IPEI

Kemiskinan memiliki hubungan negatif dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif karena membatasi partisipasi ekonomi, memperbesar kesenjangan, dan melemahkan permintaan domestik. Todaro dan Smith (*Economic Development*, 2015) menjelaskan bahwa kemiskinan menghambat kelompok miskin untuk mengakses sumber daya produktif, seperti pendidikan, modal usaha, dan pelatihan kerja. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja mereka menurun, kesenjangan ekonomi semakin melebar, dan kemampuan untuk berkontribusi dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif menjadi terbatas. Dengan demikian hipotesis kelima penelitian ini adalah :

H₂ : Kemiskinan Berpengaruh Negatif Terhadap IPEI

3. Pengaruh Modal Manusia (MM) terhadap IPEI

Harapan lama sekolah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan meningkatkan kapabilitas individu,

produktivitas, mobilitas sosial, dan kesadaran keberlanjutan. Investasi dalam sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

H₃ : Modal Manusia Berpengaruh Positif Terhadap IPEI

4. Pengaruh Keuangan Inklusi (KI) terhadap IPEI

Inklusi keuangan yang dalam penelitian ini digambarkan melalui indikator jumlah kredit rumah tangga memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Akses terhadap layanan keuangan memungkinkan masyarakat miskin untuk menabung dan berinvestasi pada kegiatan ekonomi produktif seperti pendidikan dan kegiatan wirausaha yang memungkinkan masyarakat untuk keluar dari poverty trap (Demirguc-Kunt dan Klapper, 2013), terutama bagi perempuan miskin (Swamy, 2014). Dengan demikian hipotesis keenam penelitian ini adalah :

H₄ : Inklusi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap IPEI

5. Pengaruh Kesempatan Kerja (KK) Terhadap IPEI

Kesempatan kerja berperan penting dalam mendukung Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan menciptakan akses ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (*Economic Development*, 2015), penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor formal, membantu masyarakat miskin meningkatkan pendapatan, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat daya beli. Selain itu, pekerjaan yang layak mendukung pembangunan modal manusia melalui akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian ini adalah :

H₅ : Kesempatan Kerja Berpengaruh Positif Terhadap IPEI

6. Pengaruh Ketimpangan (GINI) Terhadap IPEI

Ketimpangan pendapatan dan kekayaan membatasi akses kelompok miskin terhadap pendidikan, pelatihan, modal usaha, dan pekerjaan berkualitas, sehingga menghambat mobilitas sosial dan ekonomi mereka. Kondisi ini membuat peluang mereka untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas. Todaro dan Smith (*Economic Development*, 2015) menegaskan bahwa

ketimpangan ini mengurangi kemampuan masyarakat miskin untuk memanfaatkan sumber daya produktif, memperburuk kesenjangan sosial, dan melemahkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif karena manfaat pembangunan hanya dinikmati oleh kelompok kaya.. Dengan demikian hipotesis keempat penelitian ini adalah :

H₆ : Ketimpangan Berpengaruh Negatif Terhadap IPEI

7. Pengaruh Infrastruktur Jalan (INF_J) Terhadap IPEI

Calderón dan Servén dalam studi mereka *The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution* (2004), peningkatan infrastruktur memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan. Mereka menekankan bahwa aksesibilitas yang merata terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan dan energi, sangat penting untuk mendukung pembangunan yang inklusif. Infrastruktur yang baik membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sehingga menciptakan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat.. Dengan demikian hipotesis ketiga penelitian ini adalah :

H₇ : Infrastruktur Jalan Berpengaruh Positif Terhadap IPEI

8. Infrastruktur Sanitasi (INF_S) terhadap IPEI

Air minum bersih memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Menurut penelitian Hutton dan Haller dalam *Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements* (2004), akses rumah tangga terhadap air bersih secara signifikan mengurangi risiko penyakit menular seperti diare dan kolera. Dengan kesehatan yang lebih baik, individu, terutama pekerja dan anak-anak, dapat beraktivitas secara produktif di tempat kerja dan sekolah. Hal ini mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Dengan demikian hipotesis ketujuh penelitian ini adalah :

H₈ : Infrastuktur Sanitasi Berpengaruh Positif Terhadap IPEI

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Harapan Lama Sekolah, Rasio Jumlah Rekening Kredit UMKM terhadap jumlah total rekening, Tingkat Kesempatan Kerja, Ketimpangan, Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik serta Rasio Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih tersebut dapat mempengaruhi indeks pembangunan ekonomi inklusif pada berbagai karakteristik wilayah menggunakan tipologi klassen. Kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang saat ini dilakukan pemerintah kemudian memberikan rekomendasi kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan inklusif dan berkelanjutan pada berbagai karakteristik wilayah.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pengukuran variabel-variabel penelitian. Operasionalisasi variabel untuk menentukan jenis indikator, serta skala dan variabel – variabel yang terkait. variabel merujuk pada karakteristik atau atribut seseorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau diobservasi. Variabel-variabel bebas (*independent variables*) merupakan variabel-variabel yang (mungkin) menyebabkan, mempengaruhi, atau berefek pada *outcome* (Creswell, 2014). Penelitian ini terdiri dari variabel terikat (*dependent variabel*) dan variabel tidak terikat (*independent variabel*) yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Variabel terikat (*dependent variabel*) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan inklusif yang di representasikan oleh nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang di terbitkan oleh Bappenas;

2. Variabel bebas (*Independent variabel*) dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi (PE), Penduduk Miskin (PM), Modal Manusia (MM) Keuangan Inklusif (KI), Kesempatan Kerja (KK), Ketimpangan Gini (GINI) Infrastruktur Jalan (INF_JLN) dan Infrastruktur Sanitasi (INF_S).

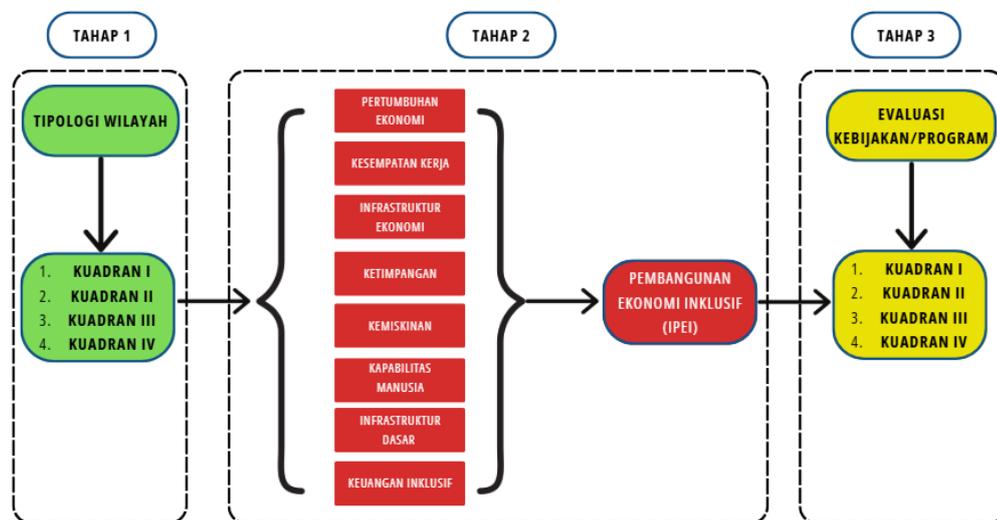
Tabel 1. Variabel dan Deskripsi Operasional Variabel

NO	Variabel	Simbol	Satuan	Deskripsi Operasional Variabel	Penelitian Sebelumnya
1	Indeks Pertumbuhan Inklusif	IPEI	Indeks	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. IPEI mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. IPEI diukur dalam tiga kelompok. 1. Skala 1-3 kurang memuaskan 2. Skala 4-7 memuaskan 3. Skala 8-10 sangat memuaskan.	Klasen (2010); Hartati (2021); Niken Prabandari (2018); Sholihah (2014) dan Azwar (2016).
2	Pertumbuhan ekonomi	PE	Persen (%)	Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam pertumbuhan PDB Rill perkapita	Rauniyar (2010); Stiglitz (2012); Bourguignon(2003); Piketty (2014).
3	Persentase penduduk miskin	PM	Persen (%)	proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi dalam suatu wilayah, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator pengukuran dapat mencakup pengeluaran per kapita, tingkat konsumsi minimum, serta standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional.	Demirgüç-Kunt et al. (2017); Cornia dan Court (2001); Ramadhan (2023); Fadillah (2021);
4	Modal Manusia	MM	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	Niken Prabandari (2018); Azwar (2016); Oluwatosin Adeniyi et al. (2020); Gyimah-Brempong et al. (2006); Jalil dan Idrees (2013); serta Oyinyela dan Adediji (2017)
5	Keuangan Inklusif	KI	Persen (%)	Inklusi keuangan atau keuangan inklusif adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Keuangan inklusif di dalam penelitian ini dinyatakan dalam Rasio Jumlah Rekening Kredit UMKM terhadap Rekening Kredit;.	''''''
6	Kesempatan Kerja	KK	Persen (%)	Persentase penduduk bekerja dengan jam kerja ≥ 35 jam perminggu , tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja dalam suatu wilayah atau sektor tertentu, yang dapat	Nurudeen & Usman, (2010); Bakare & Sanmi, (2011); Sghari & Hammami, (2013);

NO	Variabel	Simbol	Satuan	Deskripsi Operasional Variabel	Penelitian Sebelumnya
				diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, jumlah lowongan kerja yang tersedia, serta rasio pekerja terhadap populasi produktif.	Olure-Bank & Usman, (2018); Tolmacheva, (2020); Ayyagari et al. (2014); Guo et al. (2015); Leshoro (2013); Hong dan Wenqin (2012); Jajri dan Ismail (2010); dan Mcmilan dan Rodrik (2011)
7	Ketimpangan Pendapatan	GINI	INDEKS	Rasio gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai Indeks Gini mendekati 1, maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna	Stiglitz (2012); Piketty (2014); Barro (2000); Aghion (1999); Rajan (2010);
8	Infrastruktur Ekonomi Jalan	INF_J	Persen (%)	Rasio panjang jalan dalam kondisi baik pada setiap wilayah, masuk dalam kategori layak dan baik dalam akses	Hong et al. (2011), Stéphane dan Akiko (2011), Gibson dan Olivia (2009), serta Shi et al. (2017).
9	Infrastruktur Sanitasi	INF_s	Persen (%)	Infrastruktur dasar di representasikan melalui persentase jumlah rumah tangga dengan sumber air minum bersih	Hutton dan Haller, 2004; Prüss-Ustün et al. 2008;

3.3 Tahapan Penelitian

Dalam disertasi ini disusun tahapan penelitian sebagaimana gambar berikut.



Gambar 9. Tahapan Penelitian

Gambar 9 di atas menyajikan alur kerangka berpikir yang akan dilakukan pada disertasi ini. Analisa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

dilakukan dalam tiga tahapan utama yang saling berkaitan. Alur ini dimulai dari klasifikasi tipologi wilayah berdasarkan pendekatan Tipologi Klassen, dilanjutkan dengan identifikasi variabel-variabel penentu pembangunan inklusif, dan diakhiri dengan perumusan kebijakan spesifik untuk masing-masing kuadran wilayah. Secara konseptual, pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap karakteristik lokal, sehingga pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Tahap pertama merupakan proses klasifikasi wilayah ke dalam empat kuadran berdasarkan kombinasi antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita. Kuadran I mencerminkan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi, yang biasanya menunjukkan struktur ekonomi yang relatif matang dan sektor unggulan yang berkembang pesat. Kuadran II menggambarkan daerah dengan pendapatan tinggi namun pertumbuhan yang rendah, yang bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang stagnan meskipun secara historis memiliki sumber daya ekonomi besar. Sebaliknya, Kuadran III terdiri atas daerah yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cepat tetapi dengan pendapatan yang masih relatif rendah, biasanya karena basis ekonomi yang masih dalam tahap transformasi. Sementara itu, Kuadran IV menandakan wilayah yang mengalami stagnasi baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kesejahteraan, yang umumnya menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan memerlukan intervensi pembangunan yang menyeluruh.

Tahap kedua dalam kerangka ini merupakan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat pembangunan ekonomi inklusif di masing-masing wilayah. Faktor-faktor tersebut mencakup dimensi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta dimensi struktural seperti infrastruktur ekonomi, kapabilitas manusia, dan kemiskinan. Dalam literatur ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih menjadi syarat penting bagi terwujudnya kesejahteraan, namun pertumbuhan tersebut harus inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Kesempatan kerja menjadi salah satu kanal utama bagi

distribusi hasil pembangunan karena membuka jalan bagi partisipasi produktif masyarakat dalam aktivitas ekonomi (Ali & Son, 2007). Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi dan dasar seperti jalan, sanitasi, serta layanan publik lainnya memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas, efisiensi, serta akses masyarakat terhadap pasar dan layanan sosial (Calderón & Servén, 2010). Faktor ketimpangan dan kemiskinan menjadi indikator penting yang menunjukkan apakah pertumbuhan bersifat menyeluruh atau hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tertentu. Untuk itu, analisis kapabilitas manusia, seperti tingkat pendidikan dan kesehatan, serta akses terhadap sistem keuangan yang inklusif menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas pembangunan (Sen, 1999; UNDP, 2022). Keseluruhan variabel ini membentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI) yang mengukur tingkat keberhasilan suatu daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Tahap ketiga adalah proses perumusan kebijakan berbasis hasil analisis tipologi wilayah dan determinan pembangunan inklusif. Kebijakan yang diambil pada tahap ini harus bersifat kontekstual, disesuaikan dengan posisi wilayah dalam klasifikasi Klassen. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program untuk memperkuat inklusivitas ekonomi di seluruh wilayah, beberapa di antaranya telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap IPEI.

Berbagai program nasional di Indonesia dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan pendekatan sektoral dan spasial yang beragam. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, khususnya di wilayah dengan keterbatasan inklusi keuangan. Wulandari dan Kassim (2016) mencatat bahwa KUR secara signifikan meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku UMKM di daerah nonperkotaan. Program Kartu Prakerja, yang mulai diterapkan pada tahun 2020, berfungsi sebagai program perlindungan sosial sekaligus peningkatan keterampilan kerja. Afrianita dan Putri (2022) menunjukkan efektivitas program ini dalam meningkatkan keterampilan dan akses kerja, terutama di wilayah dengan tingkat kesempatan kerja yang rendah (Kuadran II dan IV).

Dalam konteks pembangunan infrastruktur dasar, Program PAMSIMAS terbukti meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di perdesaan. Yuniarti dan Irawan (2019) menegaskan bahwa program ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial, memberikan bantuan bersyarat untuk rumah tangga miskin. Penelitian oleh Hastuti et al. (2018) menunjukkan bahwa PKH meningkatkan partisipasi pendidikan dan akses layanan kesehatan, yang krusial dalam membangun kapabilitas masyarakat miskin di wilayah tertinggal.

Di sektor pendidikan vokasional, Program SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Rosyid (2021) mencatat bahwa program ini mampu meningkatkan kesiapan kerja lulusan dan menurunkan ketidaksesuaian keterampilan (skills mismatch), terutama di wilayah dengan pertumbuhan tinggi namun kualitas SDM yang rendah (Kuadran III).

Kebijakan Inpres Jalan Daerah merupakan instrumen penting dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Penelitian oleh Azaki dan Lutfi (2023) menunjukkan bahwa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk sektor jalan memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti perlunya penajaman sasaran prioritas, pemilihan daerah penerima, dan kerangka penganggaran jangka menengah yang lebih efektif untuk mencapai efisiensi alokatif yang optimal. Selain itu, harmonisasi regulasi dan pembenahan struktur belanja daerah menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

3.4 Metode Analisis Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi (PE), Penduduk Miskin (PM), Modal Manusia (MM) Keuangan Inklusif (KI), Kesempatan Kerja (KK), Ketimpangan Gini (GINI) Infrastruktur Jalan (INF_JLN) dan Infrastruktur Sanitasi (INF_S) pada berbagai karakteristik wilayah pada Kabupaten/Kota di pulau Jawa serta analisa evaluasi dan rekomendasi kebijakan

dan program dalam mendorong pembangunan inklusif akan digunakan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta media publikasi lainnya.

Penelitian ini akan menganalisis seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa yaitu sebanyak 119 Kabupaten/Kota. Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu (*time series*) pada periode 2019 – 2023 dan data silang (*cross section*). Adapun tahapannya yaitu: 1) Analisis Deskriptif, dan 2) Analisis Ekonometrika. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Ke mudian untuk melakukan

3.4.1 Analisa Deskriptif

Analisa deskriptif yang digunakan diantaranya adalah Analisa Tipologi Klassen dan Analisa GIS (*Geographic Information System*).

A. Tipologi Klassen

Pada disertasi ini dilakukan pembagian wilayah Kabupaten/kota yang ada di pulau Jawa sebagaimana kriteria pada tipologi klassen. Analisis Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing suatu wilayah (Sjafrizal, 2008). Tipologi klassen pada dasarnya membagi wilayah berdasarkan indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), (2) daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), (3) daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) dan (4) daerah relatif tertinggal (*low growth but low income*) (Soepono, 1993; Kuncoro dan Aswandi, 2002; dan Radianto 2003).

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tipologi ini diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat hasil analisis. (Sjafrizal, 2008), Klasifikasi Tipologi Klassen berdasarkan pendekatan sektoral adalah sebagai berikut:

B. *Geographic Information System (GIS)*

Geographic Information System (GIS) merupakan alat analisis spasial yang efektif untuk menjelaskan tipologi Klassen. Dengan GIS, karakteristik ekonomi wilayah yang diklasifikasikan menurut tipologi Klassen (pertumbuhan tinggi-rendah dan pendapatan tinggi-rendah) dapat dipetakan secara visual. Hal ini mempermudah pengambil kebijakan dalam mengidentifikasi wilayah yang memerlukan intervensi pembangunan secara lebih tepat sasaran (Kuncoro, 2018; Supriyadi & Rustiadi, 2019). GIS membantu mengintegrasikan data ekonomi dengan data geografis, sehingga pola spasial pertumbuhan inklusif dapat dikenali dengan jelas.

Tahapan GIS dapat diuraikan menjadi beberapa rangkaian subsistem sebagai berikut :

1. *Data Input*: sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Sub-sistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format (*native*) yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang bersangkutan .
2. *Data Output* : sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran (termasuk mengekspornya ke format yang dikehendaki) seluruh atau sebagian basis data (spasial) baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* seperti halnya tabel, grafik, *report*, peta, dan lain sebagainya .
3. *Data Management*: sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau di-*retrieve* (di-*load* ke memori), di-*update*, dan di-*edit* .

4. *Data Manipulation & Analysis*: sub-sistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, sub-sistem ini juga melakukan manipulasi (evaluasi dan penggunaan fungsi-fungsi dan operator matematis & logika) dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.

Metode ini digunakan sebagai citra gambaran umum pemetaan setiap wilayah sebaran pertumbuhan inklusif dan kemiskinan di setiap daerah, dalam rangka memberikan gambaran nilai pada setiap wilayah. Pemetaan ini dilakukan juga sebagai dasar untuk melihat perkembangan pertumbuhan inklusif pada setiap waktu pada wilayah penelitian.

3.4.2 Analisis Kuantitatif : Regresi Linier Berganda (OLS) Data Panel

Penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan untuk mengetahui hubungan Pertumbuhan Ekonomi (PE), Penduduk Miskin (PM), Modal Manusia (MM) Keuangan Inklusif (KI), Kesempatan Kerja (KK), Ketimpangan Gini (GINI) Infrastruktur Jalan (INF_JLN) dan Infrastruktur Sanitasi (INF_S) terhadap pertumbuhan inklusif (IPEI) pada beberapa karakteristik wilayah menggunakan tipologi klasen di kuadaran 1, II, III dan IV. Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh individual dari variabel-variabel bebas dalam model terhadap variabel dependennya. Dengan melakukan pengujian ini nilai-nilai statistik setiap variabel bebas. Berikut adalah model yang terbentuk. Adapun modelnya adalah sebagai berikut :

$$IPEI_{(1-IV)it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{(1-IV)it} + \beta_2 PM_{(1-IV)it} + \beta_3 MM_{(1-IV)it} + \beta_4 KI_{(1-IV)it} + \beta_5 KK_{(1-IV)it} + \beta_6 GINI_{(1-IV)it} + \beta_7 INF_{J(1-IV)it} + \beta_8 INF_{S(1-IV)it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

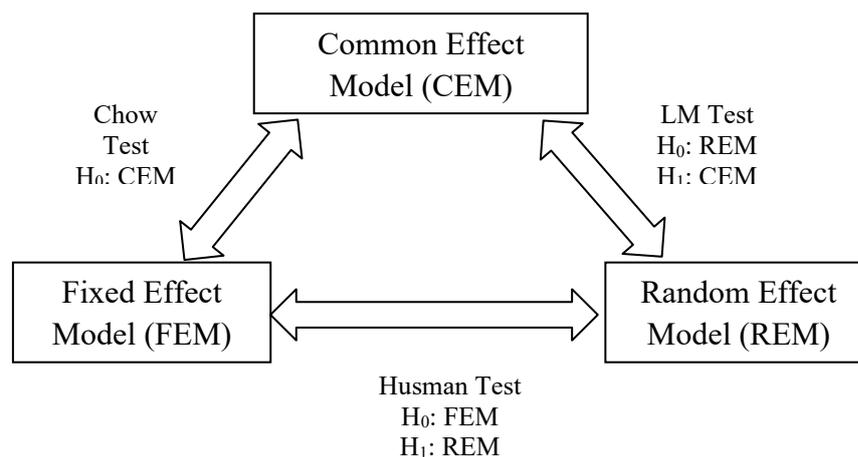
Dimana:

$IPEI_{(1-IV)it}$	=	IPEI Kabupaten/Kota Kuadran I - IV
$PE_{(1-IV)}$	=	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Kuadran I - IV
$PM_{(1-IV)}$	=	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Kuadran I – IV
$MM_{(1-IV)}$	=	Modal Manusia Kabupaten/Kota Kuadran I – IV
$KI_{(1-IV)}$	=	Keuangan Inklusif Kabupaten/Kota Kuadran I – IV
$KK_{(1-IV)}$	=	Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota Kuadran I – IV
$GINI_{(1-IV)}$	=	Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota Kuadran I – IV
$INF_J_{(1-IV)}$	=	Infrastuktur Jalan Kabupaten/Kota Kuadran I – IV

$INF_S_{(1-IV)}$	=	Infrastuktur Sanitasi Kabupaten/Kota Kuadran I - IV
i	=	Kabupaten/kota Kuadran (<i>Cross section</i>)
t	=	Periode penelitian Tahun 2019-2023 (time Series)
β_0	=	Koefisien Konstanta intersep yang merupakan skalar
α_0	=	Koefisien Konstanta intersep yang merupakan skalar
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7,$	=	Koefisien regresi atau slop kemiringan dari masing-masing variabel
$\beta_8,$	=	
et	=	Standar error pada model matematis, (<i>Error Term</i>)

3.5 Pemilihan Model Data Panel

Pada dasarnya terdapat empat model yang digunakan dalam analisis data panel, yaitu *pooled least square*, *pooling independent cross sections over times*, *least square dummy variable (fixed effects)*, dan *random effects*. Ketiga model tersebut dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 10. Pemilihan Model Data Panel
Sumber : Ekonometrika (Widarjono, 2009)

1. Common Effect Model (CEM)

Pada model ini diasumsikan bahwa semua koefisien konstan untuk semua silang tempat dan titik-titik waktu, bentuk model umumnya sebagai berikut:

$$y_{it} = a + X_{it}\beta + U_{it} \quad i=1,\dots,N \quad t=1,\dots,T,$$

dimana i adalah Kabupaten/Kota, perusahaan, dan lain-lain dan t adalah waktu. Asumsi dari model di atas adalah intersep semuanya sama dan slope koefisien variabel X identik untuk semua tempat.

a. *Pooling Cross Sections over Time*

Model ini merupakan model *Common Effect Model* dengan menambah variabel dummy, bentuk modelnya adalah sebagai berikut :

$$y_{it} = a + X_{it}\beta + D_{time}U_{it} \quad i=1,\dots,N \quad t=1,\dots,T,$$

D-time menunjukkan variabel dummy waktu yang biasanya dimulai dari urutan waktu yang kedua misalnya tahun kedua dan tahun pertama sebagai dasar (α). Ketika asumsi klasik regresi OLS, seperti homoskedastisitas (varian error konstan) dan tidak adanya autokorelasi (error tidak berkorelasi satu sama lain), tidak terpenuhi, estimasi OLS menjadi tidak efisien dan varians estimasi menjadi bias. Dalam kasus ini, GLS dapat digunakan untuk mengoreksi masalah tersebut dengan memodifikasi matriks kovarians residualnya. Namun, dalam banyak kasus, bentuk pasti dari matriks kovarians residual tidak diketahui. Oleh karena itu, metode (EGLS) digunakan untuk mendekati GLS secara empiris dengan memperkirakan bentuk struktur varians dan kovarians berdasarkan data yang tersedia. Kelebihan dan Kekurangan EGLS Kelebihan: Menghasilkan estimasi parameter yang lebih efisien dibandingkan OLS dalam kondisi pelanggaran asumsi klasik. Memperbaiki kesalahan standar dari estimasi regresi, sehingga meningkatkan keakuratan inferensi statistik. Mampu menangani heteroskedastisitas dan autokorelasi secara simultan.

2. Uji Chow /Fixed Effect

Uji chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* (FE) lebih baik daripada model regresi data panel *common effect* (CE) dengan melihat *residual sum squares*. Pendekatan ini digunakan untuk memperbaiki LSDV dimana unit cross section yang besar tidak akan mengurangi derajat kebebasan. Pendekatan *Fixed effect* ini mengijinkan adanya intersep yang berbeda antar individu namu intersep setiap individu tidak bervariasi sepanjang waktu. Pendekatan ini ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

Dimana β_{0i} merupakan *intersep* dan β_1, β_2 merupakan *slope*. Adanya perbedaan intersep pada setiap unit cross section dilakukan dengan penambahan

subscript i. Meskipun intersep berbeda antar Kabupaten/Kota namun intersep masing-masing Kabupaten/Kota tidak berbeda antar waktu, yang disebut *time invariant*. Untuk menentukan pendekatan yang lebih baik antara *Pooled Least Squared/PLS* dan *Fixed Effect Model (FEM)* digunakan Uji Chow dengan hipotesis sebagai berikut:

- 1) H_0 : *Pooled Least Square (PLS)*
- 2) H_1 : *Fixed Effect Model (FEM)*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar ($>$) dari F tabel maka H_0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya jika F hitung lebih kecil ($<$) dari F tabel maka H_0 diterima dengan model yang digunakkan adalah *Pooled Least Square* (Widarjono, 2009) Perhitungan F Statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005):

$$F_{hitung} = \frac{\frac{SSE_1 - SSE_2}{(n-1)}}{\frac{SSE_2}{(nt-n-k)}} \sim F_{\alpha}(N-1, NT-N-K)$$

Dimana SSE_1 merupakan *Sum Square Error* dari model *Pooled Least Squared*, SSE_2 merupakan *Sum Square Error* dari model *Fixed Effect Model*, n merupakan jumlah *cross section* Kabupaten/Kota), nt merupakan jumlah *cross section* dikalikan jumlah *time series*, k jumlah variabel bebas. Sedangkan F tabel didapat dari: $F\text{-tabel} = \{ : df(n-1, nt-n-k) \}$

Dimana α merupakan tingkat signifikansi yang dipakai (alfa), n merupakan jumlah Kabupaten/Kota (*cross section*), nt merupakan jumlah *cross section* dikali jumlah *time series*, k merupakan jumlah variabel bebas.

3. Uji Hausman/Random Effect

Untuk menentukan metode apa yang sebaiknya dipakai antara *fixed effect* atau *random effect*, digunakan metode yang dikembangkan oleh Hausman. Uji Hausman ini didasarkan bahwa penggunaan variabel *dummy* dalam metode *fixed effect* dan *GLS* adalah efisien sedangkan *OLS* tidak efisien, di lain pihak alternatifnya adalah metode *OLS* efisien dan metode *GLS* tidak efisien. Karena uji hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga Uji

Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan df sebesar k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect* dan sebaliknya. Secara matematis, uji ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$W = (\beta_{fe} - \beta_{re})' [V(\beta_{fe}) - V(\beta_{re})]^{-1} (\beta_{fe} - \beta_{re}) \sim \chi^2(k)$$

Estimasi dari matriks kovarian sebenarnya β_{fe} = estimator dari FEM β_{re} = estimator dari REM. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan *degree of freedom* (df) sebesar k di mana k adalah jumlah variabel independen perbandingan tersebut dilakukan dalam kerangka hipotesis sebagai berikut:

- 1) $H_0 : E(\tau_{xit}) = 0$; maka *Random Effect Model* (REM) adalah model yang tepat
- 2) $H_1 : E(\tau_{xit}) \neq 0$; maka *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang tepat

Pendekatan spesifikasi Hausman mengikuti distribusi Chi-Squared. Dalam Chi-Squared_{hitung} > Chi-Squared_{tabel} dan p-value signifikan maka H_0 ditolak sehingga pendekatan FEM lebih tepat digunakan.

4. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik daripada metode *common effect* maka digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Hipotesis dari LM Test adalah:

H_0 : *Common effect*

H_a : *Random Effect*

Untuk melakukannya diperlukan formulasi sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n [\sum_{t=1}^n e_{it}]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^n e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Jumlah dari kuadrat jumlah residual

$$\frac{\sum_{i=1}^n [\sum_{t=1}^n e_{it}]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^n e_{it}^2}$$

Sum Squared of Residual dari *random effect*

n = Jumlah individu data

t = Jumlah tahun data

Nilai LM kemudian dibandingkan dengan nilai *chi-squares* pada *degree of freedom* (df) sebanyak jumlah variabel independen dan $\alpha = 1\%$ dan $\alpha = 5\%$.

Perbandingan tersebut dilakukan dalam kerangka hipotesis sebagai berikut:

- 1) H_0 = menggunakan model PLS, jika nilai LM < nilai *chi-squares*
- 2) H_1 = menggunakan REM, jika nilai LM > nilai *chi-squares*

3.6 Pengujian Asumsi Klasik

3.6.1 Deteksi Multikolinearitas

Adanya dua asumsi penting tentang variabel gangguan yang akan memengaruhi sifat estimator yang BLUE. Pertama, varian dari variabel gangguan adalah tetap atau konstan (homokedastisitas). Kedua, tidak adanya korelasi atau hubungan antara variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan observasi yang lain atau sering disebut tidak ada masalah autokorelasi (Widarjono, 2013). Pendeteksian terhadap multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance – Inflating Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai $VIF > 10$ maka terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi (Sanusi, 2014). Kecepatan dari meningkatnya varians atau kovarians dapat dilihat dengan *Variance Inflation Factor* (VIF), yang didefinisikan sebagai:
$$VIF = \frac{1}{(1-R^2)}$$

Seiring dengan R^2 mendekati 1, VIF mendekati tidak terhingga. Hal tersebut menunjukkan sebagaimana jangkauan kolinieritas meningkat, varian dari sebuah estimator juga meningkat, dan pada suatu nilai batas dapat menjadi tidak terhingga (Gujarati, 2010).

- 1) H_0 : $VIF > 10$, terdapat multikolinearitas antar variabel bebas
- 2) H_a : $VIF < 10$, tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas

3.6.2 Uji Heterokedastisitas

Widarjono (2013) Suatu model yang terbebas dari heteroskedastisitas berarti variansi dari *error* bersifat konstan (tetap) atau dapat dikatakan homoskedastis. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan uji *White*. Model

dikatakan mengandung heteroskedastisitas jika statistik *white* ($n \times R^2$) lebih besar dari χ^2 tabel. Cara lainnya adalah dengan menggunakan metode *GLS Weight Cross-section* yang tersedia dalam estimasi output program *EViews*. Nilai *Sum Square Resid (SSR) Weighted* dibandingkan dengan *Sum Square Resid (SSR) Unweighted*. Jika *SSR weighted* < *SSR Unweighted* maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Autokorelasi

Widarjono, (2013), salah satu asumsi penting dalam metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lain. Sedangkan autokorelasi merupakan adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antar satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Jadi dengan adanya autokorelasi, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) hanya *Linear Unbiased Estimator* (LUE). Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi yaitu melalui metode *Durbin-Watson*, Metode *Breusch-Godfrey*.

3.6 Pengujian Hipotesis Penelitian

3.6.1 Uji t (*t-test*)

Uji t-Statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Digunakan uji 1 arah dengan tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat $\alpha = 0,05$. Hipotesis pengujian sebagai berikut:

- 1) Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka H_0 ditolak atau menerima H_a , artinya variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat.
- 2) Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka H_0 diterima atau menolak H_a , artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Hipotesis uji t yang terbentuk sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (PE)

- a. $H_0:\beta_1 = 0$, Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
 - b. $H_a:\beta_1 > 0$, Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
2. Penduduk Miskin (PM)
- a. $H_0:\beta_2 = 0$, Penduduk Miskin (PM) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
 - b. $H_a:\beta_2 > 0$, Penduduk Miskin (PM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
3. Modal Manusia (MM)
- a. $H_0:\beta_3 = 0$, Modal Manusia (MM) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
 - b. $H_a:\beta_3 > 0$, Modal Manusia (MM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
4. Keuangan Inklusif (KI)
- a. $H_0:\beta_4 = 0$, Keuangan Inklusif (KI) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
 - b. $H_a:\beta_4 > 0$, Keuangan Inklusif (KI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
5. Kesempatan Kerja (KK)
- a. $H_0:\beta_5 = 0$, Kesempatan Kerja (KK) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
 - b. $H_a:\beta_5 > 0$, Kesempatan Kerja (KK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
6. Ketimpangan Pembangunan (GINI)
- a. $H_0:\beta_6 = 0$, Ketimpangan Pembangunan (GINI) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
 - b. $H_a:\beta_6 > 0$, Ketimpangan Pembangunan (GINI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
7. Infrastruktur Jalan (INF_J)
- a. $H_0:\beta_7 = 0$, Infrastruktur Jalan (INF_J) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).

- b. $H_a: \beta_7 > 0$, Infrastruktur Jalan (INF_J) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
8. Infrastruktur Sanitasi (INF_S)
- a. $H_0: \beta_8 = 0$, Infrastruktur Sanitasi (INF_S) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).
 - b. $H_a: \beta_8 > 0$, Infrastruktur Sanitasi (INF_S) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI).

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.05 dan dengan derajat kebebasan ($df = n-k$), dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel (terikat dan bebas) yang digunakan. Maka dapat dirumuskan kriterianya adalah apabila nilai t -hitung lebih besar ($>$) dari t -tabel maka gagal menerima H_0 , sebaliknya apabila nilai t -hitung lebih kecil ($<$) t -tabel maka berhasil menerima H_0 . Atau dapat melihat nilai probabilitas, apabila nilai probabilitas $> \alpha = 0.05$ maka gagal menerima H_0 , sebaliknya jika nilai probabilitas < 0.05 maka gagal menolak H_0 .

3.6.2 Uji F Statistik

Uji-F adalah uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji-F ini dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan derajat kebebasan $df_1 = (k)$ dan $df_2 = (n-k-1)$ ($n =$ jumlah observasi, $k =$ jumlah variabel bebas). Hipotesis yang digunakan:

$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8 = 0$, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Penduduk Miskin (PM), Modal Manusia (MM), Keuangan Inklusif (KI), Kesempatan Kerja (KK), Ketimpangan Gini (GINI) Infrastruktur Jalan (INF_JLN) dan Infrastruktur Sanitasi (INF_S) terhadap pertumbuhan inklusif (IPEI).

$H_a: \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8 \neq 0$, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Penduduk Miskin (PM), Modal Manusia (MM), Keuangan Inklusif (KI), Kesempatan Kerja (KK), Ketimpangan Gini

(GINI) Infrastruktur Jalan (INF_JLN) dan Infrastruktur Sanitasi (INF_S) terhadap pertumbuhan inklusif (IPEI).

Kriteria Pengujian:

- 1) Apabila F statistik $>$ F tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila F statistik $<$ F tabel maka H_o diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pada tingkat $\alpha = 0,05$ jika H_o ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika H_o diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada $\alpha = 0,05$. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan ($df_1 = k$) dan ($df_2 = (n-k-1)$), dimana k adalah jumlah variabel bebas yang digunakan dan n adalah jumlah observasi. Kriterianya apabila F – hitung lebih kecil ($<$) dibandingkan F tabel maka H_o diterima dan H_a ditolak, artinya secara simultan variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya apabila F – hitung lebih besar ($>$) dibandingkan F tabel maka H_o ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Atau dapat melihat nilai probabilitas, apabila nilai probabilitas $<$ 5% maka gagal menerima H_o , sebaliknya jika nilai probabilitas $>$ 5% maka gagal menolak H_o .

3.8 Individual Effect

Individual effect digunakan ketika model akhir data panel menggunakan model akhir *Fixed Effect* model. *Individual effect* merupakan nilai individu masing-masing *cross-section* yang di dapat dari *Fixed Effect* model (Widarjono, 2013).

Rumus *individual effect* yaitu:

$$C_i = \alpha + \beta$$

Dimana:

- C_i : *Individual Effect*
 α : Koefisien konstanta
 β : koefisien dari masing-masing Kabupaten/kota

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah di urikan pada Bab IV maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Modal Manusia, Keuangan Inklusif, Kesempatan Kerja, Ketimpangan, Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Dasar terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif pada berbagai karakteristik wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Pembangunan Inklusif pada daerah Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Pendapatan Perkapita Tinggi (kuadran I)

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dipengaruhi secara signifikan oleh 7 (tujuh) variabel. Adapun variabel tersebut diurut berdasarkan kontribusinya adalah sebagai berikut : Pertumbuhan Ekonomi (PE); Rasio Total Jalan dalam Kondisi Baik (INF_J); Persentase Penduduk Miskin (PM); Rasio Jumlah Rekening Kredit UMKM terhadap Rekening Kredit; Tingkat Kesempatan Kerja (KK); Ketimpangan (GINI); dan terakhir Harapan Lama Sekolah (Modal Manusia=MM). Sementara itu terdapat 1 (satu) variabel yang diketahui tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Variabel tersebut adalah Jumlah Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih (INF_S) yang merupakan representasi dari unsur Infrastruktur Dasar. Dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil perhitungan ini, maka model pembangunan inklusif berbasis *pro-poor growth* di wilayah kuadran I menjadi sangat relevan, efektif, serta sejalan dengan karakteristik wilayah serta hasil analisis kontribusi variabel-variabel ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

- b) Pembangunan Inklusif pada daerah Pada Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi tetapi Pendapatan Perkapita Rendah (kuadran II)

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dipengaruhi secara signifikan oleh 7 (tujuh) variabel. Adapun variabel tersebut diurut berdasarkan kontribusinya adalah sebagai berikut : Ketimpangan (GINI); Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air minum bersih; Pertumbuhan Ekonomi (PE); Rasio Jumlah Rekening Kredit UMKM terhadap Rekening Kredit (KI); Tingkat Kesempatan Kerja (KK); Harapan Lama Sekolah (Modal Manusia=MM); dan Rasio Total Jalan dalam Kondisi Baik (INF_J). Sementara itu terdapat 1 (satu) variabel yang diketahui tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yaitu variabel Jumlah Penduduk Miskin (PM) yang merupakan representasi dari unsur kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil perhitungan tersebut, model pembangunan inklusif berbasis pengurangan ketimpangan (*growth with equity*) adalah rekomendasi yang paling sesuai untuk wilayah di kuadran II. Model ini tepat karena secara langsung menjawab isu ketimpangan yang dominan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan inklusif melalui perluasan akses terhadap infrastruktur dasar dan keuangan inklusif yang terbukti penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

- c) Pembangunan Inklusif pada daerah Pada Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Rendah Namun Pendapatan Perkapita Tinggi (Kuadran III)

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dipengaruhi secara signifikan oleh 6 (enam) variabel. Adapun variabel tersebut diurut berdasarkan kontribusinya adalah sebagai berikut : Harapan Lama Sekolah (Modal Manusia=MM); Rasio Total Jalan dalam Kondisi Baik (INF_J); Rasio Jumlah Rekening Kredit UMKM terhadap Rekening Kredit (KI); Ketimpangan (GINI); Pertumbuhan Ekonomi (PE); dan Tingkat Kesempatan Kerja (KK). Sementara itu terdapat 2 (dua) variabel yang diketahui tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Pertama adalah variabel Jumlah

Penduduk Miskin (PM) yang merupakan representasi dari unsur kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,016622. Kemudian variabel lainnya yang tidak berpengaruh secara signifikan lainnya adalah Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih (INF_S) yang merupakan representasi dari unsur Infrastruktur Dasar.

Berdasarkan pertimbangan hasil analisis tersebut, maka model pembangunan inklusif berbasis peningkatan modal manusia (*human capital-based growth*) adalah pilihan yang paling tepat untuk wilayah kuadran III. Model ini menjawab kebutuhan utama masyarakat di daerah ini, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

d) Pembangunan Inklusif pada daerah Pada Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Rendah dan Pendapatan Perkapita Rendah (Kuadran IV)

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dipengaruhi secara signifikan oleh 7 (tujuh) variabel. Adapun variabel tersebut diurut berdasarkan kontribusinya adalah sebagai berikut : Rasio Jumlah Rekening Kredit UMKM terhadap Rekening Kredit (KI); Persentase Penduduk Miskin (PM); Rasio Total Jalan dalam Kondisi Baik (INF_J); Tingkat Kesempatan Kerja (KK); Harapan Lama Sekolah (Modal Manusia=MM); Ketimpangan (GINI); dan Pertumbuhan Ekonomi (PE). Sementara itu terdapat 1 (satu) variabel yang diketahui tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Variabel tersebut adalah Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih (INF_S) yang merupakan representasi dari unsur Infrastruktur Dasar.

Dengan mempertimbangkan hasil ini, model pembangunan inklusif berbasis keuangan inklusif (*financial inclusion-based growth*) adalah rekomendasi yang paling tepat untuk wilayah di kuadran IV. Model ini efektif dalam menjawab tantangan utama wilayah ini, yaitu keterbatasan akses modal usaha produktif, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kapasitas produktif masyarakat dalam jangka panjang secara inklusif dan berkelanjutan.

2. Evaluasi dan Rekomendasi kebijakan dan program yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif pada berbagai karakteristik wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa di uraikan sebagai berikut :

a. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki hubungan langsung dengan variabel rasio kredit UMKM terhadap total kredit di suatu daerah karena KUR merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui subsidi bunga dan kemudahan agunan, KUR mendorong peningkatan volume kredit yang disalurkan ke sektor UMKM. Ketika KUR terserap dengan baik di suatu wilayah, maka jumlah kredit yang masuk ke sektor UMKM bertambah signifikan, sehingga menaikkan proporsi kredit UMKM dibandingkan total kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan di daerah tersebut. Rasio ini menjadi indikator penting inklusi keuangan, karena mencerminkan sejauh mana sistem keuangan daerah melayani sektor usaha kecil yang umumnya padat karya dan berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, semakin tinggi efektivitas penyaluran KUR, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan rasio kredit UMKM, yang pada gilirannya mendukung pencapaian pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

b. Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja memiliki peran strategis dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan secara tidak langsung meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Melalui skema pelatihan keterampilan dan insentif tunai, program ini membantu pencari kerja, korban PHK, dan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas kerja, sehingga memperluas kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Penurunan TPT yang signifikan di berbagai wilayah pasca-2020, bersamaan dengan masifnya pelaksanaan Prakerja, menunjukkan bahwa program ini efektif dalam menjembatani gap antara angkatan kerja dan kebutuhan pasar.

Kontribusi tingkat kesempatan kerja terhadap IPEI telah terbukti signifikan secara statistik di semua kuadran, meskipun dengan koefisien yang bervariasi. Di wilayah dengan ekonomi yang lebih mapan, penyerapan alumni Prakerja cenderung lebih cepat dan berkualitas, memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan yang merata. Sebaliknya, di wilayah tertinggal, meskipun pengangguran menurun, jenis pekerjaan yang tercipta belum cukup inklusif untuk meningkatkan IPEI secara substansial.

c. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) melalui mekanisme bantuan sosial bersyarat yang mendorong akses rumah tangga miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dasar. Dengan memberikan transfer tunai secara rutin kepada keluarga prasejahtera yang memenuhi syarat, PKH menjaga daya beli, meningkatkan konsumsi dasar, serta mendorong partisipasi anak-anak dalam pendidikan dan layanan kesehatan preventif.

Penurunan kemiskinan yang dicapai melalui PKH secara langsung meningkatkan dimensi keadilan distribusi dalam IPEI, terutama pada wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses layanan publik. Bantuan bersyarat ini juga memperkuat fondasi mobilitas sosial jangka panjang, karena keluarga penerima dibekali bukan hanya dengan konsumsi minimum, tetapi juga peluang untuk keluar dari perangkap kemiskinan struktural melalui penguatan modal manusia. Relasi ini menjadi penting karena IPEI tidak hanya mengukur pertumbuhan ekonomi, tetapi menilai sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu mengurangi eksklusi dan ketimpangan. Oleh karena itu, semakin efektif PKH dalam menurunkan kemiskinan dan mendorong partisipasi sosial-ekonomi kelompok rentan, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan IPEI.

d. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki peran strategis dalam meningkatkan *Harapan Lama Sekolah (HLS)*, yang pada gilirannya

berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). KIP memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, sehingga mendorong keberlanjutan partisipasi pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Dengan mengurangi hambatan ekonomi untuk bersekolah, KIP secara langsung memperpanjang rata-rata lama sekolah penduduk, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (human capital), dan memperbesar peluang kerja produktif.

Dalam konteks pembangunan inklusif, peningkatan HLS melalui KIP berkontribusi pada dimensi akses yang lebih adil terhadap kesempatan ekonomi. Masyarakat yang lebih terdidik memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar kerja formal dan memperoleh penghasilan yang layak, yang pada akhirnya memperkecil ketimpangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

e. Program Dana Desa

Program Dana Desa berperan penting dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah dengan meningkatkan akses infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi di desa-desa tertinggal. Dana ini memungkinkan desa membangun jalan, irigasi, air bersih, serta mendukung kegiatan produktif masyarakat seperti BUMDes dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, Dana Desa membantu mempersempit kesenjangan antara desa dan kota, khususnya dalam akses layanan dan peluang ekonomi.

Pengurangan ketimpangan ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Ketimpangan yang lebih rendah mencerminkan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata—salah satu pilar utama dalam konsep ekonomi inklusif. Studi Suryahadi et al. (2015) dan ADB (2020) menegaskan bahwa penurunan ketimpangan, khususnya dalam konteks geografis dan pendapatan, memiliki korelasi positif dengan peningkatan indeks pembangunan yang inklusif karena memperluas partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi.

5.2 Saran

Adapun saran yang direkomendasikan dari disertasi ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mencermati hasil perhitungan pengaruh masing – masing variabel bebas pada setiap kuadran, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Model *pro-poor growth* dalam konteks wilayah kuadran I menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi harus secara aktif diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pada wilayah ini hendaknya dilakukan optimalisasi kebijakan fiskal dan program sosial yang menasar kelompok miskin, seperti insentif pajak bagi sektor UMKM, perluasan subsidi produktif, serta program pelatihan kerja yang terintegrasi dengan sektor industri lokal. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem monitoring terhadap keberhasilan redistribusi manfaat pembangunan, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Peran infrastruktur jalan yang sangat signifikan menandakan bahwa penguatan konektivitas ekonomi antarwilayah masih menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Di sisi lain, harapan lama sekolah yang kurang berpengaruh memperlihatkan adanya stagnasi pada peningkatan kualitas pendidikan; ini dapat ditanggulangi dengan mendorong program *link-and-match* antara dunia pendidikan dan pasar kerja serta integrasi pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum sekolah.
 - b. Model *growth with equity* pada kuadran II menekankan pentingnya keadilan distribusi dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan per kapita yang memadai. Pada wilayah ini hendaknya dilakukan penguatan mekanisme redistribusi vertikal melalui sistem transfer fiskal yang lebih berkeadilan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik untuk pengentasan ketimpangan. Intervensi terhadap infrastruktur dasar, terutama air bersih dan sanitasi, harus menjadi prioritas, karena terbukti berpengaruh signifikan terhadap inklusi sosial dan kesehatan masyarakat. Penguatan lembaga keuangan mikro, koperasi, dan akses kredit UMKM juga harus dipercepat agar masyarakat bawah dapat berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah perlu

mengembangkan kebijakan afirmatif berbasis data spasial dan demografis untuk menjangkau kelompok yang terpinggirkan.

- c. Model pembangunan berbasis modal (*human capital-based growth*) manusia sangat relevan diterapkan pada wilayah kuadran III, di mana pendapatan per kapita tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi rendah. Pada wilayah ini perlu dikembangkan reposisi sektor pendidikan dan pelatihan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah perlu mendorong reformasi pendidikan berbasis inovasi, seperti penguatan pendidikan STEM, literasi digital, dan kewirausahaan sosial. Program pelatihan kerja juga harus diarahkan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill yang dibutuhkan oleh sektor ekonomi modern. Akses terhadap kredit UMKM yang signifikan menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk menumbuhkan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi lokal, sehingga perlu dikembangkan inkubator bisnis, akses ke modal ventura, dan digitalisasi UMKM. Konektivitas fisik melalui infrastruktur jalan juga perlu diperkuat untuk menstimulasi mobilitas sumber daya manusia dan memperluas jaringan pasar.
- d. Model pembangunan yang menekankan pada *financial inclusion* atau inklusi keuangan menjadi sangat strategis di kuadran IV. Pada wilayah ini hendaknya dilakukan orientasi program pada pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput. Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan lokal seperti BUMDes, koperasi syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk memfasilitasi akses pembiayaan produktif. Digitalisasi layanan keuangan juga perlu diperluas hingga ke desa-desa, agar efisiensi transaksi dan keterlibatan ekonomi warga meningkat. Program pengentasan kemiskinan harus lebih bersifat produktif, misalnya melalui program inkubasi usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberian hibah modal awal. Dalam jangka menengah, fokus pada pembangunan jalan desa dan konektivitas antarwilayah akan mempercepat integrasi ekonomi lokal. Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM untuk mendampingi program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik lokal.

2. Mencermati kajian evaluasi dan rekomendasi kebijakan dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu terus diperkuat, khususnya di wilayah kuadran IV dan II yang menunjukkan kebutuhan tinggi terhadap akses permodalan produktif. Pemerintah harus meningkatkan penyaluran KUR secara lebih terarah kepada sektor-sektor produktif di wilayah tertinggal, dengan memperlonggar persyaratan agunan serta memperkuat pendampingan usaha. Kolaborasi dengan lembaga keuangan daerah dan BUMDesa sangat penting untuk memastikan bahwa KUR tidak hanya terserap di daerah maju, tetapi juga menjangkau UMKM di kawasan terpencil yang menjadi pilar ekonomi lokal.
 - b. Program Kartu Prakerja perlu ditransformasikan dari sekadar program pelatihan berbasis daring menjadi ekosistem pembelajaran berkelanjutan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Untuk wilayah dengan indeks kesempatan kerja rendah seperti kuadran III dan IV, pelatihan harus disesuaikan dengan potensi sektoral daerah serta difasilitasi dengan koneksi langsung ke pasar kerja, baik melalui kemitraan dengan industri maupun pembentukan inkubator wirausaha. Dengan pendekatan tersebut, Prakerja tidak hanya menurunkan pengangguran, tetapi juga mendorong penciptaan pekerjaan yang layak dan inklusif.
 - c. Program Keluarga Harapan (PKH) harus terus ditingkatkan cakupannya terutama pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti kuadran IV. Namun demikian, intervensi tidak boleh berhenti pada bantuan tunai, melainkan harus disertai strategi *exit* dari kemiskinan struktural melalui integrasi dengan program pelatihan keterampilan, layanan kesehatan primer, dan pendidikan anak. Dengan begitu, PKH tidak hanya menjaga konsumsi dasar, tetapi juga menjadi sarana mobilitas sosial lintas generasi.
 - d. Dalam rangka memperkuat Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), perlu dilakukan penguatan sistem pendataan dan pengawasan agar program ini benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Di

wilayah kuadran III, di mana harapan lama sekolah menjadi variabel paling signifikan terhadap IPEI, perluasan manfaat KIP hingga jenjang pendidikan tinggi menjadi sangat strategis. Selain itu, KIP harus dibarengi dengan program pendukung seperti subsidi transportasi sekolah dan penyediaan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal agar dampaknya terhadap pembangunan inklusif lebih optimal.

- e. Untuk Program Dana Desa, perlu dikembangkan pendekatan berbasis partisipasi dan kebutuhan lokal. Di wilayah kuadran II dan IV, Dana Desa harus difokuskan untuk mengurangi ketimpangan spasial dengan meningkatkan infrastruktur dasar yang paling dibutuhkan, seperti jalan penghubung, air bersih, dan fasilitas sanitasi. Namun, pemanfaatan Dana Desa tidak boleh semata-mata untuk pembangunan fisik, melainkan harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan BUMDes, pelatihan keterampilan, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Penguatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Desa juga menjadi kunci agar program ini berjalan efektif dan akuntabel.

5.3 Pengembangan Penelitian Masa Depan

1. Penelitian ini telah memberikan pemetaan dan analisis awal mengenai dinamika pembangunan ekonomi inklusif di kabupaten/kota di Pulau Jawa berdasarkan pemetaan karakteristik wilayah. Namun, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas pembangunan inklusif, penelitian di masa depan perlu menggunakan pendekatan multidimensional. Integrasi lebih banyak variabel, seperti kualitas lingkungan hidup, tingkat digitalisasi masyarakat dan ekonomi, serta indeks kebahagiaan, menjadi penting untuk menggambarkan kondisi sosial-ekonomi wilayah secara lebih utuh dan relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan. Dimensi-dimensi tersebut dapat memperkaya analisis karena pembangunan ekonomi inklusif tidak hanya berkaitan dengan angka pertumbuhan atau distribusi pendapatan, tetapi juga mencakup aspek kualitas hidup, kesejahteraan subjektif, dan keterlibatan aktif dalam transformasi ekonomi digital.

2. Cakupan penelitian ke depan perlu diperluas dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga analisis tidak hanya terbatas pada Pulau Jawa, melainkan juga mampu menangkap disparitas dan dinamika pertumbuhan inklusif di berbagai pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, hingga Papua. Dengan cakupan nasional, penelitian dapat menghasilkan pemetaan pembangunan yang lebih akurat antarwilayah dan menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang nyata untuk mendorong integrasi pembangunan antar pulau, mengurangi ketimpangan regional, serta mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan secara nasional.
3. Kajian evaluasi kebijakan peningkatan IPEI perlu diperluas melalui pengembangan model yang memasukkan variabel kontrol. Program bantuan sosial, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur, serta penyaluran kredit UMKM sebagai bagian dari keuangan inklusif dapat dianalisis lebih lanjut untuk menilai apakah variabel-variabel tersebut memperkuat atau justru memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2019). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Vol. 5, Issue 1).
- A'yun, Q., & Zainuri. (2023). The effects of inequality and poverty on inclusive economic development in East Java Province. *Journal International Conference on Economics, Business and Information Technology*, 194–204.
- Adams Jr, R. H. (2004). Economic growth, inequality and poverty: estimating the growth elasticity of poverty. *World development*, 32(12), 1989-2014.
- Adamu, M. B., & Suleiman, M. (2018). Financial inclusion and inclusive growth: Evidence from West and East African countries. *Ilorin Journal of Economic Policy*, 5(1), 12–26.
- Adedeji, O. S., Du, H., & Afari, M. O. (2013). Inclusive growth: An application of the social opportunity function to selected African countries. IMF working paper No., 139.
- Adelfina, N. and Jember, I. M. (2016). The Influence of Economic Growth, Poverty, and Regional Expenditure on the Human Development Index in the Regency/City of Bali Province in the Period 2005-2013. *E-journal of Development Economics*, Udayana University. Vol. 5, No. 10, pp 1011-1025.
- Aderogba, Badewa Abayomi, and Abiodun Adewale Adegboye. (2019). Assessing the Impact of Road Infrastructure on Poverty Reduction in Developing Economies: The Case of Nigeria. *Modern Economy* 10: 2430–49. [CrossRef]
- Afolabi, J. O. (2020). Impact of Financial Inclusion on Inclusive Growth: An Empirical Study of Nigeria. *Asian Journal of Economics and Empirical Research*, 7(1), 8–14. <https://doi.org/10.20448/journal.501.2020.71.8.14>
- Agenor, Pierre-Richard. (2011). "Schooling and Public Capital in a Model of Endogenous Growth." *Economica*, 78(309): 108-132.
- Aggarwal, S. C., Satija, D., & Khan, S. (2019). Inclusive Growth in India—Learning from Best Practices of Selected Countries.
- Aghion, P., Akcigit, U., & Howitt, P. (2010). *What do we learn from Schumpeterian growth theory? Handbook of Economic Growth*, 2, 515-563.

- Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. *Econometrica*, 60(2), 323–351.
- Aghion, P., & Howitt, P. (1998). *Endogenous Growth Theory*. MIT Press.
- Agus, Widarjono. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi Ketiga.
- Agus, Widarjono. (2013). *Econometrics Introduction and Application*. Ekonosia. Jakarta.
- Ahmad, E., & Ramzan, M. (2020). Relationship between poverty, inequality, and human development: Evidence from selected South Asian countries. *Journal of Policy Modeling*, 42(6), 1204-1219.
- Alam, S., & Samsir, A. (2020). Jeneberang Sediment Economic Valuation, Gowa District (SDGS Perspective). In *International Conference on Science and Advanced Technology (ICSAT)* (pp. 1375-1382). Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/icsat/article/view/17930>
- Alekhina, V., & Ganelli, G. (2021). Determinants of Inclusive Growth in ASEAN. *Journal of Asia Pacific Economics*, 1-33.
- Ali, A., & Sajid, A. (2020). Towards Inclusive Growth: Financial Sector Dynamics and Poverty Reduction in Pakistan. *Journal of Business and Economic Options*, 3(4), 129-140.
- Ali, I. And J. Zhuang. (2007). *Inklusif Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications*. ERD Working Paper Series, No. 97.
- Ali, Ifzal and Yao Xianbin. 2004. "Pro-poor Inclusive Growth for Sustainable Poverty Reduction in Developing Asia: The Enabling Role of Infrastructure Development." ERD Policy Brief Series No. 27. Asian Development Bank. May 2004.
- Ali, I., & Son, H. H. (2007). *Defining and Measuring Inclusive Growth: Application to the Philippines*. Asian Development Bank.
- Ali, S. S., Tahir, S., & Arif, G. M. (1999). Dynamics of growth, poverty, and inequality in Pakistan [with Comments]. *The Pakistan Development Review*, 837-858.
- Amalina, D. H. (2013). Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85–112.

- Amalina, D. H., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2013). Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Kawasan Indonesia Bagian Barat Dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85–112. <https://media.neliti.com/media/publications/228213-pertumbuhan-inklusif-fenomena-pertumbuha-238d85d2.pdf>
- Amini, C., & Bianco, S. D. (2016). Poverty, growth, inequality and pro-poor factors: new evidence from macro data. *The Journal of Developing Areas*, 50(2), 231–254. doi:10.1353/jda.2016.0080
- Amjad, R. (2005). Skills and competitiveness: Can Pakistan break out the low-level skills trap. *Pakistan Development Review*, 44(4), 387-409.
- Anand, R., Mishra, S. and Peiris, S. (2013). Inclusive growth: measurement and determinants. *IMF Working Papers No.*, 13/135
- Anand, Rahul, Saurabh Mishra, and Nikola Spatafora. (2012). “Structural Transformation and the Sophistication of Production.” *IMF Working Paper No. 59*, Washington, DC.
- Anand, Vivek, Muhammad Qasim Nizamani, and Farheen Qasim Nizamani. (2019). Macroeconomic Determinants of Inclusive Growth in Pakistan: An ARDL Approach. *Global Economics Review IV*. [CrossRef]
- Andriy Krysovaty, Iryna Zvarych , Oksana Brodovska, Iryna Shevchenko , Oleksiy Krasnorutsky. (2023). Development of Inclusive Economy as the Basis of Economic Growth of the Global Economy. *TEM Journal*. Volume 12, Issue 2, pages 936-947, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM122-40, May 2023.
- Anita, R. D., & Udjianto, D. W. (2023). Determinants of inclusive economic development: A fixed effect model approach. *Journal of Asset Management and Public Economy*, 3(1), 60-75. <http://journal2.uad.ac.id/index.php/jampe/index>
- Antle, J. M., & Ray, S. (2020). *Sustainable agricultural development: An economic perspective*. London: Palgrave Macmillan.
- Anwar, A. I., Amar, M. Y., Sabbar, S. D., Saifulloh, N. I., Umar, H. B., & Aswan, A. (2024). The impact of socioeconomic variables on financial inclusion in Asian countries: A comparative study, 2010–2022. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(1), 2857. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i1.2857>

- Anwar, A. I., Uppun, P., & Reviani, I. T. A. (2016). The Role of Financial Inclusion to Poverty Reduction in Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management*, 18(6), 37–39. <https://doi.org/10.9790/487X-1806033739>
- Aoyagi, C., & Ganelli, G. (2015). Asia's quest for inclusive growth revisited. *Journal of Asian Economics*, 40, 29–46.
- Apip Supriadi, Gusti Tia Ardiani, Dwi Hastuti L.K.,(2022) Analysis of Economic Potential Identification and Provincial Economic Sector Shifts in Java Island. *audi Journal of Business and Management Studies* Abbreviated Key Title: *Saudi J Bus Manag Stud* ISSN 2415-6663 (Print) |ISSN 2415-6671 (Online) Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates Journal homepage: <https://saudijournals.com>.
- Arham, Muhammad Amir, and Rauf Hatu. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7: 433–42. [CrossRef]
- Arikunto, Suharsimi, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Cetakan ke 13, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta
- Arimbawa, P.D, Widanta Bagus P. (2017). Pengaruh Luas Lahan, Teknologi Dan Pelatihan Terhadap Pendapatan Petani Padi Dengan Produktivitas Sebagai Variabel Intervening Di Kecamatan Mengwi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, edisi 6, hal 8.
- Arrfah, A. P., & Syafri. (2022). The Impact of Regional Government Spending on Inclusive Economic Development in Central Sulawesi Province. *Info Artha*, 6(2), 159-166.
- Asian Development Bank (ADB). (2010). *Framework of Inclusive Growth Indicators*.
- Asian Development Bank (ADB). (2012). *Infrastructure for supporting inclusive growth and poverty reduction in Asia*. Manila: ADB.
- Asif, M., Bashir, S., & Khan, S. (2021). Impact of non-renewable and renewable energy consumption on economic growth: evidence from income and regional groups of countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(29), 38764-38773.
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What Can Be Done?* Harvard University Press.

- Ayuningtyas, F. J., Astuti, I. P., Apriliawan, D. I., & Shi, K. (2021). East Java Province: Economic structure and forecast GRDP analysis. *OPTIMUM: Journal of Economics and Development*, 13(2), 125–140. <https://dx.doi.org/10.12928/optimium.v13i2.7958>
- Azam, M. (2016). Does environmental degradation shackle economic growth? A panel data investigation on 11 Asian countries. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 65, 175–182.
- Azhari, A., Aziz, M. I. A., Cheah, Y. K., & Shahiri, H. (2021). Oil Price Shocks and Energy Stock Returns of ASEAN-5 Countries: Evidence from Ready s (2018) Decomposition Technique in a Markov Regime Switching Framework. *Sains Malaysiana*, 50(4), 1143–1156. <https://doi.org/10.17576/jsm-2021-5004-24>.
- Azizah, M. (2022). Analysis of the effect of the Gini ratio, percentage of poor population, GRDP, HDI, and average per capita expenditures on development inclusivity index in Java Island. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 98–112.
- Azwar. (2016). Pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. In *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan*
- Azwar. (2016). Pertumbuhan ekonomi inklusif di Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal BPPK*, 9(2), 216-242.
- Bajar, S., & Rajeev, M. (2016). The Impact of Infrastructure Provisioning on Inequality in India: Does the Level of Development Matter? *Journal of Comparative Asian Development*, 15(1), 122–155. <https://doi.org/10.1080/15339114.2016.1150188>
- Baldecci, E., Clements, B., Gupta, S., & Cui, Q. (2008). Social spending, human capital and growth in developing countries. *Journal of World Development*, 36(8), 1317-1341.
- Balkytė, A., & Tvaronavičienė, M. (2010). The inclusion of sustainable development dimension into the competitiveness theory. *Business, Management and Education*, 18, 1–9.
- Bappenas, (2018). Pertumbuhan-ekonomi-inklusif-mengentaskan-kemiskinan-dan-ketimpangan-di-indonesia, <https://www.bappenas.go.id/index.php>.
- Bappenas. (2019). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia.
- BAPPENAS. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross-section of countries. *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407-443. <https://doi.org/10.2307/2937943>
- Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of Economic Growth*, 5(1), 5–32.
- Batool, Z., Haroon, M., & Sohail, M. (2022). Assessing the contribution of physical and financial infrastructure to inclusive development in Pakistan. *Pakistan Journal of Social Research*, 4(2), 514–525. <https://www.pjsr.com.pk>
- Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. *Journal of Political Economy*, 70(5, Part 2), 9-49. <https://doi.org/10.1086/258724>
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Behera, S. (2015). Combating unemployment: A challenge to inclusive growth. *International Journal of Research in Economics and Social Sciences*, 5(8).
- Ben Amar, M., & Zghidi, N. (2016). The relationship between inclusive growth, inequality and poverty in Africa. *Theoretical and Applied Economics*, 23(1(606)), 117–126.
- Besley, T., & Burgess, R. (2004). Can labor regulation hinder economic performance? *Quarterly Journal of Economics*, 119(1), 91-134.
- Bhuyan, B., Sahoo, B. K., & Suar, D. (2020). Nutritional status, poverty, and relative deprivation among socio-economic and gender groups in India: Is the growth inclusive? *World Development Perspectives*, elsavier,2020. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100180>.
- Bils, M., & Klenow, J. P. (2000). Does schooling cause growth? *American Economic Review*, 90(5), 1160-1183.
- Binti, M. T. (2016). Analysis of the Influence of Economic Growth on the Reduction of Poverty Levels in Central Kalimantan. *Journal of Business Communication and Management*. Vol. 3, No. 6, pp 69-78.
- Boediono. (1992). *Teori Ekonomi Makro*. Jogjakarta: Bpfe Ugm.
- Bosworth, B., & Collins, S. M. (2003). Accounting for growth: Comparing China and India. *Journal of Economic Perspective*, 22(1), 45-66.

- Bougheas, Spiros, Panicos O. Demetriades, and Theofanis P. Mamuneas. (2000). "Infrastructure, Specialization, and Economic Growth." *The Canadian Journal of Economics*, 33(2): 506-522.
- Bourguignon, F. (2012). *La Mondialisation de l'inégalité*. Le Seuil.
- Bourguignon, F. (2004). The poverty-growth-inequality triangle (No. 125). working paper.
- Brenneman, A., & Michel Kerf. (2002). *Infrastructure & Poverty Linkages: A Literature Review*. Washington DC: The World Bank.
- Budiman, M.A. (2013). *Makalah Sektor Pertanian Dalam Konsep Pendapatan Nasional*. 2013. UNPAD, Jatinangor.
- Cadil, J., Petkovová, L., & Blatná, D. (2014). Human capital, economic structure and growth. *Procedia Economics and Finance*, 12, 85-92. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00323-3](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00323-3)
- Calderón, C., & L. Servén. (2004). The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. Policy Research Working Paper No. 3400. Washington DC: World Bank.
- Calderon, Cesar, and Luis Servén. (2014). "Infrastructure, Growth, and Inequality: An Overview." The World Bank Policy Research Working Paper Series 7034.
- Capece, G., Di Pillo, F., Gastaldi, M., Levialedi, N., & Miliacca, M. (2017). Examining the effect of managing GHG emissions on business performance. *Business Strategy and the Environment*, 26(8), 1041–1060. doi:10.1002/bse.1956.
- Chaowei Zhu. (2022). *Inclusive Growth, Inequality and Institutions*. Elsevier.
- Chaowei Zhu (2022) Conceptualising and evaluating inclusive economic development: a productivity perspective, *Development Studies Research*, 9:1, 219-229, DOI:10.1080/21665095.2022.2112729.
- Chongvilaivan, A., & Kim, J. (2016). Individual income inequality and its drivers in Indonesia: A Theil decomposition reassessment. *Social Indicators Research*, 126(1), 79–98.
- Ciptawaty, U., Aida, N., & Dhea Pratama, A. (2020). the Analysis of Economy Potential and Base Sector of Seven Provinces in Sumatera. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 8(1), 8–12. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2020.008.01.2>

- Corbett, Steve and Fikkert, Brian. (2012). *When Helping Hurt*. Moody Publishers 820N.Lasalle Boulevard Chicago, II 60610 USA
- Corrado, G. (2017). Inclusive growth: The global challenges of social inequality and financial inclusion. *International Journal of Business and Management*, 12(9), 1–14.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE.
- Cyntia Dwi Lestari, Farida Rahmawati, (2021). Measuring the Impact of Technology, Politics, and Human Resources on Inclusive Economic Growth in Indonesia. *Ecces Journal* Volume 8 Number 1 Ed. June 2021 : page 65-85 p-ISSN: 2407-6635 e-ISSN : 2580-5570.
- Daly, H. E. (1996). *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*. Beacon Press
- Daniel, Moechar. (2004). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dasgupta, P. (1993). *An Inquiry into Well-Being and Destitution*. Clarendon Press.
- Dasgupta, P. (2021). *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review*. HM Treasury.
- Datt, G., & Ravallion, M. (1992). Growth and redistribution components of changes in poverty measures: A decomposition with applications to Brazil and India in the 1980s. *Journal of Development Economics*, 38, 275–295.
- Davtyan, K. (2015). *Income inequality and monetary policy*. November 15, 2015.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2017). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. World Bank Group.
- Dinda, S. (2014). Inclusive growth through creation of human and social capital. *International Journal of Social Economics*.
- Dirta Pratama Atiyatna, Ichsan Hamidi, Trie Sartika Pratiwi, Hamira, (2023) Does Economic Growth, Wage Rate, and Industrial Development Matter for Labor Absorption?, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 21 (1): 61-68, June 2023 P-ISSN: 1829-5843; E-ISSN: 2685-0788.

- Dixit, R., & Ghosh, M. (2013). Financial Inclusion for Inclusive Growth of India - a Study of Indian States. *International Journal of Business Management and Research*, 3(1), 147–156.
- Domar, E. D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. *Econometrica*, 14(2), 137–147.
- Donaldson, D. (2008). Railroads of the Raj: Estimating the impact of transportation infrastructure. *American Economic Review*, 108(4-5), 899-934. <https://doi.org/10.1257/aer.20101199>.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. *Journal of economic growth*, 7(3), 195-225.
- Dyah Hapsari, S. A., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2018). Pertumbuhan ekonomi inklusif : Fenomena Pertumbuhan ekonomi inklusif Di Kawasan Indonesia Bagian Barat Dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85–112. <https://doi.org/10.29244/jekp.2.2.85-112>
- Égert, B., Kozluk, T., & Sutherland, D. (2009). Infrastructure and Growth: Empirical Evidence. CESifo Working Paper Series No. 2700. papers.ssrn.com
- Elesh, David. (1970). Poverty Theories and Income Maintenance: Validity and Policy Relevance. University of Wisconsin
- Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). Financial Inclusion, Economic Growth, and Poverty Alleviation: Evidence from Eastern Indonesia. *Heliyon*, 6(10), e05235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>
- Ernawati, Indri. (2003). Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Pemukiman Di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah. Skripsi FIS UNNES Semarang.
- Eton, M., Uwonda, G., Mwosi, F., Barigye, G., & Ogwel, P.B. (2019). Financial Inclusion and Economic Growth in Uganda A case study of selected districts in Western Uganda. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering* 5(10), 2-23.
- Ezindu, Obisike Ndubueze, Onwuka Irene Nkechi, Oluwaseun B. Alade, and Udeze R. Chike. (2021). Impact of Sectoral Growth on Unemployment in Nigeria. *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 5. [CrossRef]
- Fahmi, Fajar Nur (2007). Peranan Industri Kecil Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Lamongan. Malang : Brawijaya.

- Felipe, J. (2012). *Inclusive Growth, Full Employment, and Structural Change: Implications and Policies for Developing Asia*. Anthem Press.
- Fernald, John G. (1999). "Roads to Prosperity? Assessing the Link between Public Capital and Productivity." *The American Economic Review*, 89(3): 619-638.
- Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class*. Basic Books.
- Foster, J. E., & Székely, M. (2001). Is economic growth good for the poor? Tracking low incomes using general means. *International Economic Review*, 49(4), 1143-1172.
- Fosu, A. K. (2015). Growth, inequality and poverty in Sub-Saharan Africa: Recent progress in a global context. *Oxford Development Studies*, 43(1), 44–59.
- Gamage, A. (2022). An inclusive multifaceted approach for the development of electronic work-integrated learning (eWIL) curriculum. *Studies in Higher Education*, 47(7), 1357–1371. <https://doi.org/10.1080/03075079.2021.1894116>.
- Ghosh, P. K. (2024). Factors determining inclusive growth in India: An explorative empirical study. *International Journal of Applied Economics*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14499055>
- Gibson, J., & Susan Olivia. (2009). The Effect of Infrastructure Access and Quality on Non-Farm Enterprises in Rural Indonesia. *World Development*, Vol. 38, No. 5, pp.717–726.
- Gibson, J., Datt, G., Murgai, R., & Ravallion, M. (2021). For India's Rural Poor, Growing Towns Matter More Than Growing Cities. *World Development*, 146, 105579.
- Glaeser, E. L., Resseger, M. G., & Tobio, K. (2011). Inequality in Cities. *Journal of Regional Science*, 49(4), 617–646.
- Graves, E. M., Mattingly, M. J., & Wail, H. (2023). Introduction to the Second Special Issue on Inclusive Economic Development: Promoting Inclusive Economic Growth and Development. *Economic Development Quarterly*, 37(4), 299-301. doi:<https://doi.org/10.1177/08912424231186767>.
- Gupta, J., Pouw, NRM, Ros-Tonen, MAF, (2015). Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development. *euros. J. Dev. res.* 27, 541–559.

- H. Hill, M.E. Khan and J. Zhuang (eds). (2012). *Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth*. London: Anthem Press for the Asian Development Bank.
- H. Hill, MEK, and JZ (eds), (2013). *Building an Inclusive and Sustainable Indonesian Economy*. *Masy. Indonesia*. 39, 247–262.
- Haan, A. D. (2013). *Inclusive growth: More than safety nets*. SIG working paper, 1: 1-16.
- Habito, Cielito F. 2009. *Patterns of Inclusive Growth in Developing Asia: Insights from an Enhanced Growth-Poverty Elasticity Analysis*. Asian Development Bank Institute (ADBI) working paper series No. 145, Tokyo
- Hanushek, E. A. (2013). *Economic growth in developing countries: The role of human capital*. *Economics of Education Review*. Vol. 37 hal. 204–212. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.04.005>
- Hanushek, E. A. (2016). *Will more higher education improve economic growth?* *Oxford Review of Economic Policy*, 32(4), 538-552. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grw025>
- Harini Rika, Rina D.A, Supriyati dan M. Chrisna. (2019). *Analisis Luas Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi Di Kalimantan Utara*. *Jurnal Kawistara Universitas Gajah Mada*, Volume. 9: 15-27. Yogyakarta.
- Harniati. (2010). *Program-program Sektor Pertanian yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan*
- Harrod, R. F. (1939). *An Essay in Dynamic Theory*. *The Economic Journal*, 49(193), 14–33.
- Hartati, S. (2021). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 79-92.
- Hausmann, R., D. Rodrik, and A. Velasco. 2005. *Growth Diagnostic*. Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
- Hayati, M., Elfiana, & Martina. (2017). *Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah*
- Henderson, V., Shalizi, Z., & Venables, A. J. (2001). *Geography and Development*. *Journal of Economic Geography*, 1(1), 81–105.

- He S-l, Zhong Y, He W-w (2024) The impact of city size on income inclusive growth: A human capital perspective and evidence from China. PLoS ONE 19(2): e0288294. [https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0288294](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288294).
- Hidayat, E., & Supriharjo, R. 2014. Identifikasi Sub Sektor Unggulan Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(1), 1–4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j23373539.v3i1.5746>
- Hill, H., & Tjiptoherijanto, P. (2021). *Indonesia's Economic Development: Policy and Performance Since 1966*. Routledge.
- Hooper, E., Peters, S., & Pintus, P. (2018). To what extent can long-term investments in infrastructure reduce inequality? *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 2(2), 193. <https://doi.org/10.24294/JIPD.V2I2.858>.
- Hutton G, Bartram J.(2008), Global costs of attaining the Millennium Development Goal for water supply and sanitation. *Bull World Health Organ*. 2008; 86(1):13–9.
- Ianchovichina, E., & Lundstrom Gable, S. (2012). What is inclusive growth? International Monetary Fund.
- Ianchovichina, E., & Lundström, S. (2009). Inclusive growth analytics: Framework and application. World Bank Policy Research Working Paper, (4851).
- Ianchovichina, Elena, and S. Lundstrom Gable. (2012). “What Is Inclusive Growth?” In *Commodity Prices and Inclusive Growth in Low-Income Countries*, ed. by Rabah Arezki, Catherine Pattillo, Marc Quintyn, and Min Zhu. International Monetary Fund.
- Iddrisu, K., Doku, J. N., Abor, J. Y., & Dziwornu, R. (2023). Financial inclusion and inclusive growth in Africa: What is the moderation role of financial stability? *Cogent Economics & Finance*, 11, 2267857. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2267857>
- Ilmi Marina , Alpon Satrianto,(2023), Analysis of Government Expenditure Response, Foreign Direct Investment, Human Development Index, and Inclusive Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*
- Ilyas, I. & Prasetya, F. 2023. Pengaruh Belanja Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Journal of Development Economic and Social Studies*. Volume 02, Number 4, Pages 910-919. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.16>.

- Irawan, T., Purwono, R., & Widodo, T. (2012). Infrastructure and Economic Growth in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 27(1), 23-44.
- Isbah, U., & Iyan, R. Y. (2016). Analisis Peran Sektor Dalam Perekonomian Dan Kesempatan Kerja Pertanian Di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 7(19), 45–54.
- Isfrizal, & Rahman, B. (2018). Pengaruh Luas Lahan Persawahan, Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Petani Sawah Pada Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara(Studi Kasus Kemukiman Teupin Punti). 4, 19–34.
- Islam, N. (1995). Growth empirics: A panel data approach. *Quarterly Journal of Economics*, 110(4), 1127-1170. <https://doi.org/10.2307/2946651>
- Islamic Development Bank (IDB). (2010). *Indonesia: Kendala Kritis Bagi Pembangunan Infrastruktur*. Jeddah: IDB
- Jalilian, H. and J. Weiss. (2006). Infrastructure and Poverty: Cross Country Evidence. In J. Weiss and H.A. Kahn, eds. *Poverty Strategies in Asia: A Growth Plus Approach*. Cheltenham, UK and Northampton MA, USA: Edward Elgar.
- Jetten, J. (2019). The Wealth Paradox: Economic Prosperity and the Hardening of Attitudes Towards Minorities. *Advances in Experimental Social Psychology*, 60, 1–51.
- Jimenez-Castilla, Tania, Luis M. Bolivar, and Michael Segre-Castilla. (2020). Infrastructure and rurality: Challenges for sustainable economic development in Latin America. Paper presented at the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, Buenos Aires, Argentina, July 19–23.
- Julainsyah, H., & Riyono, A. (2018). Pengaruh Produksi, Luas Lahan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani Karet di Desa Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal*, 1(2), 65–72.
- Jumlah, J., Andriyani, D., & Nailufar, F. (2021). Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Sektor Pertanian Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Aceh Tahun 2008-2019. *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal*, 4(1), 9. DOI: <https://doi.org/10.29103/jepu.v4i1.3787> Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. *Jurnal S. Pertanian*, 1(3), 213-222.

- Jyoti Kumari Sharma (2019). Inclusive employment opportunities – The stem of inclusive growth in India. Dalam SOCIETY FOR RESEARCH and DEVELOPMENT (Ed.), *Journal of the 4th International Conference on Management, Science, Social Science and Humanities (iCon-MESSSH'19)* (hlm. 66–88). SOCIETY FOR RESEARCH and DEVELOPMENT.
- Kanbur, R., & Rauniar, G. (2010). *Inclusive Development: Two Papers on Conceptualization, Application, and the ADB Perspective*. Asian Development Bank.
- Kakwani, N. dan H. Son. (2008). Poverty Equivalent Growth Rate. *Review of Income and Wealth* 54(4): 643–655.
- Klasen, S. (2010). *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*. Asian Development Bank.
- Krugman, P. (1991). *Geography and Trade*. MIT Press.
- Katuka, B., Mudzingiri, C., & Ozili, P. K. (2024). Fiscal space, governance quality and inclusive growth: Evidence from Africa. *Journal of Financial Economic Policy*, 16(1), 80–XX. <https://www.emerald.com/insight/1757-6385.htm>
- Kazi, M. R. (2015). Status of women in india in the context of inclusive growth. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 20 (4), 125–130.
- Khan, A., Khan, G., Safdar, S., Munir, S., & Andleeb, Z. (2016). Measurement and determinants of inclusive growth: A case study of Pakistan (19902012). *The Pakistan Development Review*.
- Khan, M., & Nazir, N. (2023). Economic growth and social equity: An empirical analysis of inclusive growth in Pakistan. *Bulletin of Business and Economics*, 12(4), 734-738. <https://doi.org/10.61506/01.00408>
- Khan, M., Jehan, N., Zahoor, M., & Naz, N. (2020). Impact of Virginia Tobacco Cultivation on Poverty Status: Evidence from District Charsadda, Khyber Pakhtunkhwa. *Sarhad Journal of Agriculture*, 36(1).
- Kharisma, B., Remi, S. S., Wardhana, A., Roseline, H., & Rosiyan, M. B. P. (2021). The determination of leading sectors to improve Bandung City's competitiveness. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2021). Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>

- Khomsan, A. 1999. Fenomena kemiskinan. *Harian Suara Pembaharuan*, 1 November 1999 (<http://www.indonews.com/>), Jakarta.
- Kim, D.-W., Yu, J.-S., & Hassan, M. K. (2018). Financial inclusion and economic growth in OIC countries. *Research in International Business and Finance*, 43, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.178>
- Klasen, S. (2010), *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions and Some Constructive Proposals*, Manila.
- Kristyanto, V. S., & Dwi Budi Santoso, SE., MS., P. . (2015). Analisis Sektor Produksi Pendorong Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 3(2), 1–18.
- Kuncoro, Mudrajad, (2004). “Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang”. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Murdrajat. (2006). “Ekonomi Pembangunan”, Penerbit Salemba. Empat, Jakarta.
- Laderchi, Caterina Ruggeri., Saith Ruhi., Stewart. (2006). *U N D P, Poverty in Focus*, International Poverty Center, Brazil
- Lee, N., & Sissons, P. (2016). Inclusive growth? The relationship between economic growth and poverty in British cities. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 48(11), 2317–2339.
- Lipsey R.G And Steiner, (1981). *Economics*, Sixth edition. Harper and Row publisher. New York.
- Lu, S., Fang, G., & Zhao, M. (2023). Towards inclusive growth: Perspective of regional spatial correlation network in China. *Sustainability*, 15(5725). <https://doi.org/10.3390/su15075725>
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)
- M. Yusuf, Budi Hartono dan Buswari. (2019). The Factor Analysis that Influence The Employment Absorption at Songket Industry in Palembang South Sumatra Province, Indonesia. *International Conference on Life, Innovation Change, and Knowledge (ICLICK 2018)*. Volume 203. 2019. Halaman 420-424.

- Mangkoesoebroto, Guritno. (2001). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407-437. <https://doi.org/10.2307/2118477>
- Maulana, R., and Bowo, P. A. (2013). The Effect of Economic Growth, Education, and Technology on HDI Provinces in Indonesia 2007-2011. *Journal of Economics and Policy*. Vol. 6, No. 3, pp 103-213.
- McKinley, T. (2010). Inclusive growth criteria and indicators: An inclusive growth index for diagnosis of country progress.
- McKinley, T. (2010). Inclusive growth criteria and indicators: An inclusive growth index for diagnosis of country progress (No. 14). Asian Development Bank. <https://www.adb.org/>
- Megawati, E., & Sebayang, L. K. B. (2018). Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Economics Development Analysis Journal*, 7(3), 235–242. DOI<https://doi.org/10.15294/edaj.v7i3.25255>
- Meidiana, C., & Gamse, T. (2010). Development of Waste Management Practices in Indonesia. *European Journal of Scientific Research*, 40.
- Meilissa Ike Dien Safitri, Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik*.
- Milanovic, B. (2016). *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Harvard University Press.
- Min Tang. (2008). Inclusive Growth and the New Phase of Poverty Reduction in the People's Republic of China. *Asian Development Review*, vol. 25, nos. 1 and 2, pp. 81–99.
- Mincer, J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. *Journal of Political Economy*, 66(4), 281-302. <https://doi.org/10.1086/258055>
- Mushkin, S. J. (1962). Health as an Investment. *Journal of Political Economy*, LXX(5), 129–157.
- Mustajab, M. (2009). *Infrastructure Investment in Indonesia: Process and Impact*. PhD Dissertation, Rijksuniversiteit Groningen. Groningen: RUG.

- Nainggolan, R. (2016). Gender, Education Level, and Length of Business as Determinants of MSME Income City of Surabaya. *Performance Journal*. Vol. 20 No. 1, pp 1-12.
- Naustdalslid, J. (2014). Circular economy in China – The environmental dimension of the harmonious society. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 21(4), 303–313.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ncube, M., Anyanwu, J. C., & Hausken, K. (2014). Inequality, Economic Growth, and Poverty in the Middle East and North Africa (MENA). *African Development Review*, 26(3), 435–453.
- Nehen, Ketut. (2012). *Perekonomian Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press
- Neil Lee, Paul Sissons. (2016), Inclusive growth? The relationship between economic growth and poverty in British cities. *Environment and Planning A* 2016, Vol. 48(11) 2317–2339 ! The Author(s) 2016 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0308518X16656000 epn.sagepub.com.
- Nelson, R. R., & Phelps, E. S. (1966). Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. *American Economic Review*, 56(1/2), 69-75.
- Nguyen, H. T. T., Nguyen, C. V., & Nguyen, C. V. (2020). The effect of economic growth and urbanization on poverty reduction in Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 229-239.
- Nugraha, A. T., Prayitno, G., Situmorang, M. E., & Nasution, A. (2020). The role of infrastructure in economic growth and income inequality in Indonesia. *Economics and Sociology*, 13(1), 102–115. <https://doi.org/10.14254/2071>.
- Nugroho, H. Y. S. H., Indrawati, D. R., Wahyuningrum, N., Adi, R. N., Supangat, A. B., Indrajaya, Y., ... & Sudomo, A. (2022). Toward water, energy, and food security in rural Indonesia: A review. *Water*, 14(10), 1–25.
- Nzabona, A. & Ntozi, J. (2017). Does education influence the value of older persons? Assessing socio-demographic determinants of older persons' value in Uganda. *African Population Studies*, 31(2): 3694-3705.

- Ofori, P. E., Kuuwill, A., & Quaye, B. (2024). Effect of human capital development and institutional quality on inclusive growth in African countries. *Cogent Economics & Finance*, 12(1), 2357155. <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2357155>
- Oji, C. K. (2015). Promoting Financial Inclusion for Inclusive Growth in Africa. South African Institute of International Affairs, Occasional Paper 210.
- Osmani S. (2005) Defining pro-poor growth. One pager, 9. Brazilia: UNDP International Poverty Centre
- Ottaviano, G. I. P., & Puga, D. (1998). Agglomeration in the global economy: a survey of the “new economic geography.” *World Economy*, 21(6), 707–731. <https://doi.org/10.1111/1467-9701.00160>.
- Otun, Ostapenko. W. (2021). Incremental planning of the location of public health facilities in a rural region. *Indonesian Journal of Geography*, 53(1), 1–8. <https://doi.org/10.22146/IJG.56107>.
- Oyinlola, M. A., & Adedeji, A. O. (2019). Financial development, human capital and inclusive growth in sub-Saharan Africa. *Economic Change and Restructuring*, 52(1), 43-66. <https://doi.org/10.1007/s10644-018-9235-6>
- Oyinlola, M. A., & Adedeji, A. O. (2022). Human capital development and inclusive growth in sub-Saharan Africa: Evidence from panel data analysis. *African Journal of Economic Policy*, 29(2), 15-34. <https://doi.org/10.4314/ajep.v29i2.2>
- Oyinlola, M. A., Adeniyi, O., & Osabuohien, E. (2021). Human capital, innovation and inclusive growth in Africa. *Innovation and Development*, 11(3), 453-471. <https://doi.org/10.1080/2157930X.2021.1932078>.
- Oyinlola, MA, Adedeji, AA, Bolarinwa, MO, Olabisi, N., (2020). Governance, domestic resource mobilization, and inclusive growth in sub-Saharan Africa. *econ. anal. Policy* 65, 68–88.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Papilaya, E. C. (2013). 7 kiat percepatan pengurangan kemiskinan dan pemiskinan bangsa. IPB Press
- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S. (2012). *Pembangunan inklusif: prospek dan tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES : Prakarsa

- Prasetyo, R.B., & M. Firdaus. (2009). Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 2, No. 2, pp. 222-236.
- Pratama, Ahmad. D., Suparta, I. W., & Ratih, A. (2022). Spatial autocorrelation and economic convergence in Lampung Province. *JEJAK: Journal of Economics and Policy*, 15(1), 29–43. <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i1.34601>
- Pratiwi, I. E., & Ismal, R. (2017). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Sasaran Akhir Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 4(1), 73–91.
- Purnami, N. M. S., & Saskara, I. A. N. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Kontribusi Sektor Analisis Pengaruh Sektor Pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2015-2021, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(11), 1188–1218. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/24082/16077>.
- Puspita, D. P., Militina, T., & Effendi, A. S. (2020). Employment Opportunities and Poverty Levels in Pro V Insi Kalimantan Timur. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(1), 141-157. Retrieved from <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/930>.
- Putri, N. F. A. (2018). Pengaruh Luas Lahan Sektor Pertanian, Jumlah Tenaga Kerja, Kredit Perbankan dan Infrastruktur Irigasi Terhadap PDRB Sektor Pertanian Di Kabupaten Sumedang Periode 2005-2015. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Qiu, L., & Zhao, D. (2019). Urban inclusiveness and income inequality in China. *Regional Science and Urban Economics*, 74, 57–64.
- Raheem, I. D., Isah, K. O., & Adedeji, A. A. (2018). Inclusive growth, human capital development and natural resource rent in SSA. *Economic Change and Restructuring*, 51(1), 29–48. <https://doi.org/10.1007/s10644-016-9193-y>
- Ramadhan, Reza Rizki dan Yaya Setiadi. (2019). Pengaruh Modal Fisik dan Sumber Daya Manusia Terhadap Indks Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 17(2): 109-124. Desember 2019*
- Ramirez, A., Ranis, G., & Stewart, F. (1998). Economic growth and human development. *QEH Working Paper Series*.

- Ratnawati, K. (2020). The Impact of Infrastructure on Economic Growth, Educational Attainment, and Poverty Reduction in Indonesia. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 3(1), 1–17.
- Rauniyar, G., & Kanbur, R. (2009). Inclusive growth and inclusive development: A review and synthesis of Asian Development Bank literature (Occasional Paper No. 8). Independent Evaluation Department, Asian Development Bank. Retrieved from <https://www.adb.org/evaluation>
- Rauniyar, G., & Kanbur, R. (2010). Inclusive Development: Two Papers on Conceptualization, Application, and the ADB Perspective. Asian Development Bank.
- Ravallion, M. (2009). Pro-poor growth: A primer. *World Bank Research Observer*, 24(2), 137-159.
- Ravallion, M. and Chen, S. (2003), “Measuring pro-poor growth”, *Economics Letters*, Vol. 78 No. 1, pp. 93-99, doi: 10.1016/S0165-1765(02)00205-7.
- Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring pro-poor growth. *Economics letters*, 78(1), 93-99.
- Reid, N., Carroll, M. C., Smith, B. W., & Frizado, J. P. (2009). Planning and Socioeconomic Applications. In J. D. Gatrell & R. R. Jensen (Eds.), *Geotechnologies and the Environment 1* (1st ed., pp. 10–11). Springer Science+Business Media B.V. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9642-6>
- Resy, R. D., Anna, Y., & Mukhlis. (2023). The effect of poverty, unemployment and economic inequality on inclusive economic growth in Indonesia's provinces. *Eurasia: Economics & Business*, 3(69), Maret.
- Rini, D. L., & Tambunan, T. T. H. (2021). Inclusive economic growth of Indonesia and its determinants - Recent evidence with provincial data. Vol 4 Iss 1 Year 2021 *Asian Journal of Interdisciplinary Research*, Volume(Issue).
- Rodrik, D. (2004). *Industrial Policy for the Twenty-First Century*. Harvard University.
- Ruggeri Laderchi, C., Saith, R., & Stewart, F. (2003). Does it matter that we do not agree on the definition of poverty? A comparison of four approaches. In *Oxford Development Studies* (Vol. 31, Issue 3). <https://doi.org/10.1080/1360081032000111698>.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.

- Safrina, Y., & Ratna. (2023). The Impact of Labor Force Participation on Inclusive Economic Growth: A Case Study in Java Provinces. *Journal of Economic Development Studies*, 10(2), 45-62.
- Sahoo, P and K Paltasingh (2022): “Growth Elasticity of Poverty and Pro-poor Growth during Post Reform Period: A Tale of Two Indian State,” *Area Development and Policy*, online, DOI: <https://doi.org/10.1080/23792949.2021.2024763>.
- Sala-i-Martin, R. J. B. X. (1997). *Economic growth* Second Edition. In E. The MIT Press Cambridge, Massachusetts London (Ed.), *Water Quality International* (Vol. 1997, Issues 9–10). 2004 Massachusetts Institute of Technology. <https://doi.org/10.4324/9781351242936-16>
- Samans, R., Blanke, J., & Corrigan, G. (2015). *The Inclusive Growth and Development Report*. World Economic Forum, (September), 106.
- Santos, R., Gupta, J., Pouw, N. R. M., & Schwartz, K. (2020). Public water supply and sanitation policies and inclusive development of the urban poor in Brazil. *Water Policy*, Volume(Issue), Halaman.
- Sanusi, L. S. (2011). *Financial Inclusion for Accelerated Micro, Small and Medium Enterprise Development: The Nigerian Perspective*. Paper presented at the 2011 Annual Microfinance and Entrepreneurship Awards.
- Sawadogo, I., & Fall, N. (2021). The role of inclusive finance in the quest for inclusive growth. *Economics*, 10(3), 87–93. <https://doi.org/10.11648/j.eco.20211003.13>
- Schoneveld, G. C. (2020). Sustainable business models for inclusive growth: Towards a conceptual foundation of inclusive business. *Journal of Cleaner Production*, 277, 124062. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124062>
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *American Economic Review*, 51(1), 1-17.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press.
- Sen, A. (1981). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

- Shah, P., & Dubhashi, M. (2015). Review Paper on Financial Inclusion – The Means of Inclusive Growth. *Chanakya International Journal of Business Research*, 1(1), 37–48.
- Shi, Y., Guo, S., & Sun, P. (2017). The role of infrastructure in China's regional economic growth. *Journal of Asian Economics*, 49, 26-41.
- Sholihah, D.H.A. (2014). *Pertumbuhan ekonomi inklusif: Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap pertumbuhan kelas menengah di Indonesia*. Tesis. Bogor: IPB.
- Sihombing, R. (2022). *Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia*. Bappenas.
- Sihombing, P. R., Muslianti, D., & Yunita. (2022). RETRACTION NOTICE TO “Apakah Dana Desa dan Fungsi Belanja APBD Mampu Mengatasi Kemiskinan di Indonesia?” *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(2), 236–243. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.02.12>
- Singh, P. (2017). Kuznets Curve for Income Inequality: A Survey of the Empirical Evidence. *Asian Development Review*, 34(1), 1–38.
- Singh, K. D. (2017). Inclusive Growth and Poverty Reduction: A Case Study of India. *Indian Journal of Public Administration*, 63(4), 579–594. Soekartawi. (2006). *Analisis Usahatani*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Soleh, A., & Suwarni, R. (2021). Labor Market Participation and Economic Inclusivity: Evidence from Java Provinces. *Indonesian Journal of Economic Policy*, 8(1), 23-40.
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Son, H. H., & Kakwani, N. (2004). *Economic Growth and Poverty Reduction: Initial Conditions Matter*. International Poverty Centre.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality*. W. W. Norton & Company.

- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
- Stolbov M. (2012). The Finance-Growth Nexus Revisited: From Origins to Modern Theoretical Landscape. Discussion paper, economics open access E-journal.
- Stuart, E. (2011), "Making growth inclusive: some lessons from countries and the literature", Oxfam, available at: www.oxfam.org
- Sukirno, S. (2015). Mikroekonomi Teori Pengantar (ketiga). Rajawali Pers.
- Supriyadi, W. 2003. Psikologi Belajar. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Swamy, V. (2010). Bank-based financial intermediation for financial inclusion and inclusive growth. *Banks and Bank Systems*, 5(4), 1–12. Retrieved from <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/49602/%5Cn>
- Tambunan, T. H. T. (2016). PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF Sudah Sejauh Mana Indonesia? (1st ed.). LP3ES.
- Tambunan, T.T., (2015) Financial Inclusion, Financial Education, and Financial Regulation: A Story from Indonesia, ADBI Working Paper 535, Asian Development Bank Institute, Tokyo.
- Thangmuanlal, G. (2017). Inclusive Growth and Lamka Town: Identifying the Inclusive Growth Proliferators Within the MSMEs in Lamka Town (Doctoral dissertation, Tata Institute of Social Sciences).
- Thomas, A. E., Bhasi, M., & Chandramouli, R. (2017). Financial accessibility and economic growth- evidence from SAARC countries. *Contemplations on New Paradigms in Finance*, 32–52. <https://www.papers.ssrn.com>.
- Todaro, M. P. (2006). Pengantar Ekonomi Pembangunan. Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan ekonomi (Edisi Kesebelas ed.). Erlangga
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2004). "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan". Jakarta: Erlangga.
- Tulus, Tambunan, T.H. (2015). Perekonomian Indonesia. Era Orde Lama Hingga Jokowi. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Turner, S. (2014). *Indonesia's Small Entrepreneurs: Trading on the Margins*. Routledge.
- Turnovsky, Stephen J. (1996). "Fiscal Policy, Adjustment Costs, and Endogenous Growth." *Oxford Economic Papers*, 48(3): 361-381.
- UNDP. (1995). "Human Development Report" United Nations Development Programme. New York
- UNDP. (2015). *Human Development Report 2015: Work for Human Development*. United Nations Development Programme.
- United Nations Development Programme (UNDP). 1990. *Global Human Development Report*. Human Resources Department. Vellala, P. S., Madala, M. K., & Chhattopadhyay, U. (2014). A theoretical model for inclusive economic growth in Indian context. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(13), 229–235.
- Visi Saujaningati Kristyanto, (2015), Analisis Sektor Produksi Pendorong Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi inklusif Di Jawa Timur. *Jurnal ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. Vol. 21, No. 01, June 2023, pp. 85 ~ 97.
- White, H., & Booth, D. (2003). Using Development Goals to Design Country Strategies¹. In *Targeting Development: Critical Perspectives on the Millennium Development Goals*. <https://doi.org/10.4324/9780203403235>
- Widianingsih, I., & Paskarina, C. (2019). Inklusivitas dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 34(2), 182–197.
- Widyasanti, A. A. (2019). DATA Indeks Pembangunan Inklusif Kabupaten/Kota Di Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas. http://www.smeru.or.id/sites/default/files/events/public_hearing_inklusif_25_april_2019_amalia_a_widyasanti.pdf
- Wilkins, R. (2007). The changing socio-demographic composition of poverty in Australia: 1982–2004. *Australian Journal of Social Issues*, 42(4), 481–501.
- Winarti, A, 2014, Analisis Pengaruh Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992 – 2012, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Yogyakarta: Ekonesia.

- World Health Organization, (2008), Regional and Global Costs of Attaining the Water Supply and Sanitation Target (Target 10) of the Millennium Development Goals. Geneva: World Health Organization.
- World Bank. (2009). *World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography*. World Bank Publications.
- World Bank. (2013). *World Development Report 2013: Jobs*. World Bank Publications.
- World Economic Forum (WEF). (2017). *The Inclusive Growth and Development Report 2017*. World Economic Forum.
- Xu, H., Gu, X., Ahmad, M., Aziz, A. L., Uddin, I., & Aljuaid, M. (2024). The linkages between energy efficiency, renewable electricity, human capital and inclusive growth: The role of technological development. *Energy Strategy Reviews*, 53, 101414. <https://doi.org/>
- Yadav, S. (2023). Inclusive growth and poverty reduction in India. *IJRAR*, 10(2). <https://www.ijrar.org>
- Yu Zhu, Shahid Bashir, Mohamed Marie, (2022), Assessing the Relationship between Poverty and Economic Growth: Does Sustainable Development Goal Can be Achieved?. *Environmental Science and Pollution Research* (2022) 29:27613–27623 <https://doi.org/10.1007/s11356-021-18240-5>.
- Yuniarti,P.,Wianti,W.,&Nurgaheni,N.E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomidi Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2 (3), 169–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>.
- Yurui, L., Xiaofang, C., & Xuefeng, C. (2021). Inclusive growth and poverty reduction in China: A spatial econometric perspective. *China Economic Review*, 67, 101607.
- Yusuf, A. A., & Resosudarmo, B. P. (2015). On the Distributional Impact of a Carbon Tax in Developing Countries: The Case of Indonesia. *Environmental Economics and Policy Studies*, 17(1), 131–156.
- Zheng, J., & Shen, C. (2019). Domestic demand-based economic globalization and inclusive growth. *China Political Economy*.
- Zulfiqar, K., Chaudhary, M. A., & Aslam, A. (2016). Financial Inclusion and Its Implications for Inclusive Growth in Pakistan. *Pakistan Economic and Social Review*, 54(2), 297–325. <https://www.jstor.org/stable/26616711>